

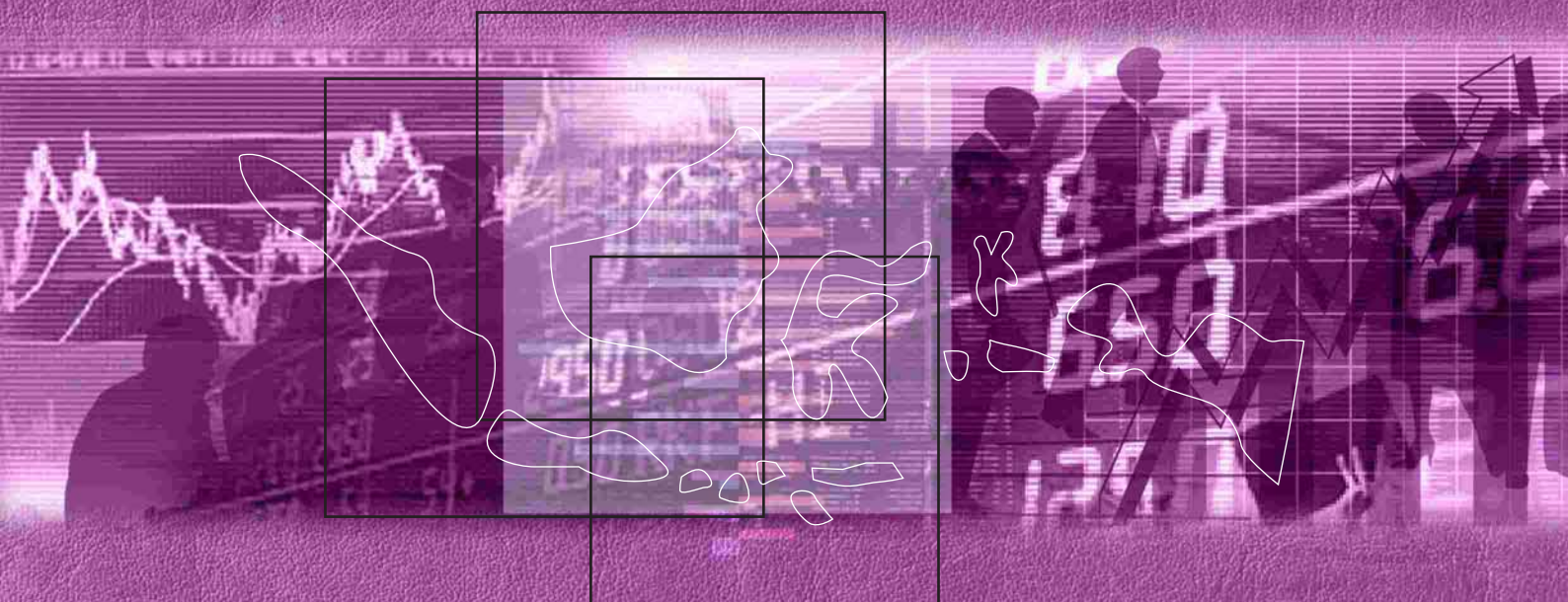
DASAWARSA 2006
PEKERJAAN LAYAK
ASIA-PASIFIK 2015



International
Labour
Organization

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013

Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan



DECENT WORK

A better world start here

Kantor ILO untuk Indonesia

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013

Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-028247-2 (print)
978-92-2-028248-9 (web pdf)

ILO

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2013: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan/Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2013

xii, 72 p

Labour and social trends in Indonesia 2013: Reinforcing the role of decent work in equitable growth, ISBN 978-92-2-028247-2 (print); 978-92-2-028248-9 (web pdf)/International Labour Office – Jakarta: ILO, 2013

xii, 66 p.

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggungjawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org

Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Dicetak di Indonesia

Kata pengantar

Edisi keenam dari Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia Kantor ILO Jakarta difokuskan pada upaya untuk memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan. Laporan ini dikeluarkan ILO, yang merupakan organisasi yang terdiri dari 185 pemerintahan, organisasi pekerja dan pengusaha di seluruh dunia yang didedikasikan untuk mewujudkan pekerjaan layak. Kantor ILO Jakarta sering kali dimintai informasi mengenai tren terbaru mengenai pekerjaan dari Konstituennya, dan laporan ini ditujukan untuk menjawab permintaan tersebut. Kami mengantisipasi bahwa informasi pada laporan tren ketenagakerjaan dan sosial terbaru dapat mendukung konstituen dalam menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam dialog yang berlangsung mengenai perkembangan pekerjaan layak. Kami juga berharap bahwa isu yang didiskusikan dapat berguna untuk mendukung perencanaan jangka menengah dan strategi promosi pekerjaan lainnya.

Laporan tahun lalu menganalisis kemajuan dalam mencapai tujuan pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan, karena kesinambungan telah menjadi sorotan, baik di bidang ekonomi, lingkungan, maupun sosial di Indonesia. Tahun ini kita memusatkan perhatian pada upaya untuk memperkuat peran pekerjaan layak bagi kesetaraan pertumbuhan. Pada tahun 2013, ekonomi Indonesia telah menghadapi penyesuaian dalam indikator makroekonomi, dan penyesuaian tersebut tercermin dengan sedikitnya kenaikan jumlah pengangguran di bulan Agustus 2013. Akan tetapi, secara umum kita dapat melihat bahwa hasil di berbagai indikator pekerjaan memiliki nilai positif selama beberapa tahun terakhir. Lebih banyak pekerja yang bekerja di sektor perekonomian formal dan lebih banyak pekerja yang memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tren ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan pekerjaan layak, walau masih ada beberapa tantangan utama dalam mewujudkan pekerjaan layak bagi semua. Produktivitas buruh, akses ke perlindungan sosial, dan upah tetap menjadi isu yang diperdebatkan. Oleh karena itu, tahun ini pesan kami adalah tentang mempertahankan pencapaian yang telah dibuat dalam dunia pekerjaan, sementara pada saat yang bersamaan memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan.

Laporan ini disusun oleh Emma Allen, ahli ekonomi pasar kerja untuk Kantor ILO Jakarta, dengan dukungan dari Peter Simojoki, Georgiana Runceanu, dan Miranda Fajerman. Laporan ini menerima masukan penting dari rekan-rekan kerja kami di Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, serta Unit Analisis Ekonomi dan Sosial Regional dari Kantor Regional ILO untuk kawasan Asia dan Pasifik. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Profesor Chris Manning atas masukan penting yang beliau berikan dalam penyusunan laporan ini.

Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat menghasilkan dialog yang produktif di antara Konstituen ILO dan mendukung pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan. Kami mengharapkan adanya kerjasama dengan Pemerintah, perusahaan, dan pekerja baik melalui bantuan keahlian teknis maupun proyek-proyek kerja sama teknis tahun 2014. Secara khusus,

kami ingin memperkuat peran pekerjaan layak dalam mewujudkan pembangunan yang merata melalui dukungan usaha yang strategis dalam mempromosikan pekerjaan, hubungan industri, dan perlindungan sosial sebagai bagian dari program bersama di tingkat negara.

Peter van Rooij
Direktur
Kantor ILO untuk
Indonesia dan Timor-Leste

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar tabel	vi
Daftar gambar	vi
Daftar kotak	vi
Daftar singkatan dan istilah	vii
Ringkasan eksekutif	ix
 Bagian 1. Tren ekonomi dan pasar kerja	 1
1.1 Tren ekonomi	1
1.2 Tren pasar kerja	8
1.3 Tren upah	20
 Bagian 2: Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan	 29
DWCP 2012-15 Tujuan 1: Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan	30
2.1 Mempromosikan pekerjaan lebih banyak dan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif: Perdagangan dan pekerjaan	31
2.2 Mempromosikan pekerjaan lebih banyak dan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif: Informasi pasar kerja	34
2.3 Pekerjaan dan keterampilan untuk kaum muda: Program pasar kerja aktif dan remaja	38
2.4 Pekerjaan layak dalam perekonomian desa: Dampak investasi infrastruktur	43
2.5 Produktivitas dan kondisi kerja dalam UKM: Memahami tantangan yang dihadapi UKM	47
 WCP 2012-15 Tujuan 2: Hubungan industrial yang baik untuk pengaturan ketenagakerjaan yang efektif	51
2.6 Kepatuhan perusahaan melalui pengawasan tenaga kerja: Kemajuan inspeksi	52
2.7 Perlindungan pekerja dari bentuk pekerjaan yang tidak dapat diterima: Pekerja rumahan	56
 DWCP 2012-15 Tujuan 3: Perlindungan sosial untuk semua	58
2.8 Menciptakan landasan perlindungan sosial: Strategi untuk menutup kesenjangan di Indonesia	59
2.9 Formalisasi ekonomi informal: Pekerjaan rumah tangga di Indonesia	63
 Lampiran I: Disagregasi BPS atas pekerjaan di sektor ekonomi formal dan informal	67
Lampiran II: Lampiran statistik - Indikator pasar kerja berdasarkan jenis kelamin 2009-2013	68
Lampiran III: Lampiran statistik - Indikator pasar kerja untuk remaja 2009-2013	70
Lampiran IV: Lampiran statistik - Indikator pasar kerja berdasarkan sektor ekonomi 2009-2013	71
Lampiran V: Lampiran statistik - Indikator pasar kerja berdasarkan status tenaga kerja 2009-2013	72
Lampiran VI: Lampiran statistik - Indikator upah 2006-2012	72

Daftar tabel

Tabel 1: Distribusi pendapatan yang diambil dari SNSE, 1971-2008 (persen)	6
Tabel 2: Prosentase pekerja pada pekerjaan rentan tahun 2012-2013	14
Tabel 3: Dampak ketenagakerjaan akibat penghapusan tarif impor bilateral tahun 2009	32
Tabel 4: Pencari kerja terdaftar berdasarkan tingkat pendidikan untuk tahun 2009-2011	35
Tabel 5: Jumlah pekerjaan dengan lowongan yang terisi tahun 2009-2011	37
Tabel 6: Program pasar kerja aktif - ringkasan evaluasi	39
Tabel 7: Definisi status ketenagakerjaan	48
Tabel 8: Target perluasan pengawasan tenaga kerja di Indonesia 2009-2013	53

Daftar gambar

Gambar 1: Pertumbuhan PDB untuk Indonesia, ASEAN 5, dan Dunia, 2002-2012	2
Gambar 2: Pengeluaran pada PDB (pada 2000 harga konstan, trilyun Rupiah)	3
Gambar 3: Tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan desil pengeluaran rumah tangga untuk 2002-2011	7
Gambar 4: Pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan PDB nyata, 2007-2013	8
Gambar 5: Rasio lapangan pekerjaan dan penduduk berdasarkan gender, 2009-2013	10
Gambar 6: Pengangguran berdasarkan usia, Mei 2013 (persen)	11
Gambar 7: Rasio setengah pengangguran berdasarkan gender, 2009-2013	12
Gambar 8: Pekerja paruh waktu dalam prosentase pekerja berdasarkan gender, 2012-2013	13
Gambar 9: Pekerja berdasarkan status pekerjaan, 2007-2013	15
Gambar 10: Pekerja usia 15-24 tahun dan jumlah pekerja berdasarkan status pekerjaan, Agustus 2012	16
Gambar 11: Pekerjaan formal dan informal antara tahun 2010 dan 2013, persen	17
Gambar 12: Formalitas atau pekerja berdasarkan gender, Mei 2013	18
Gambar 13: Pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi, 2012-2013 (persen)	18
Gambar 14: Pertumbuhan upah nominal dan upah rata-rata riil untuk pekerja, 2010-2013	20
Gambar 15: Upah nominal rata-rata berdasarkan tingkat pendidikan pekerja, 2008-2013	22
Gambar 16: Upah nominal rata-rata berdasarkan tingkat pendidikan dan gender, Agustus 2013	23
Gambar 17: Upah minimum dalam hal nominal dan riil, 2008-2013	24
Gambar 18: Tren upah minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), 2008-2012	25
Gambar 19: Tren upah minimum dan rata-rata untuk Indonesia, 2001-2013	26
Gambar 20: Prosentase pekerja di atas dan di bawah upah minimum provinsi, 2011-2013	27
Gambar 21: Jumlah pencari kerja formal dan lowongan kerja tahun 2011	36
Gambar 22: Hasil survei arus lalu lintas di beberapa lokasi pilihan di Kepulauan Nias	44
Gambar 23: Hasil survei arus lalu lintas berdasarkan alat transportasi	45
Gambar 24: Produktivitas pekerja riil di sektor manufaktur, 2001-2011	48
Gambar 25: Penilaian tentang landasan perlindungan sosial untuk Indonesia	60

Daftar kotak

Kotak 1: Tanggapan atas menurunnya indikator ekonomi	4
Kotak 2: Peningkatan sementara program perlindungan sosial	6
Kotak 3: Pembangunan ekonomi informal melalui promosi ketenagakerjaan	42
Kotak 4: Memperkuat kepatuhan perusahaan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing	54
Kotak 5: Apa yang dimaksud dengan landasan perlindungan sosial	62

Daftar singkatan dan istilah

ACFTA	Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China
AFTA	Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
ALMP	Program dan Kebijakan Pasar kerja Aktif
ANZFTA	Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN - Australia - Selandia Baru
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	Persatuan Negara-negara Asia Tenggara
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BinaPenta	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	Badan Pusat Statistik
DWCP	Program Nasional Pekerjaan Layak
FDI	Investasi Asing Langsung
FTA	Kawasan Perdagangan Bebas
G20	Kelompok 20 Negara
PDB	Produk Domestik Bruto
GFC	Krisis Keuangan Global
IDR	Rupiah Indonesia
ILO	Organisasi Perburuhan Internasional
Inpres	Instruksi Presiden
KHL	Kebutuhan Hidup Layak
KILM	Indikator Utama Pasar kerja
KPS	Kartu Perlindungan Sosial
LMI	Informasi Pasar kerja
LRB	Berbasis Sumber Daya Lokal
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MDG	Tujuan Pembangunan Milenium
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kemenakertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PKH	Program Keluarga Harapan
RACBP	Proyek Akses Pedesaan dan Peningkatan Kapasitas di Kepulauan Nias
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SNSE	Sistem Neraca Sosial Ekonomi
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional

LPS	Landasan Perlindungan Sosial
LPS-I	Inisiatif Landasan Perlindungan Sosial
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
USD	Dolar Amerika Serikat

Catatan: Ejaan bahasa Inggris untuk Pulau Jawa adalah dengan menggunakan huruf ‘v’, sementara ejaan dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf ‘w’, Jawa. Jika laporan mengacu pada nama provinsi di Jawa, maka penulisannya mengikuti ejaan dalam bahasa Indonesia (misalnya Jawa Timur)

Ringkasan eksekutif

Pada tahun 2013, ekonomi Indonesia menghadapi penyesuaian terhadap indikator makroekonominya, dan penyesuaian tersebut tercermin dalam penurunan indikator ketenagakerjaan di bulan Agustus 2013. Sebagai ilustrasi, pekerjaan di sektor manufaktur, yang menyediakan informasi penting tentang tren perdagangan dan investasi, mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir ini. Meskipun demikian, secara umum, hasil di berbagai indikator terbukti positif selama beberapa tahun terakhir dan Indonesia mengalami kemajuan dalam hal menuju pekerjaan yang layak. Tantangan tetap ada dan fokus yang lebih diperlukan dalam memperkuat peran pekerjaan yang layak dalam kesetaraan pertumbuhan.

Krisis ekonomi selama tahun 2013 dipengaruhi oleh pengetatan kebijakan moneter di AS, penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan, ketidakpastian fiskal dan tekanan terhadap harga konsumen dalam negeri yang terkait dengan penyesuaian terhadap subsidi BBM. Pemerintah bersikap proaktif dalam menanggapi penurunan statistik ekonomi, dan meluncurkan sejumlah langkah penanggulangan krisis untuk mendukung stabilisasi ekonomi. Reformasi kebijakan yang terjadi tahun 2013, khususnya mengenai subsidi BBM, diharapkan dapat mengurangi tekanan pada anggaran Pemerintah di tahun-tahun mendatang dan memberi kesempatan untuk memperluas program perlindungan sosial. Rencana-rencana untuk memperluas program-program perlindungan sosial perlu diwujudkan sekarang, agar dapat mengurangi dampak gejolak ekonomi dan reformasi kebijakan di masa mendatang.

Seperti yang disebutkan, penyesuaian dalam pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan penyesuaian dalam pekerjaan pada tahun 2013. Data survei Sakernas dari bulan Februari dan Mei menunjukkan bahwa pekerjaan telah berkembang (dari tahun ke tahun) pada semester pertama tahun 2013. Akan tetapi, penurunan tren ekonomi yang terjadi di awal 2013 terealisasi dalam pasar kerja di bulan Agustus 2013, dan selanjutnya situasi kerja mengalami kemunduran. Tingkat partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan pekerjaan menurun. Pekerjaan di sektor manufaktur juga mengalami penurunan sebesar setengah juta pekerja. Sisi baiknya, pekerjaan

Ekonomi telah menghadapi penyesuaian pada tahun 2013 dan ini tercermin pada peningkatan jumlah pengangguran

Tren menuju pekerjaan formal, yang memiliki implikasi penting untuk kesejahteraan pekerja, telah dipertahankan

formal dan pekerjaan rentan tetap stabil, dan transisi ini didorong oleh pekerja yang berubah menjadi pekerja kontrak. Sangatlah penting bahwa tren ini dipertahankan karena memiliki implikasi terhadap kesejahteraan pekerja, karena pekerja dengan kontrak pekerja umumnya memiliki akses yang lebih baik 56ke pelayanan sosial, seperti kesehatan dan kompensasi pekerja.

Tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, hingga mencapai titik rendah yaitu 5,8 persen pada bulan Mei 2013 dan ini merupakan tingkat pengangguran terendah yang dicapai di Indonesia selama satu dekade terakhir. Namun, krisis yang terjadi baru-baru ini membuat tingkat pengangguran meningkat hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005. Walaupun menunjukkan kenaikan dalam tingkat pengangguran, namun Indonesia terus menunjukkan penurunan dalam hal setengah pengangguran dan juga peningkatan dalam pekerjaan paruh waktu.

Indonesia saat ini berada dalam tahap pembangunan dengan memiliki penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk yang dependen dan lansia. Untuk mengoptimalkan manfaat yang terkait dengan rasio ketergantungan yang rendah ini, sangatlah penting bagi Pemerintah untuk memperluas investasi di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan, khususnya karena pekerja berpendidikan tinggi dapat memiliki upah lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik. Dalam hal ini, menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pasar kerja Indonesia saat ini sedang mengalami ketidakcocokkan keterampilan, yang tercermin pada defisit buruh terampil dan surplus buruh non terampil yang dijumpai dalam data pencari kerja/lowongan kerja. Oleh karena itu, pengangguran di Indonesia dikaitkan dengan persoalan struktural dan kurangnya permintaan serta ketidakcocokan keterampilan. Kurangnya informasi pasar kerja saat ini dan penyebaran proses perekrutan informal yang luas memperburuk masalah ketidakcocokan keterampilan di semua ekonomi. Dengan ekonomi yang terus menuju modernisasi dan transisi ke ekonomi berbasis informasi, permintaan akan pekerja yang berpendidikan tinggi akan terus berkembang, sehingga menunjukkan pentingnya pendidikan dan investasi di bidang keterampilan saat ini.

*Terjadi peningkatan
pada upah nominal,
sementara upah
riil rata-rata
terpengaruh oleh
tekanan inflasi*

Tahun 2013 memperlihatkan adanya kenaikan upah nominal rata-rata, dimana upah riil rata-rata sangat dipengaruhi oleh inflasi. Tren ini menunjukkan dampak inflasi terhadap daya beli pekerja. Dalam hal upah sektoral, upah tertinggi dijumpai pada sektor pertambangan dan penggalian, diikuti sektor perbankan dan keuangan. Seperti tahun sebelumnya, upah rata-rata terendah dijumpai di sektor pertanian. Yang menarik adalah bahwa pertumbuhan upah yang kuat tahun 2013 terjadi di sektor keuangan dan perbankan, sedangkan pertumbuhan yang lemah terlihat di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor dengan upah terendah juga terkena dampak akibat tingkat terendah pertumbuhan upah, sementara sektor-sektor dengan tingkat upah yang relatif lebih tinggi cenderung menikmati tarif pertumbuhan upah yang lebih tinggi pula.

Selama beberapa tahun terakhir ini, fokus banyak diberikan pada upah minimum, dimana peningkatan signifikan dalam upah minimum nominal dijumpai di beberapa provinsi di Indonesia per 1 Januari 2013. Walaupun upah minimum nominal rata-rata meningkat sebesar 15 persen di seluruh Indonesia tahun 2013, namun secara riil, kenaikan tersebut lebih kecil. Tren lainnya adalah penyempitan kesenjangan antara upah rata-rata dengan upah minimum rata-rata, dan ini menunjukkan bahwa perundingan upah berdasarkan sektor dan struktur pekerjaan di Indonesia perlu diperkuat. Selain itu, walaupun hak sah pekerja untuk mendapatkan remunerasi yang setara dengan upah minimum, namun tingkat kerentanan dan informalitas yang tinggi di pasar kerja Indonesia, serta kapasitas pengawasan ketenagakerjaan yang terbatas, menyebabkan sekitar sepertiga dari pekerja memperoleh upah di bawah upah minimum provinsi.

Kesenjangan gender masih sangat kental di Indonesia, dimana perempuan memiliki hasil yang buruk di sejumlah indikator, termasuk formalitas, kerentanan, upah, dan partisipasi angkatan kerja. Beberapa perbedaan dalam hasil gender dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, dan waktu kerja, sementara sebagian dari perbedaan dalam hasil gender terkait dengan diskriminasi. Kesenjangan upah antar gender sangat tinggi di kalangan pekerja berpendidikan tinggi di Indonesia. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami ketidaksetaraan upah antara pekerja laki-laki dengan perempuan, dengan fokus utama pada akses yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang adil serta memastikan “kesetaraan upah untuk nilai pekerjaan yang sama”. Strategi lebih lanjut juga diperlukan untuk mendukung perempuan agar dapat memasuki bidang pendidikan tinggi non-tradisional, seperti bidang kedokteran, hukum dan teknik, sehingga mereka dapat memperoleh upah yang lebih tinggi.

Peningkatan pengangguran memiliki implikasi terhadap pekerjaan remaja. Tren menunjukkan bahwa peserta angkatan kerja yang berusia antara 15 dan 29 tahun adalah sekitar 70 persen dari jumlah pengangguran di Indonesia. Walaupun tren pengangguran di kalangan kaum muda berkurang hingga Mei 2013, namun secara keseluruhan, tingkat pengangguran kaum muda masih tetap tinggi dan masalah peningkatan kualitas dan kuantitas kesempatan kerja bagi mereka tetap menjadi perhatian utama di Indonesia. Dari sisi positifnya, pekerja muda di daerah perkotaan tampaknya lebih efektif dalam mengakses pekerjaan di sektor formal, dimana hampir separuh dari semua pekerja muda memiliki kontrak kerja.

Lebih dari separoh pekerja di sektor perekonomian desa di Indonesia, sehingga tingkat partisipasi pekerja adalah lebih tinggi di desa ketimbang di kota. Akan tetapi, tingkat partisipasi yang lebih tinggi ini tidak berarti bahwa pekerja di desa memiliki kondisi yang lebih baik, karena masih ada jumlah pekerja tanpa upah dengan tingkat pendidikan lebih rendah yang bekerja di sektor pertanian. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil kerja di daerah pedesaan adalah dengan berinvestasi di bidang infrastruktur, termasuk jaringan transportasi, sehingga memungkinkan akses ke kesempatan kerja dan mata pencaharian serta akses ke pasar yang lebih besar.

*Peningkatan
pengangguran
memiliki implikasi
ke akses pekerjaan
bagi kaum muda*

*Kebijakan
pemerintah dapat
merangsang hasil
pekerjaan, akan
tetapi, lembaga dan
program diperlukan
demi mendukung
akses ke peluang
yang muncul*

Tema yang muncul lagi dalam laporan tahun ini berkaitan dengan masalah produktivitas. Kebijakan perdagangan dan investasi infrastruktur telah berhasil meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan pekerjaan. Namun, di tingkat mikro, hasil dari produktivitas buruh dialami secara tidak merata oleh perusahaan yang berbeda ukuran dan ada indikasi peningkatan ketidakcocokan dalam hal keterampilan. Oleh karena itu, institusi pasar kerja, terutama program pasar kerja aktif, kebijakan keterampilan, dan sistem informasi pasar kerja, memainkan peran penting dalam memperkuat akses ke pekerjaan layak demi kesetaraan pertumbuhan. Dalam hal ini masih sangat dibutuhkan lembaga dan program untuk membantu dan mendukung angkatan kerja dalam masa transisi ini. Lembaga-lembaga yang saat ini bertanggung jawab untuk penempatan pekerja menghadapi beberapa kelemahan dan memerlukan pengembangan dan penguatan lebih lanjut jika lembaga-lembaga tersebut ingin mengambil peran kepemimpinan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dalam hal kesesuaian pekerjaan di Indonesia.

Tema kedua dalam laporan ini berkaitan dengan masalah kerentanan pekerja dan akses ke perlindungan. Situasi ini menegaskan kebutuhan untuk mendorong kesetaraan pertumbuhan melalui pekerjaan layak. Oleh karena itu, dalam laporan tahun ini, pesan utama kami adalah memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan dan memastikan bahwa investasi di bidang pekerjaan tidak terhambat oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi. Situasi pengangguran menegaskan bahwa saat ini perumusan strategi sangat penting untuk memulihkan tren pengangguran yang menurun sebelumnya, agar memastikan bahwa target menurunkan pengangguran antara lima dan enam persen dapat dicapai pada tahun 2014.

Tren ekonomi dan pasar kerja

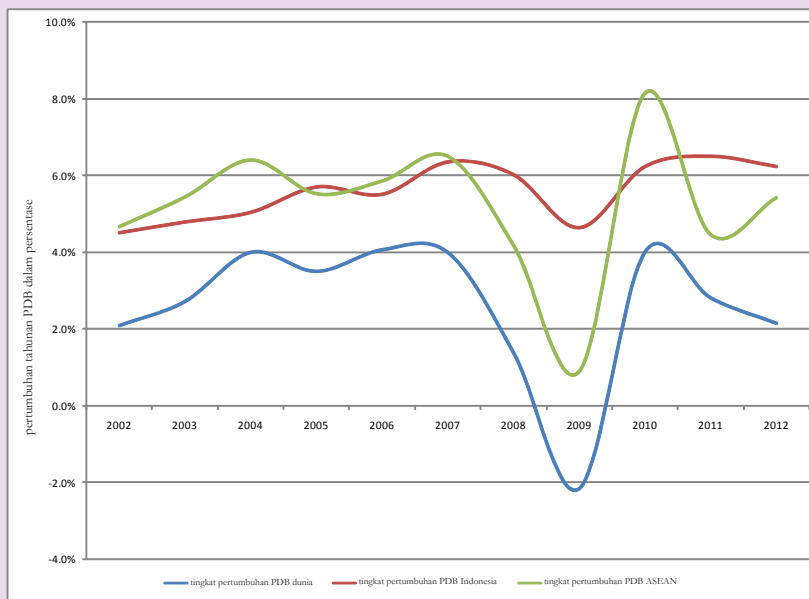
1.1. Tren ekonomi

Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini dan di seluruh dunia, perekonomian Indonesia tetap berada pada posisi yang menguntungkan. Tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan global dan rata-rata estimasi pertumbuhan PDB ASEAN 5.¹ Secara umum, tingkat pertumbuhan setelah Krisis Keuangan Global tahun 2008/2009 juga lebih kuat dibandingkan sebelum krisis. Seperti yang diperlihatkan dalam gambar 1, tingkat pertumbuhan PDB Indonesia mengalami sedikit penurunan tahun 2009 akibat Krisis Keuangan Global (GFC), namun secara umum, tingkat pertumbuhannya lebih kuat dan berkisar antara 4,5 dan 6,5 persen selama sepuluh tahun terakhir. Sebagai perbandingan, tingkat pertumbuhan global berkisar antara 2 dan 3 persen dalam beberapa tahun terakhir dan tingkat pertumbuhan regional masih belum pulih ke tingkat sebelum GFC. Akan tetapi, di kalangan negara-negara ASEAN, ekonomi Indonesia masih lebih kecil bila dibandingkan negara Laos dan Kamboja yang tumbuh lebih cepat dari Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini.

Dibandingkan dengan ASEAN, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang relatif lebih cepat

1 ASEAN 5 meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Gambar 1:
Tingkat Pertumbuhan PDB Indonesia, ASEAN 5, dan Dunia, 2002-2012



Sumber: Bank Dunia (2013) Indikator Perkembangan Dunia, Bank Dunia, Washington D.C.

*Indonesia
memainkan peran
penting dalam
ekonomi global dan
ASEAN*

Perekonomian Indonesia menyumbangkan 1,2 persen dari PDB² global pada tahun 2012 dan merupakan salah satu dari 20 negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Indonesia juga merupakan ekonomi terbesar di antara negara-negara ASEAN dan menyumbangkan 30 hingga 40 persen dari pendapatan regional ASEAN setiap tahunnya. Ekonomi utama ASEAN lainnya termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang secara kolektif menyumbangkan 50 hingga 60 persen dari PDB regional dalam jangka waktu tersebut. Negara-negara lainnya (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) secara kolektif umumnya menyumbang kurang dari 10 persen dari PDB regional.

*Ekonomi telah
mengalami
perubahan di
tahun 2013*

Terlepas dari tren positif di kawasan ini, iklim domestik telah mengalami penurunan dalam hal indikator ekonomi tahun 2013 karena gabungan dari faktor internal dan eksternal. Penurunan ini dikaitkan dengan volatilitas pasar keuangan internasional, pengetatan kebijakan moneter di AS, dan revisi subsidi BBM dalam negeri yang memicu inflasi. Inflasi mencapai 8,40 persen dari tahun ke tahun pada bulan September 2013. Tingkat inflasi diperkirakan mencapai puncaknya pada kuartal terakhir tahun 2013, dan bila tidak ada gejolak yang signifikan, tingkat inflasi diperkirakan akan stabil pada 6,7 persen di tahun 2014.³

Bank Dunia memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB akan menurun hingga 5,6 persen di tahun 2013 dan 5,3 persen di tahun 2014.

2 1,2 persen dari PDB pada harga saat ini (nominal) atau 0,8 persen dari PDB pada harga konstan (riil) tahun 2005.

3 Bank Dunia (2013) Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Penyesuaian lanjutan - Oktober 2013, Bank Dunia, Jakarta.

Menurut sejarah, selama dekade terakhir, konsumsi keluarga dan investasi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB di Indonesia. Pada kuartal pertama 2013, konsumsi domestik melemah dan turun 0,2 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya. Selain itu, tantangan kebijakan moneter menyebabkan penurunan pertumbuhan investasi di Indonesia, dimana investasi turun lebih dari 4 persen dari tahun sebelumnya pada kuartal pertama tahun 2013 (lihat gambar di bawah). Penurunan investasi ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan pekerjaan tahun 2013, serta melihat berkurangnya modal yang mengalir ke kegiatan penciptaan pekerjaan di Indonesia.

Gambar 2:
Pengeluaran PDB (pada 2000 harga konstan, trilyun Rupiah)



Sumber: Data Triwulanan PDB BPS (2013), Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Dampak inflasi terhadap perekonomian Indonesia tahun 2013 didominasi oleh penurunan subsidi BBM dan diperburuk oleh kebijakan perdagangan yang terbatas serta fluktuasi musiman yang terkait dengan perayaan Idul Fitri. Langkah yang diambil Pemerintah tanggal 22 Juni 2013 untuk mengurangi subsidi solar sebesar Rp 1.000 per liter dan subsidi bensin sebesar Rp 2.000 per liter menyebabkan peningkatan inflasi secara tajam, dan penyesuaian harga kemungkinan akan terus berlanjut hingga tahun 2014.

Kekhawatiran juga muncul terkait risiko inflasi dari sisi penawaran akibat kenaikan upah minimum tahun 2013.⁴ Dalam hal ini, Instruksi Presiden (Nomor 9/2013) telah dikeluarkan baru-baru ini yang memberikan panduan tentang kenaikan upah minimum tahunan kepada dewan pengupahan tingkat provinsi dan kabupaten. Instruksi Presiden ini berupaya mengatasi masalah yang terkait dengan ketidakpastian kenaikan upah bagi investor dengan memberikan panduan tentang hubungan antara kenaikan

Hasil pada inflasi telah didominasi oleh penyesuaian terkait dengan subsidi BBM

4 World Bank (2013) Indonesia Economic Quarterly: Continuing adjustment - October 2013, World bank, Jakarta.

upah minimum tahunan, inflasi, dengan produktivitas. Akan tetapi, tren keseluruhan terkait kenaikan upah tidak menunjukkan masalah inflasi yang mendorong kenaikan upah hingga saat ini. Bagian 1.3 membahas tentang masalah upah secara lebih terperinci.

Kotak 1: Tanggapan atas indikator penurunan ekonomi

Pada tanggal 24 Agustus 2013, Pemerintah Indonesia meluncurkan satu paket yang terdiri dari empat paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian Indonesia dan merespon penurunan indikator ekonomi. Paket kebijakan ini mencakup kebijakan untuk:

- (1) Meningkatkan neraca transaksi berjalan dan menstabilkan mata uang (Rupiah);
- (2) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan daya beli;
- (3) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi;
- (4) Mempercepat investasi.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang mencakup revisi pajak atas barang mewah, buku non-fiksi, dan industri padat karya untuk merangsang pertumbuhan. Instruksi Presiden tentang penetapan upah (Inpres No.9, 2013) juga dikeluarkan, yang menyediakan pedoman tentang penetapan upah minimum bagi dewan pengupahan. Selain itu, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan pembayaran sambil memperkuat stabilitas sistem keuangan. Paket langkah kebijakan termasuk perpanjangan masa deposito valuta asing, kelonggaran pembatasan pembelian valuta asing, penyesuaian ketentuan tentang pengalihan (*swap*) valuta asing untuk bank, pengenduran ketentuan utang luar negeri dengan memperbesar jumlah pengecualian untuk utang luar negeri jangka pendek, dan penerbitan Sertifikat Deposit Bank Indonesia (SDBI).

Keuntungan fiskal dari penyesuaian subsidi BBM mungkin tidak dapat diwujudkan karena penyesuaian nilai tukar

Di tahun 2013, pengeluaran pemerintah diperkirakan mencapai Rp 1.726 triliun sedangkan pendapatan Pemerintah diperkirakan mencapai Rp 1.502 triliun.⁵ Sejak tahun 2010, pengeluaran Pemerintah tumbuh antara 9 dan 17 persen per tahun, dengan peningkatan pengeluaran untuk pegawai (staf), barang dan jasa, serta modal. Pengeluaran untuk bantuan sosial berfluktuasi, dan sedikit menurun seperti porsi pengeluaran keseluruhan sejak tahun 2005. Pengeluaran untuk subsidi, khususnya BBM, juga berfluktuasi, karena perubahan nilai tukar rupiah dan perubahan harga minyak internasional. Pada tanggal 22 Juni 2013, Pemerintah berkomitmen untuk menghapus Rp 1.000 per liter dari subsidi solar dan menghapus Rp 2.000 per liter dari

5 Revisi angka

subsidi BBM. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada awalnya diperkirakan akan menghemat pengeluaran Pemerintah sebesar Rp 13,1 triliun pada tahun 2013. Akan tetapi, karena depresiasi nilai tukar rupiah tersebut, penghematan pengeluaran ini tidak terwujud. Situasi ini menegaskan risiko yang terkait dengan pemberian subsidi tetap untuk komoditas dari pasar internasional yang dikenakan penyesuaian harga dan nilai tukar.

Pendapatan Pemerintah meningkat antara 12 dan 18 persen per tahun sejak 2010, dimana sebagian besar keuntungan ini berasal dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan non migas. Nilai tambah dan pajak penghasilan non migas diperkirakan akan mencapai lebih dari 60 persen atau Rp 937 triliun dari pendapatan tahun 2013. Akan tetapi, penurunan pertumbuhan PDB nominal dan depresiasi rupiah dapat mempengaruhi realisasi pendapatan Pemerintah. Pemerintah mengalami defisit fiskal selama beberapa tahun terakhir, dimana defisit diperkirakan mencapai 1,1 persen dari PDB tahun 2011 dan 1,9 persen dari PDB tahun 2012. Pada tahun 2013, defisit fiskal diharapkan dapat mencapai 2,4 persen dari PDB, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi, termasuk depresiasi rupiah, dan tren ini berdampak terhadap pengumpulan pendapatan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2013, 11,4 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan nasional sebesar Rp 271.626 per bulan. Ini adalah penurunan dari perkiraan kemiskinan bulan Maret 2012 sebesar 12,0 persen. Kemiskinan terus terkonsentrasi secara spasial di daerah pedesaan, dimana 14,3 persen dari penduduk desa dan 8,4 persen dari penduduk kota berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun jumlah orang miskin terus berkurang, namun secara keseluruhan, ketimpangan berdasarkan ukuran indeks Gini⁶ mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 0,41. Demikian pula, data tentang pengembalian modal dan pengembalian tenaga kerja berdasarkan tabel input-output menunjukkan bahwa pangsa tenaga kerja belum meningkat selama 40 tahun terakhir ini, meskipun terjadi peningkatan dalam hal pekerjaan berupah dalam total pekerjaan yang ada. Perubahan struktural ini perlu diikuti dengan peralihan dari kombinasi penghasilan menjadi penerimaan upah. Tabel di bawah ini diambil dari tabel input-output Indonesia antara tahun 1971 dan 2008, dan perincian distribusi antara buruh dan modal dari waktu ke waktu.

Kemiskinan terus menurun, tetapi tantangan spasial tetap ada...

6 Indeks Gini adalah ukuran distribusi pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Rasio gini terletak antara nol (kesetaraan sempurna) dan satu (ketimpangan sempurna). Untuk pembahasan lebih lanjut lihat: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_145695.pdf

Tabel 1:
Distribusi pendapatan yang diambil dari SNSE, 1971-2008 (persen)

Kode tabel input output	1971	1975	1980	1985	1990	1995	2005	2008
201 Kompensasi pekerja	29,2	24,9	24,1	27,7	27,4	30,5	30,7	30,9
202 Surplus pengoperasian bersih dan kombinasi penghasilan	62,4	68,1	71,2	63,8	60,7	56,8	57,6	58,7
203 Depresiasi	5,3	5	5,4	6,4	7,4	8,1	10,1	10,4
204 Pajak tak langsung	3,1	2	2,3	2,9	5	4,6	3,9	3,8
205 Subsidi	0	0	-3,1	-0,8	-0,6	0	-2,3	-3,8
Surplus pengoperasian bruto	70,8	75,1	75,9	72,3	72,6	69,5	69,3	69,1
209 Nilai tambah bruto	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Tabel Input Output, beberapa tahun.

Mengingat penurunan indikator ekonomi makro baru-baru ini, kemungkinan mencapai target pengurangan kemiskinan jangka menengah Pemerintah (mengurangi kemiskinan menjadi antara 8 hingga 10 persen pada tahun 2014) tidaklah pasti. Peningkatan program perlindungan sosial sementara dan bertarget baru-baru ini, untuk mengimbangi pengurangan subsidi BBM, akan menghasilkan peningkatan pendapatan bagi keluarga miskin dan rentan, dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan untuk jangka pendek. Akan tetapi, kebijakan ini agaknya tidak akan berdampak pada distribusi dan ketidaksetaraan di Indonesia untuk jangka panjang karena program bantuan tunai bersifat sementara sedangkan kelanjutan upaya untuk memperluas program perlindungan sosial yang lain masih belum jelas.

Kotak 2: Peningkatan sementara program perlindungan sosial

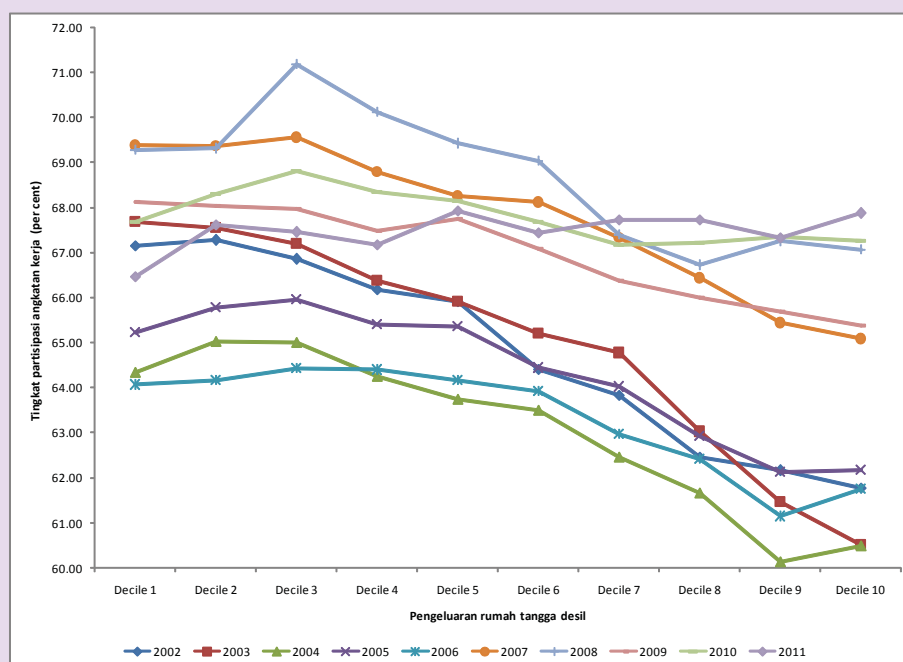
Setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni, Pemerintah mengumumkan program bantuan tunai tak bersyarat sementara (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, BLSM) dan meningkatkan program perlindungan sosial lainnya untuk memberikan imbalan kepada keluarga berpenghasilan rendah karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. BLSM didistribusikan kepada keluarga termiskin di Indonesia (di bawah 25 persen atau di bawah 15,5 juta keluarga) melalui kantor pos negara (PT POS) menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kemampuan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan program bantuan tunai tanpa syarat yang bersifat sementara dan bertarget ini merupakan pencapaian yang sangat penting. Program yang lain yang ditingkatkan sementara adalah bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan, PKH), program beasiswa (Bantuan Siswa Miskin untuk, BSM), dan program beras untuk kaum miskin (Beras Miskin, Raskin).

Karena sistem perlindungan sosial di Indonesia berkembang dan saat ini hanya menyediakan manfaat yang terbatas bagi keluarga pengangguran yang miskin dan rentan, banyak dari keluarga ini yang tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam pasar kerja untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Gambar di bawah ini menyajikan data tentang partisipasi angkatan kerja berdasarkan desil pengeluaran keluarga antara tahun 2002 dan 2011 dari survei Susenas BPS. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa keluarga yang lebih miskin biasanya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi daripada keluarga yang lebih makmur. Selama masa krisis, partisipasi angkatan kerja di seluruh desil cenderung rata, yang kemungkinan disebabkan oleh pengetatan umum dari pendapatan rumah tangga selama penurunan ekonomi.

Keluarga miskin biasanya memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dari keluarga yang lebih makmur

Besar kemungkinan bahwa keluarga miskin di Indonesia memiliki tingkat partisipasi pasar angkatan kerja yang lebih tinggi karena kurangnya pilihan untuk memperoleh pendapatan dari sumber alternatif untuk mendukung hidup mereka. Akan tetapi, peluang pasar kerja yang dapat diakses oleh keluarga miskin kemungkinan kurang memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Pekerjaan tersebut mungkin tidak tetap, di bawah upah minimum, dan kurang perlindungan pekerja yang lain. Oleh karena itu, situasi ini menegaskan desakan untuk perluasan manfaat perlindungan sosial demi meningkatkan hasil-hasil pembangunan, terutama bagi keluarga miskin dan informal. Hal ini berkaitan dengan rencana Pemerintah untuk memulai pelaksanaan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2014, yang akan didukung melalui anggaran negara dan pinjaman pembangunan. Di saat yang bersamaan, program bantuan tunai, program keuangan mikro, dan program pekerjaan umum berbasis masyarakat juga sedang diperluas.

Gambar 3: Tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan desil pengeluaran rumah tangga tahun 2002-2011



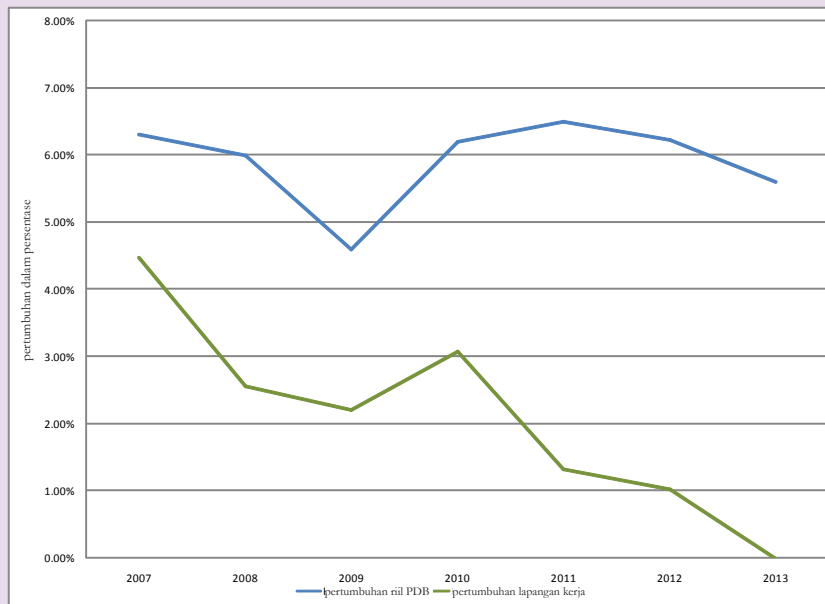
Sumber: BPS (2013) SUSENAS (tahun tertentu), Badan Pusat Statistik, Jakarta

1.2 Tren pasar kerja

Penyesuaian makro-ekonomi pada tahun 2013 menghasilkan penyesuaian pasar kerja

Perekonomian Indonesia telah mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada tingkat penciptaan lapangan kerja. Tingkat pertumbuhan PDB berada antara 5 dan 6 persen selama periode terakhir, namun, tingkat pertumbuhan pekerjaan telah berfluktuasi dan cenderung menurun dari waktu ke waktu (lihat gambar di bawah). Data pertumbuhan lapangan kerja antara bulan Agustus 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa situasi kerja relatif stagnan atau menurun sepanjang tahun. Namun, data dari survei Sakernas bulan Februari dan Mei menunjukkan hasil yang berbeda, dan mengindikasikan bahwa pekerjaan telah berkembang (dari tahun ke tahun) pada semester pertama tahun 2013. Di samping itu, ada beberapa indikasi terjadinya gejolak di pasar kerja, dimana jumlah pekerja di daerah perkotaan meningkat hingga hampir mencapai 1 juta sedangkan jumlah pekerja di desa berkurang mendekati 1 juta antara bulan Agustus 2012 dan Agustus 2013. Oleh karena itu terdapat kemungkinan bahwa penurunan pada indikator ekonomi yang terjadi di awal 2013 baru terjadi dalam pasar kerja di bulan Agustus 2013, dan selanjutnya situasi kerja mengalami kemunduran.

Gambar 4:
Tingkat pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan riil PDB, 2007-2013



Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Agustus 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

*Estimasi pertumbuhan lapangan kerja berdasarkan data Sakernas bulan Agustus; termasuk perkiraan tingkat pertumbuhan PDB tahun 2013.

Berdasarkan hal ini, penyesuaian juga terlihat dari penurunan partisipasi angkatan kerja dari 67,9 persen di bulan Agustus 2012 menjadi 66,9 persen di bulan Agustus 2013. Antara bulan Agustus 2012 dan Agustus 2013, partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja berkurang drastis, dimana ada tambahan 1 juta laki-laki dan 1,6 juta perempuan yang dilaporkan tidak aktif secara ekonomi. Perempuan usia 30 hingga 45 tahun biasanya melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki di desa dilaporkan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di luar pasar kerja. Fluktuasi dalam hal partisipasi angkatan kerja ini mungkin sebagian menunjukkan adanya krisis ekonomi dan mungkin juga dipengaruhi oleh bulan Ramadan. Perbedaan gender dalam partisipasi angkatan kerja terus bertahan, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja untuk laki-laki berkisar antara 84 dan 85 persen, dan tingkat angkatan kerja bagi perempuan berkisar antara 52 dan 53 persen selama tahun 2012 dan 2013. Dalam hal pekerjaan, pada tahun 2013 sekitar 62 persen laki-laki bekerja, sementara perempuan sekitar 38 persen yang bekerja.

Ketidaksetaraan gender dalam hasil angkatan kerja terus bertahan

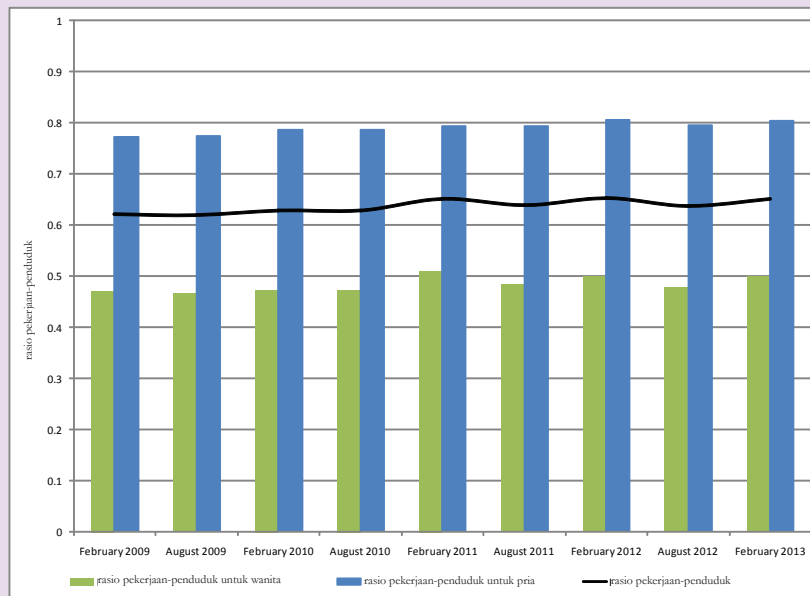
Kesenjangan antar daerah juga tetap ada, dengan angkatan kerja terus akan berkumpul di sekitar pulau Jawa, Sumatera, dan Bali, dan hasil kerja terus memburuk di bagian timur Indonesia. Dari segi lokasi, daerah perkotaan menyumbang 48,8 persen lapangan kerja, sedangkan daerah pedesaan menyumbang 51,2 persen lapangan pekerjaan pada bulan Mei 2013. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan.

Rasio lapangan pekerjaan dan penduduk - porsi dari penduduk usia kerja yang bekerja - diperkirakan 65 persen dari November 2012 sampai Mei 2013 yang lebih tinggi dari rata-rata global 2012 yaitu 60,3 persen.⁷ Rasio lapangan pekerjaan dan penduduk untuk laki-laki dan perempuan menunjukkan variasi yang signifikan, dengan rasio laki-laki dan perempuan diperkirakan mencapai 80,3 persen dan 50,0 persen masing-masing pada bulan Februari 2013. Tren hasil gender telah menunjukkan peningkatan terbatas dalam kesenjangan dari waktu ke waktu. Untuk kaum muda (15-24 tahun) rasio ini juga menampilkan kesenjangan gender, tetapi perbedaan tersebut tidak begitu besar. Rasio lapangan pekerjaan dan penduduk untuk kaum muda adalah 41,2 persen pada bulan Februari 2013 dan rasio untuk kaum muda laki-laki dan kaum muda perempuan diperkirakan masing-masing mencapai 50,0 persen dan 32,4 persen. Komposisi rasio lapangan pekerjaan dan penduduk untuk kaum muda dapat dikaitkan dengan peningkatan tingkat pendidikan, khususnya bagi kaum muda perempuan, yang akan membantu meningkatkan hasil gender rasio lapangan pekerjaan dan penduduk dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, terdapat kemungkinan bahwa rasio lapangan pekerjaan dan penduduk tinggi karena Indonesia saat ini sedang mengalami “*dividen demografi*” (persentase penduduk dengan usia kerja tinggi dan rasio dependensi rendah). Guna mengoptimalkan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan rasio dependensi rendah ini,

7 ILO (2013) Laporan Tren Pekerjaan Global 2013: Pemulihan dari penurunan pekerjaan kedua, Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa.

upaya ekstra yang dilakukan untuk mempromosikan hasil yang merata bagi perempuan melalui dukungan pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan hambatan bagi perempuan untuk masuk pasar kerja sangatlah penting.

Gambar 5:
Rasio pekerjaan-penduduk berdasarkan gender, 2009-2013



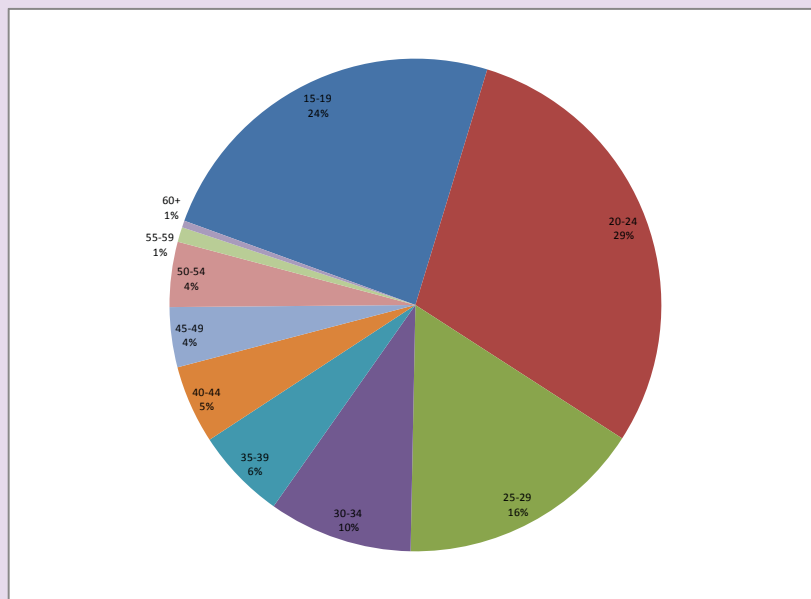
Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Februari 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

*Tingkat
pengangguran
bulan Agustus 2013
meningkat untuk
pertama kali sejak
tahun 2005*

Tren pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada bulan Mei 2013, pengangguran diperkirakan mencapai 5,8 persen, tingkat pengangguran terendah dicapai di Indonesia selama dekade terakhir. Namun, penurunan terbaru dalam indikator ekonomi telah melihat adanya peningkatan tingkat pengangguran hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005. tertinggi terlihat di kalangan lulusan SMA dan SMK. Mereka umumnya berusia antara 15 sampai 25 tahun dan belum punya pengalaman kerja. Secara umum, sebagian besar pekerja yang menganggur di Indonesia sedang mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil yang sudah merasa putus asa dan enggan mencari pekerjaan atau sedang mempertimbangkan upaya untuk membuka usaha sendiri atau menunggu dibukanya lowongan kerja baru.

Situasi pengangguran menegaskan bahwa saat ini perumusan strategi sangat penting untuk memulihkan tren pengangguran yang menurun sebelumnya, untuk memastikan bahwa target menurunkan pengangguran antara lima dan enam persen dapat dicapai pada tahun 2014. Lebih dari itu, perhatian lebih lanjut mengenai hasil pengangguran dijamin, karena pengangguran terus tersebar secara tidak merata di seluruh kelompok demografis. Contohnya, dari 70 persen pengangguran pada tahun 2013, 4,9 juta berusia antara 15 dan 29 tahun.

Gambar 6:
Pengangguran berdasarkan usia, Mei 2013 (persen)



Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam keterlibatan pasar kerja bagi pengangguran. Lebih lanjut dijelaskan, sebagian besar pencari kerja yang menganggur telah lulus SMA sebagai tingkat pendidikan tertinggi mereka, sementara sebagian besar pekerja menganggur yang kehilangan semangat memiliki tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenuhi kriteria perekrutan perusahaan, sementara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak memenuhi tuntutan dengan mudah, dan oleh karena itu pekerja ini memiliki risiko kehilangan semangat lebih tinggi.

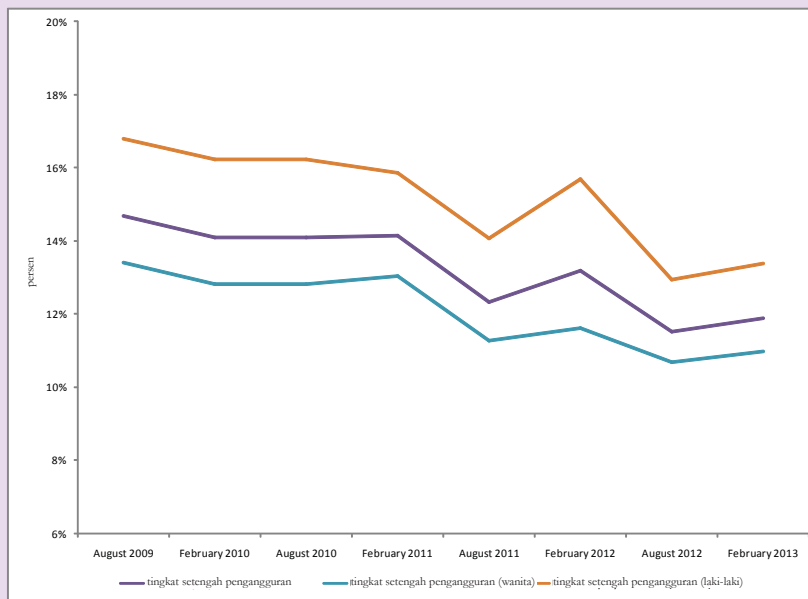
Tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam keterlibatan pasar kerja bagi pengangguran

Tingkat pendidikan telah membaik dari waktu ke waktu, dengan berkurangnya penduduk usia kerja yang tidak sekolah dan lebih banyak penduduk yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Perbaikan dalam pencapaian pendidikan dapat dijumpai antara tahun 2012 dan 2013, terutama untuk kenaikan jumlah orang dengan tingkat pendidikan tinggi dan penurunan jumlah orang yang tidak sekolah dan lulus sekolah dasar sebagai tingkat tertinggi pencapaian pendidikan mereka. Sangatlah penting agar kebijakan terus memberikan dukungan bagi penduduk usia kerja, khususnya kaum muda, untuk melanjutkan pendidikan mereka, dengan demikian akan mengurangi jumlah pekerja berpendidikan rendah yang memasuki pasar kerja di masa yang akan datang.

Beberapa pekerja ingin bekerja lebih lama dan dianggap sebagai bagian dari setengah pengangguran dengan “waktu terkait” (bekerja kurang dari 35 jam dan bersedia untuk bekerja lebih lama). Secara umum, tren setengah pengangguran ini telah menurun di Indonesia (lihat gambar di bawah). Pada bulan Februari tahun 2013, 11,89 persen dari penduduk yang bekerja

dianggap setengah pengangguran, yang sedikit meningkat dari bulan Agustus 2012 (11,52 persen). Pada bulan Agustus 2013 setengah pengangguran diperkirakan mencapai 9,2 persen, yang menunjukkan bahwa setengah pengangguran terus menurun, sedangkan pengangguran telah meningkat. Penurunan jumlah setengah pengangguran ini kemungkinan besar disebabkan peralihan perempuan dari setengah pengangguran menjadi pekerja paruh waktu, dimana jumlah perempuan setengah pengangguran berkurang sebesar 1,8 juta sedangkan pekerjaan paruh waktu untuk perempuan meningkat sebesar 1,8 juta antara bulan Agustus 2012 dan Agustus 2013.

Gambar 7:
Tingkat setengah pengangguran berdasarkan gender, 2009-2013



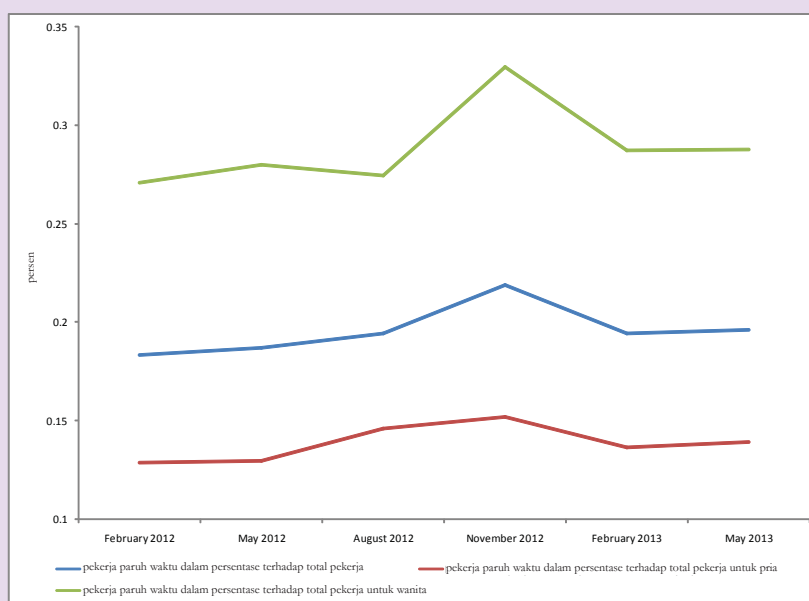
Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Pekerjaan paruh waktu terkait dengan daerah pertanian pedesaan

Pekerjaan paruh waktu di Indonesia telah meningkat dan berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Pekerjaan paruh waktu, yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang kurang dari 35 jam per minggu, diperkirakan mencapai 22,0 persen pada bulan Agustus 2013 (lihat di bawah). Tingkat kerja paruh waktu yang tertinggi adalah di antara perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah, dan yang tinggal di daerah pedesaan.⁸ Pekerja paruh waktu dapat ditemui di sektor pertanian, perdagangan, dan pelayanan masyarakat/pribadi. Karena pekerjaan paruh waktu biasanya ditemukan di daerah pedesaan di kalangan pekerja kurang terampil, ini dapat menunjukkan bahwa kerja paruh waktu terkait dengan terbatasnya akses ke peluang di pasar kerja.

⁸ Pada bulan Agustus 2012, 69,7 persen pekerja paruh waktu berada di daerah pedesaan; 53,2 persen pekerja paruh waktu adalah perempuan; 64,4 persen pekerja paruh waktu memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau yang lebih rendah.

Gambar 8:
Pekerja paruh waktu dalam persentase pekerja berdasarkan gender, 2012-2013



Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Pekerjaan rentan, ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan, memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan. Indonesia menetapkan pekerjaan rentan untuk menyertakan wiraswasta, perusahaan yang dibantu oleh pekerja sementara, buruh harian, dan pekerja keluarga tanpa upah.⁹ Pekerjaan rentan di Indonesia telah menurun seiring waktu, dengan jumlah pekerja kontrak meningkat. Pada bulan Mei 2013 dan Agustus 2013, sekitar 59,6 persen pekerja dianggap sebagai pekerja rentan (lihat tabel di bawah). Situasi di tahun 2013 menunjukkan peningkatan penuh dari estimasi pada bulan Februari 2011, saat pekerja rentan menyumbang sekitar 65,8 persen dari tenaga kerja. Usaha perlindungan diperlukan untuk memastikan bahwa kemerosotan saat ini pada indikator ekonomi tidak menahan kemajuan dalam mengurangi porsi pekerja dalam pekerjaan rentan.

⁹ Definisi Indonesia tentang pekerjaan rentan dan definisi ILO tentang pekerjaan rentan agak berbeda. ILO mendefinisikan pekerjaan rentan sebagai pekerja wiraswasta yang membantu pekerja keluarga, sedangkan definisi Indonesia juga mencakup buruh harian dan pengusaha yang dibantu oleh pekerja sementara/pekerja tanpa upah dalam definisi mereka tentang pekerjaan rentan. Hal ini dikarenakan oleh sifat pekerjaan harian di Indonesia, yang biasanya bersifat informal dan kurang memiliki kondisi pekerjaan yang layak, dan dicirikan oleh penghasilan yang tidak memadai, rendahnya tingkat produktivitas dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan hak-hak mendasar para pekerja.

Tabel 2:
Persentase pekerja pada pekerjaan rentan tahun 2012-2013

Total	Februari 2012	Maret 2012	Agustus 2012	November 2012	Februari 2013	Mei 2013
a) Pekerja	33,81	34,05	36,36	36,47	36,45	36,63
b) Pengusaha	48,91	49,24	47,49	47,72	47,33	47,62
i) Perusahaan	3,48	3,90	3,50	3,70	3,53	3,73
ii) Wiraswasta	35,38	34,81	33,57	33,41	33,78	33,53
iii) Buruh harian	10,04	10,53	10,42	10,61	10,02	10,36
c) Pekerja keluarga	17,29	16,71	16,15	15,81	16,22	15,75
Pekerja rentan (ii+iii+c)	62,71	62,05	60,14	59,83	60,02	59,64
Total	Februari 2012	Maret 2012	Agustus 2012	November 2012	Februari 2013	Mei 2013
a) Pekerja	35,65	35,80	38,18	37,91	38,26	38,26
b) Pengusaha	56,88	56,92	54,80	55,05	54,58	54,91
i) Perusahaan	4,52	5,03	4,58	4,77	4,61	4,83
ii) Wiraswasta	40,20	39,06	37,48	37,05	37,56	37,37
iii) Buruh harian	12,15	12,83	12,75	13,23	12,41	12,71
c) Pekerja keluarga	7,47	7,28	7,01	7,04	7,16	6,83
Pekerja rentan (ii+iii+c)	59,83	59,17	57,24	57,32	57,13	56,91
Total	Februari 2012	Maret 2012	Agustus 2012	November 2012	Februari 2013	Mei 2013
a) Pekerja	30,85	31,23	33,35	34,11	33,55	34,01
b) Pengusaha	36,12	36,81	35,37	35,66	35,73	35,88
i) Perusahaan	1,82	2,07	1,71	1,94	1,79	1,95
ii) Wiraswasta	27,65	27,93	27,12	27,41	27,74	27,35
iii) Buruh harian	6,65	6,81	6,55	6,31	6,20	6,58
c) Pekerja keluarga	33,03	31,96	31,28	30,23	30,72	30,11
Pekerja rentan (ii+iii+c)	67,33	66,70	64,95	63,95	64,66	64,04

Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

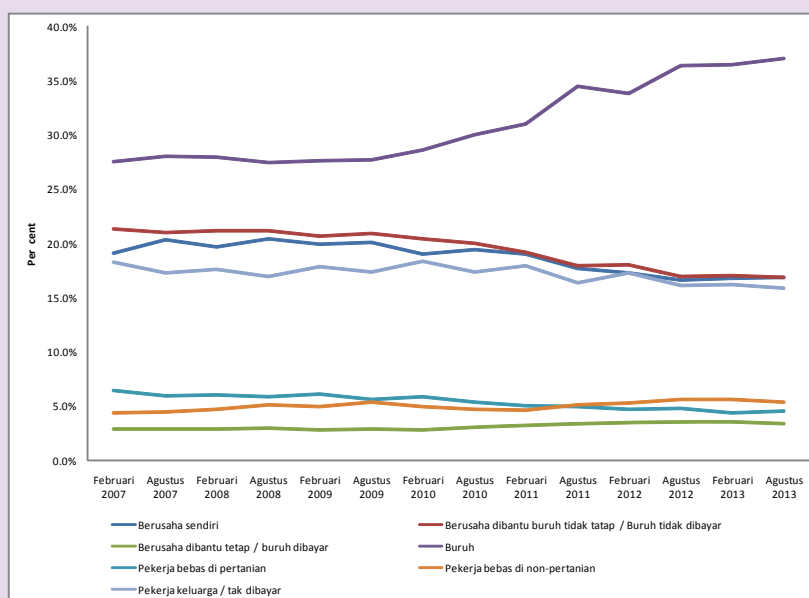
Pekerjaan rentan menurun untuk kedua gender, tetapi, masih terdapat perbedaan dalam hasil, dengan 57 persen pekerja laki-laki dan 65 persen perempuan dianggap rentan. Seperti yang disebutkan dalam laporan buruh dan tren sosial 2012, sifat dan komposisi pekerjaan rentan sangatlah berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung dianggap sebagai pekerja rentan karena status mereka sebagai wiraswasta atau buruh harian, sementara perempuan cenderung menjadi pekerja rentan karena mereka merupakan pekerja keluarga tanpa upah.

Pekerjaan rentan untuk laki-laki menurun, karena jumlah laki-laki yang merupakan pekerja mandiri berkurang dan jumlah laki-laki sebagai pekerja kontrak bertambah (lihat tabel di atas). Situasi untuk perempuan juga meningkat karena transisi perempuan dari pekerja keluarga menjadi pekerja. Namun, karena lebih sulit untuk transisi dari pekerja keluarga ke dunia kerja yang berada di luar unit keluarga, program-program yang mendukung perempuan untuk membangun keterampilan mereka dan mengakses pekerjaan formal diperlukan.

Perempuan dan laki-laki merasakan pekerjaan rentan berbeda...

Secara umum, pekerjaan berupah atau pekerja kontrak telah meningkat di Indonesia. Gambar di bawah ini menggambarkan bahwa pekerjaan berupah telah meningkat secara substansial dari 27,5 persen pada bulan Februari 2007 menjadi 37 persen pada bulan Agustus 2013 (lihat gambar di bawah).¹⁰ Pada catatan terkait, jumlah perusahaan yang mempekerjakan pekerja tetap juga telah meningkat dari 2,9 persen pada bulan Februari 2007 menjadi 3,4 persen pada bulan Agustus 2013. Tren peningkatan jumlah perusahaan formal dan pekerja resmi yang beroperasi di dalam perekonomian tampaknya terkait secara positif. Artinya, untuk setiap satu perusahaan ekonomi formal, ada sekitar 10 pekerjaan yang berkaitan dengan pekerja ekonomi formal.

Gambar 9:
Pekerja berdasarkan status pekerjaan, 2007-2013



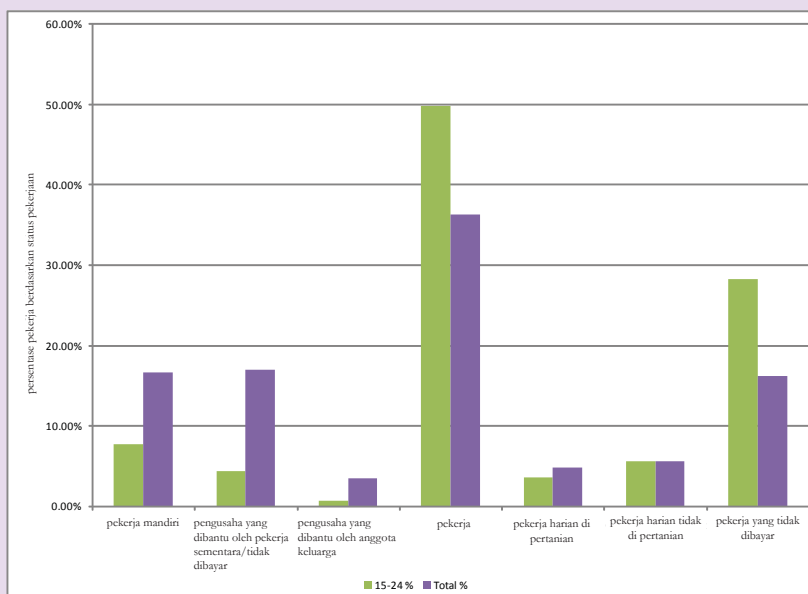
Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

10 Status pekerjaan 4 BPS mengacu pada “pekerja tetap” dan mendefinisikan bahwa seorang pekerja dianggap sebagai pekerja tetap bila ia bekerja untuk pengusaha yang sama selama 1 bulan terakhir. Oleh karena itu, definisi ini mencakup pekerja kontrak dan pekerja tetap.

Secara umum, perusahaan di sektor informal - pekerja mandiri dibantu oleh pekerja sementara atau anggota keluarga - tidak menciptakan banyak kesempatan kerja bagi pekerja seperti mitra ekonomi formal mereka. Artinya, untuk setiap satu pengusaha ekonomi informal yang bekerja dengan buruh, ada sekitar 1,5 pekerjaan yang berhubungan dengan buruh harian dan pekerja keluarga. Untuk mendukung perluasan lapangan kerja dan pekerjaan layak di Indonesia, sangatlah penting untuk terus memberikan reformasi yang mendukung formalisasi perusahaan selagi mendukung operasi perusahaan ekonomi formal yang berkelanjutan. Secara khusus, perusahaan kecil dan menengah harus didukung karena mereka bertanggung jawab atas banyaknya jumlah lapangan kerja di Indonesia.

Analisis tentang status pekerjaan berdasarkan usia menunjukkan bahwa pekerja kaum muda (15-24 tahun) lebih cenderung menjadi pekerja kontrak daripada pekerja rata-rata dan mereka juga lebih mungkin untuk menjadi pekerja tidak dibayar daripada pekerja rata-rata (lihat gambar di bawah). Sebagian besar pekerja kaum muda yang merupakan pekerja keluarga tanpa upah tinggal di daerah pedesaan dan merupakan laki-laki yang bekerja di sektor pertanian. Hanya sejumlah kaum muda (sekitar 5 persen) yang merupakan pekerja tanpa upah di daerah perkotaan. Sebagian besar kaum muda yang merupakan pekerja tinggal di daerah perkotaan dan cenderung bekerja di sektor manufaktur atau jasa. Kaum muda juga tampaknya tidak mungkin menjadi pengusaha (pekerja mandiri atau wiraswasta) dibandingkan dengan pekerja rata-rata. Rata-rata sekitar 37 persen dari yang bekerja adalah perusahaan atau wiraswasta, sementara hanya 13 persen kaum muda yang bekerja adalah wiraswasta. Sebagian besar wiraswasta berusia antara 30 hingga 45 tahun.

Gambar 10: Pekerja usia 15-24 tahun dan jumlah pekerja berdasarkan status pekerjaan, Agustus 2012

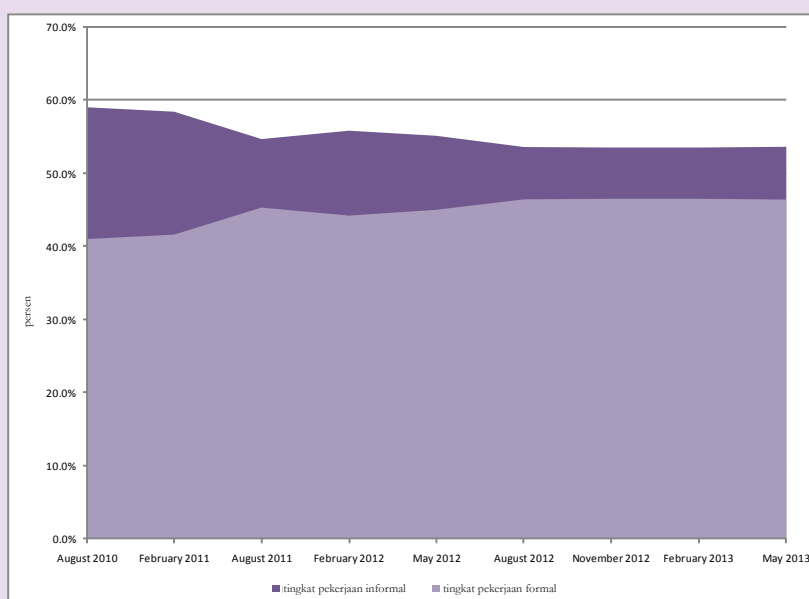


Sumber: BPS (2012) Keadaan Pekerja di Indonesia: August 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Pangsa lapangan kerja dalam perekonomian formal dan informal telah bergeser dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Agustus 2010 diperkirakan bahwa sekitar 59,0 persen dari orang yang dipekerjakan bekerja di sektor ekonomi informal. Pada bulan Mei 2013 diperkirakan bahwa 53,6 persen dari pekerjaan berada di sektor ekonomi informal dan 46,4 persen dari pekerjaan berada di sektor ekonomi formal (lihat gambar di bawah). Pola pertumbuhan ekonomi sejak 2010 mungkin memainkan peran penting dalam pergeseran menuju pekerjaan di sektor formal, dan hal ini akan menjadi penting bagi fluktuasi dalam iklim ekonomi makro tidak membalikkan keuntungan yang dibuat dalam formalisasi.

Pekerjaan di sektor ekonomi informal terus menurun

Gambar 11:
Pekerjaan formal dan informal antara tahun 2010 dan 2013, persen



Sumber: BPS (2013) Indikator pasar kerja Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Tren menunjukkan bahwa akses laki-laki dan perempuan ke pekerjaan formal telah meningkat dari waktu ke waktu, tapi hasil pada formalitas tersebut dialami secara berbeda di seluruh gender. Pada bulan Mei 2013 ada 53,2 juta pekerja bekerja di sektor formal, dan 35 persennya adalah perempuan, 65 persennya adalah laki-laki. Begitu pula terdapat 61,4 juta pekerja yang bekerja di sektor ekonomi informal dengan 41 persennya adalah perempuan dan 59 persennya adalah laki-laki (lihat gambar di bawah). Terdapat upaya yang telah mendukung perempuan dalam mengakses kesempatan kerja di sektor ekonomi formal, seperti kuota gender dalam parlemen dan jam kerja yang fleksibel, namun upaya lebih lanjut diperlukan untuk menjembatani kesenjangan gender dan menjamin hasil yang merata baik bagi laki-laki dan perempuan.

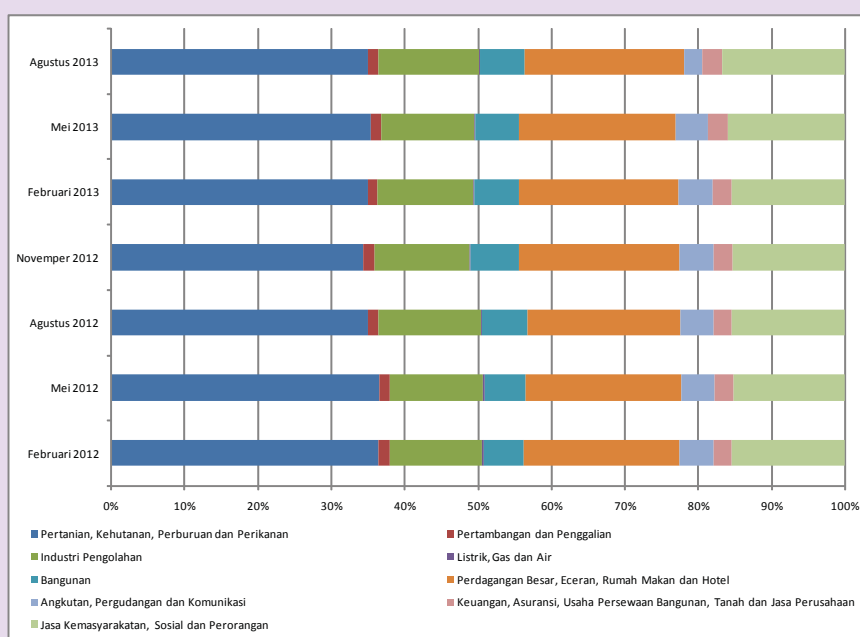
Gambar 12:
Formalitas atau pekerja berdasarkan gender, Mei 2013



Sumber: BPS (2013) Indikator pasar kerja Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Sektor pertanian masih merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, terhitung 35 persen dari lapangan kerja di bulan Mei dan Agustus 2013. Situasi kerja di sektor pertanian secara relatif tetap stabil pada tahun 2013, dan tidak meningkat seperti masa sebelumnya saat krisis ekonomi. Secara umum, pergeseran struktural pada komposisi pekerjaan dalam perekonomian terus terungkap secara bertahap. Akan tetapi, pekerjaan manufaktur telah menurun dari nilai tinggi di bulan Agustus 2012 yaitu 15,37 juta orang menjadi 14,88 juta orang pada bulan Agustus 2013. Sektor konstruksi juga mengalami penurunan. Data berikutnya pada tren diperlukan untuk lebih memahami penyebab terjadinya penurunan tersebut.

Gambar 13:
Pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi, 2012-2013 (persen)



Sumber: BPS (2013) Indikator pasar kerja Indonesia: Agustus 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

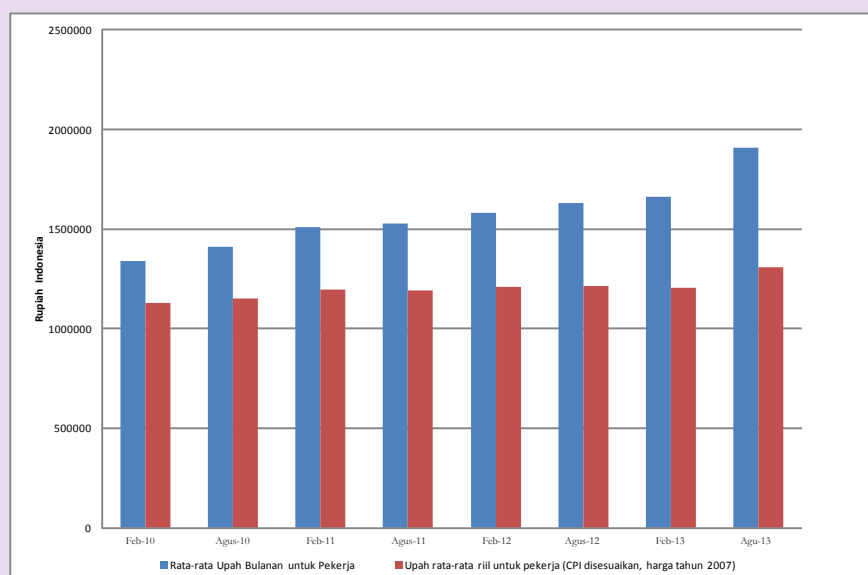
Pada laporan tren ketenagakerjaan dan sosial untuk tahun 2012, dilaporkan bahwa pekerjaan di sektor manufaktur telah berkembang pesat, dan berada pada puncaknya dari porsi sektoral dan angka mutlak dalam lebih dari satu dekade pada bulan Agustus 2012. Hasil dari bulan Februari, Mei dan Agustus 2013 menunjukkan bahwa pekerjaan tertinggi dari bulan Agustus 2012 belum dipertahankan, dan perbandingan data bulan Agustus 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa pekerjaan di bidang manufaktur telah menurun hampir setengah juta pekerjaan. Pada bulan Agustus 2012, pekerjaan di bidang manufaktur sangat tinggi bagi perempuan, yang sebagian besar bekerja di bidang manufaktur padat karya (tekstil, kulit, garmen, dan alas kaki), dan hilangnya pekerjaan di sektor ini pada tahun 2013 cenderung meningkatkan kerentanan perempuan. Kemungkinan pertumbuhan pekerjaan di sektor manufaktur yang lamban telah dipengaruhi oleh memburuknya indikator makro ekonomi pada tahun 2013 dan kenaikan upah minimum baru-baru ini di provinsi dengan pusat manufaktur padat karya. Tren ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap stabilitas harga untuk melakukan bisnis di Indonesia.

1.3 Tren upah

Upah rata-rata meningkat tetapi upah riil tertinggal

Upah nominal rata-rata pekerja di Indonesia naik dari Rp. 1.630.193 pada bulan Agustus 2012 menjadi Rp. 1.909.478 pada bulan Agustus 2013. Ini adalah kenaikan upah nominal rata-rata yang substansial dalam upah nominal rata-rata, dan peralihan dari peningkatan yang moderat dalam upah rata-rata selama tiga tahun terakhir (lihat gambar di bawah). Upah riil rata-rata pekerja, yang dihitung sesuai inflasi, hanya mengalami kenaikan tipis atau tetap sama selama beberapa tahun belakangan ini. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan upah nominal, pertumbuhan upah riil rata-rata berjalan lambat.

Gambar 14: Pertumbuhan upah nominal dan upah rata-rata riil untuk pekerja, 2010-2013¹¹



Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Agustus 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

*Upah riil adalah kalkulasi ILO berdasarkan data BPS.

Pertumbuhan upah rata-rata riil di Indonesia lebih rendah daripada di negara-negara Asia lainnya

Tren upah, seperti yang disebutkan di atas, dapat dianalisis secara nominal dan riil. Secara umum, di negara maju pertumbuhan upah riil telah berfluktuasi dalam kisaran yang sempit plus/minus satu persen, sementara di Asia, pertumbuhan upah riil tahunan biasanya lebih dari 5 persen (digerakkan sebagian besar oleh China).¹² Di Indonesia, pertumbuhan upah rata-rata riil lebih rendah daripada di negara-negara berkembang yang lain, dimana upah nominal tumbuh rata-rata 8 persen sedangkan upah riil tumbuh rata-rata 2,5 persen per tahun sejak tahun 2010. Kecenderungan ini berbeda dengan pertumbuhan upah minimum baru-baru ini.

11 Upah riil dihitung dengan menggunakan metode yang disarankan dari ILO (2012) Indikator pekerjaan yang layak: konsep dan definisi: Panduan ILO (edisi pertama), Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa. Rumusnya adalah "pendapatan riil rata-rata = pendapatan nominal rata-rata / CPI * 100".

12 ILO (2013) Laporan Upah Global 2012/13: Upah dan Kesenjangan pertumbuhan, Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa.

Upah nominal rata-rata tertinggi bagi pekerja terdapat di sektor pertambangan dan penggalian, diikuti oleh sektor keuangan dan perbankan. Upah terendah terdapat di sektor pertanian. Antara bulan Mei 2012 dan Mei 2013 kenaikan upah lebih tinggi di sektor keuangan dan perbankan, dan lebih rendah di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor dengan rata-rata upah nominal yang lebih tinggi juga memiliki kenaikan upah tahunan yang lebih tinggi, sedangkan sektor dengan upah yang lebih rendah juga memiliki kenaikan upah tahunan yang lebih rendah.

Upah nominal rata-rata di sektor manufaktur diperkirakan mencapai Rp 1.716.855 pada bulan Agustus 2013 untuk pekerja, meningkat 23,5 persen dari periode yang sama tahun lalu. Pekerja laki-laki dan perempuan menerima upah rata-rata masing-masing sebesar Rp 1.899.128 dan Rp 1.399.547, dimana upah perempuan diperkirakan 73,7 persen lebih rendah dari upah laki-laki, yang menunjukkan bahwa kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan masih tetap ada. Di samping itu, upah antar gender lebih besar di sektor manufaktur daripada upah antar gender secara umum di negeri ini, dimana upah rata-rata perempuan 78,4 persen lebih rendah dari upah laki-laki, sedangkan di sektor manufaktur kesenjangan ini lebih besar. Alasan di balik kesenjangan upah antar gender ini mungkin dikarenakan adanya perbedaan waktu kerja, tingkat pendidikan, pekerjaan atau diskriminasi. Sebagai contoh, pekerja laki-laki dan perempuan di sektor manufaktur bekerja rata-rata 37 jam dan 41 jam per minggu di bulan Agustus 2013. Meskipun demikian, penelitian tentang diskriminasi antar pekerja di sektor manufaktur menunjukkan bahwa sekitar 31 persen kesenjangan upah tidak memiliki penjelasan dan oleh karena itu, dapat diakibatkan oleh diskriminasi.¹³

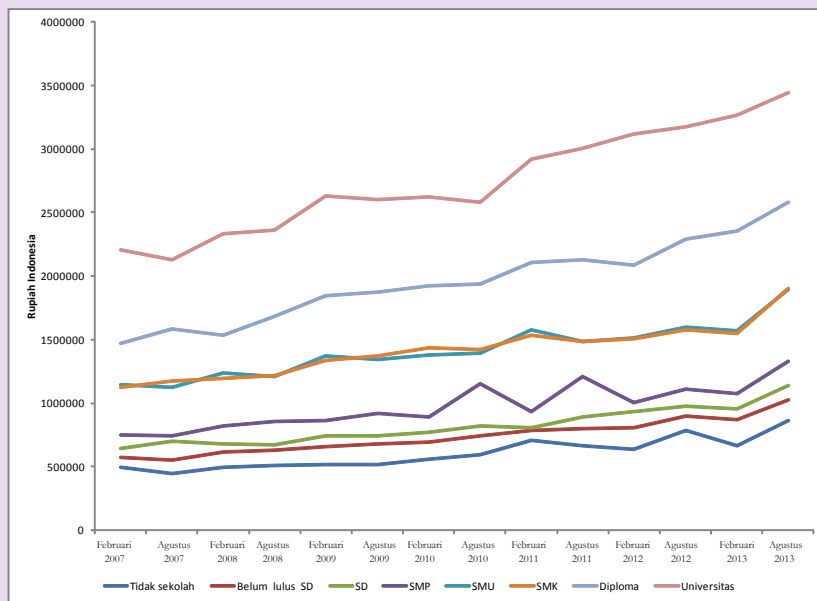
Perbedaan gender dan daerah dalam pemberian upah tetap ada

Kenaikan upah minimum provinsi baru-baru ini yang tinggi di Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau, telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan upah rata-rata di provinsi-provinsi ini pada tahun 2013. Demikian pula, provinsi dengan tingkat pertumbuhan upah minimum yang lebih rendah juga memiliki tingkat pertumbuhan upah rata-rata yang lebih rendah. Untuk merespon tren pertumbuhan upah, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa investor lebih suka membuka kantor di daerah-daerah yang memiliki tingkat upah lebih rendah. Sebagai contoh, informasi dari Better Work Indonesia menunjukkan bahwa pabrik garmen dengan pengoperasian utama mereka di Jabodetabek kini membuka beberapa pabrik di Semarang, sehingga jumlah pabrik garmen di Semarang meningkat dari 40 pabrik tahun 2012 menjadi 60 pabrik tahun 2013.

Pekerja dengan gelar sarjana diperkirakan memiliki upah rata-rata tertinggi, sebesar Rp 3.443.451 pada bulan Agustus 2013, dengan peningkatan sebesar 8,5 persen secara nominal sejak Agustus 2012. Pekerja dengan ijazah juga mengalami pertumbuhan upah nominal dari tahun 2012 hingga 2013, dan terus mendapatkan lebih dari upah rata-rata nasional.

13 ILO (2013) Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia tahun 2012: Bekerja untuk ekonomi yang berkelanjutan dan merata, Kantor Perwakilan ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta.

Gambar 15:
Upah nominal rata-rata berdasarkan tingkat pendidikan pekerja, 2008-2013



Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Agustus 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

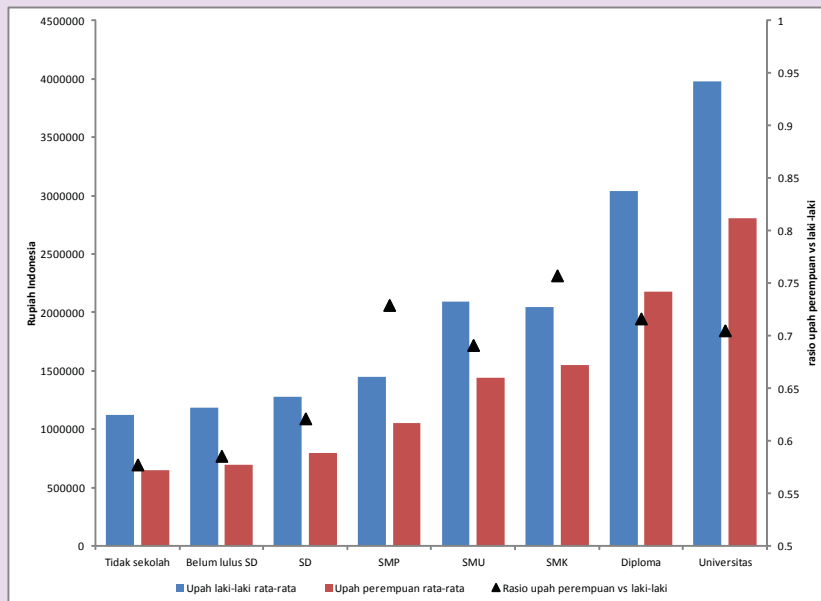
Pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki upah lebih tinggi dan tingkat pertumbuhan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan rendah

Akan tetapi, pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah menghadapi situasi yang lebih sulit, dengan upah bagi yang tidak sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah atas tumbuh pada tingkat lebih lambat dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini memprihatinkan karena menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan upah adalah di antara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang berarti pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (dan berpendapatan/berpenghasilan rendah) menghadapi masalah secara tak berimbang yang terkait dengan pertumbuhan upah stagnan. Yang dikhawatirkan adalah pekerja dengan pendidikan SMP atau lebih rendah, karena upah nominal rata-rata mereka kurang dari upah minimum nasional rata-rata.

Perbedaan antara upah nominal rata-rata untuk laki-laki dan perempuan tetap ada di semua tingkat pendidikan, dengan kesenjangan upah gender yang sangat tinggi di antara pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah serta dengan yang memiliki pendidikan tinggi (tercermin dalam rasio upah perempuan dan laki-laki yang rendah). Seperti disebutkan sebelumnya, meskipun beberapa kesenjangan ini dapat dijelaskan, tetap ada hal yang tidak dapat dijelaskan dan menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan diskriminasi gender di Indonesia. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesetaraan gaji antara laki-laki dan perempuan, dengan khususnya berfokus pada pekerja kurang terampil dan sangat terampil, pekerja lulusan perguruan tinggi. Agaknya strategi diperlukan untuk mendukung perempuan memasuki wilayah pendidikan tinggi non-tradisional, seperti kedokteran, hukum dan teknik, dengan upah dapat lebih tinggi.

Lebih jauh lagi, dengan menggabungkan analisis tren dalam tingkat pendidikan dan upah berdasarkan gender, tampaknya pekerja perempuan dengan pendidikan rendah cenderung berada di antara salah satu kelompok yang menghadapi tekanan paling besar pada daya beli mereka karena pertumbuhan upah yang lemah, yang tidak memberikan kompensasi yang cukup untuk kenaikan indeks harga konsumen.

Gambar 16: Upah nominal rata-rata berdasarkan tingkat pendidikan dan gender, Februari 2013



Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Agustus 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Upah sangat penting karena merupakan sumber utama pendapatan bagi banyak keluarga. Di Indonesia, tawar-menawar upah biasanya didorong oleh mekanisme penetapan upah minimum, dan bukan struktur upah sektoral dan pekerjaan.

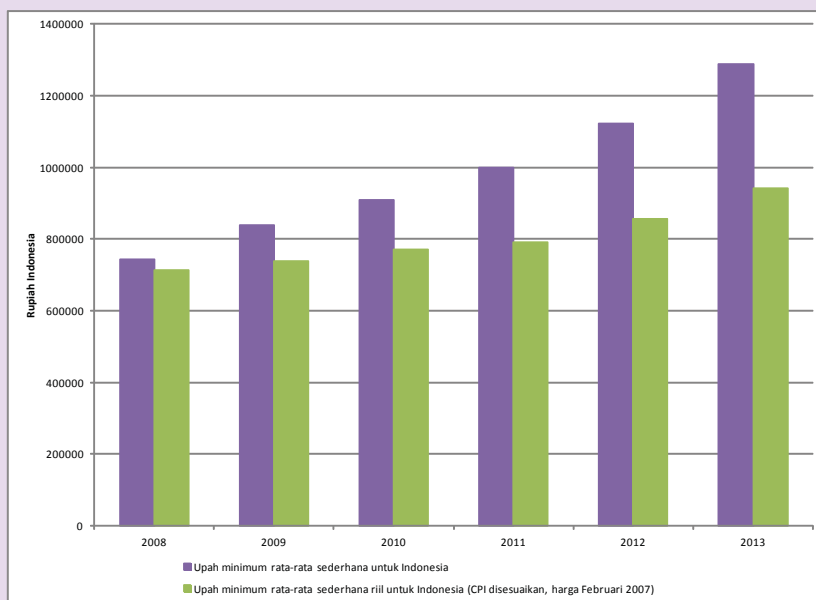
Terjadi peningkatan yang signifikan dalam upah minimum di akhir tahun 2012 di beberapa provinsi terpilih di seluruh Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap stabilitas harga tetap untuk melakukan bisnis di Indonesia dan menyebabkan beberapa investor mempertimbangkan relokasi perusahaan dan pilihan melepaskan pekerjaan. Pengusaha telah menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum lebih besar dari peningkatan produktivitas, dan ini dapat berakibat pada penurunan daya saing dan berdampak pada kelangsungan bisnis. Menanggapi hal ini, pekerja mengangkat isu perlunya upah minimum untuk memastikan kebutuhan minimum hidup layak.

Upah minimum nominal rata-rata sederhana untuk Indonesia diperkirakan sebesar Rp 1.288.242 pada tahun 2013, meningkat 14,87 persen dari tahun 2012. Namun, tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2013 telah dikaitkan dengan kerugian nyata untuk pertumbuhan upah

Inflasi tinggi pada tahun 2013 dihubungkan dengan kerugian riil atas pertumbuhan upah minimum

minimum. Analisis tingkat pertumbuhan upah minimum menunjukkan bahwa meskipun upah minimum telah meningkat secara substansial secara nominal, inflasi telah mengikis sebagian keuntungan tersebut.

Gambar 17:
Upah minimum dalam hal nominal dan riil, 2008-2013¹⁴



Sumber: BPS (2013) Tren indikator sosioekonomi pilihan di Indonesia, Badan Pusat Statistik, Jakarta. *Upah riil adalah kalkulasi ILO berdasarkan data BPS.

Untuk menetapkan upah minimum provinsi, masing-masing Dewan Pengupahan Provinsi, yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta penasihat dari akademisi, melakukan survei untuk menentukan upah yang diperlukan untuk mendapatkan “standar minimum hidup layak” atau “kebutuhan hidup layak” (KHL).¹⁵ Gubernur masing-masing provinsi menetapkan upah minimum provinsi, setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat Provinsi. Idealnya, upah minimum harus setara dengan KHL. Terlepas dari hal ini, kesenjangan antara KHL dan upah minimum dari waktu ke waktu telah muncul (lihat gambar di bawah). Namun, tampaknya ada beberapa kemajuan dengan menyempitnya kesenjangan antara KHL rata-rata dan upah minimum rata-rata menjadi 89 persen pada tahun 2013. Perbedaan terbesar antara penilaian KHL dan upah minimum ditemukan di Sumatera Selatan, Bali, dan Kepulauan Maluku pada tahun 2013.

14 Upah riil dihitung dengan menggunakan metode yang disarankan dari ILO (2012) Indikator pekerjaan yang layak: konsep dan definisi: Panduan ILO (Edisi pertama), Kantor Buruh Internasional, Jenewa. Rumusnya adalah “pendapatan riil rata-rata = pendapatan nominal rata-rata / CPI * 100.

15 Standar minimum hidup layak dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai “KHL” (Kebutuhan Hidup layak).

Gambar 18:
Tren upah minimum dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)), 2008-2012¹⁶



Sumber: BPS (2013) Tren indikator sosioekonomi pilihan di Indonesia, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

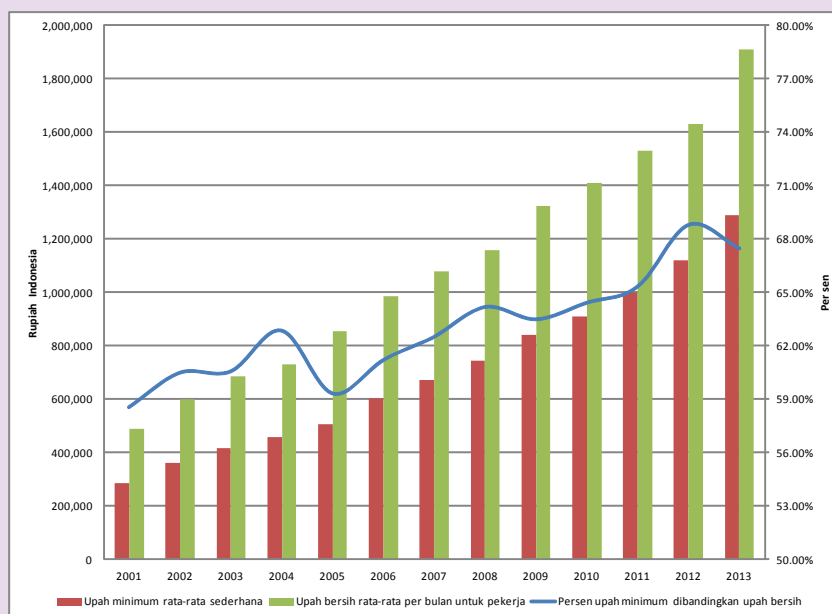
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2013 tentang pengaturan upah minimum pada tahun 2013. Instruksi ini menyorot tentang pentingnya penilaian terhadap KHL dalam menetapkan upah minimum, dan bila instruksi ini diberlakukan secara efektif, maka kesenjangan antara penilaian KHL dengan upah minimum dapat dilaksanakan secara cepat dari waktu ke waktu.

Meskipun upah minimum meningkat, pertumbuhan upah rata-rata lebih lambat dan kesenjangan antara rata-rata upah minimum dan rata-rata upah nominal menyempit dari waktu ke waktu. Untuk menggambarkan lebih lanjut, pada tahun 2001 upah minimum adalah 58,5 persen dari upah rata-rata. Pada tahun 2013, rasio ini meningkat menjadi 67,5 persen. Tren ini menunjukkan fokus pada perundingan upah minimum dan bahwa upah minimum dapat lebih bersifat mengikat selama beberapa tahun terakhir ini, dimana penyesuaiannya punya dampak yang lebih besar terhadap biaya upah dan pasar kerja. Tren ini juga menyorot perlunya upaya untuk memperkuat perundingan upah sektoral dan struktur pekerjaan untuk mempromosikan pertumbuhan upah rata-rata.

Terdapat kenaikan upah moderat, tetapi sebagian besar kenaikan sekitar upah minimum

¹⁶ Gambar ini menggunakan KHL rata-raa yang sederhana dan upah minimum rata-rata yang sederhana untuk Indonesia agar dapat memperlihatkan tren nasional, namun, perlu dicatat bahwa penilaian tentang KHL dan upah minimum hanya dilakukan di tingkat provinsi atau kabupaten.

Gambar 19:
Tren upah minimum dan rata-rata untuk Indonesia, 2001-2013

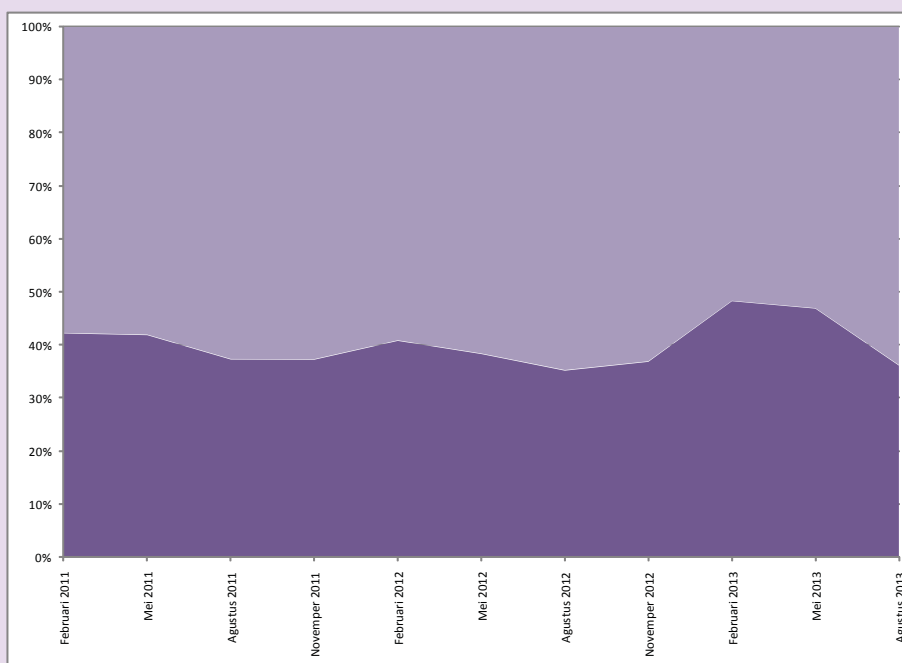


Sumber: BPS (2013) Situasi buruh di Indonesia: Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

* Kalkulasi ILO menggunakan upah rata-rata berdasarkan Sakernas bulan Agustus 2013.

Upah minimum adalah upah terendah yang diperbolehkan undang-undang. Namun, karena sifat dari pasar kerja di Indonesia, dengan tingkat pekerjaan rentan dan informalitas yang tinggi serta kapasitas yang terbatas untuk pengawasan tenaga kerja, tidak semua pekerja menerima upah minimum. Pada Agustus 2013, prosentase pekerja yang memperoleh upah di bawah upah minimum provinsi diperkirakan mencapai 36,2 persen. Tren jumlah pekerja yang menerima upah di atas atau di bawah upah minimum menunjukkan pola perputaran sepanjang tahun. Lebih banyak pekerja yang menerima upah di atas upah minimum di bulan Agustus daripada di bulan Februari, dan ini mungkin mencerminkan pelaksanaan upah minimum sepanjang tahun. Bab berikutnya membahas isu pembangunan yang merata dan akses ke perlindungan secara lebih terperinci.

Gambar 20:
Persentase pekerja di atas dan di bawah upah minimum provinsi, 2011-2013



Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia : Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Memperkuat peran pekerjaan layak dalam kesetaraan pertumbuhan

Pekerjaan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di masyarakat. Pentingnya pekerjaan diakui dalam kerangka Tujuan Pembangunan Milenium di tingkat global dan tercermin dalam strategi pembangunan pemerintah di seluruh dunia. Selain memberikan pendapatan, pekerjaan membuka jalan bagi kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, memperkuat individu, keluarga, dan komunitas mereka. Meskipun demikian, kemajuan tersebut bergantung pada kepatutan kerja.

Promosi agenda pekerjaan yang layak di tingkat global diwujudkan di negara melalui “Decent Work Country Programmes” (DWCP) nasional. DWCP merupakan dokumen milik konstituen ILO yang mengidentifikasi area prioritas utama untuk mendukung kemajuan pekerjaan yang layak bagi semua. DWCP di Indonesia tahun 2012-15 memprioritaskan pekerjaan yang layak di tiga wilayah, yaitu, penciptaan lapangan kerja, hubungan industri, dan perlindungan sosial. Laporan tren perburuhan dan sosial tahun ini menggunakan program negara pekerjaan yang layak di Indonesia sebagai kerangka kerja untuk membahas tren. Selain itu, diskusi tentang tren berfokus pada delapan bidang yang sangat penting untuk mempromosikan agenda pekerjaan layak yang telah diidentifikasi oleh ILO di tingkat global, yang meliputi:

- Mempromosikan pekerjaan lebih banyak dan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif;
- Pekerjaan dan keterampilan untuk kaum muda;
- Pekerjaan layak dalam perekonomian desa;
- Produktivitas dan kondisi kerja di UKM;
- Penguatan kepatuhan tempat kerja melalui pengawasan buruh;
- Perlindungan pekerja dari bentuk-bentuk kerja yang tidak dapat diterima;
- Membuat dan memperluas landasan perlindungan sosial;
- Formalisasi ekonomi informal.

Produktivitas merupakan tantangan utama, begitu pula kerentanan pekerja

*Mendorong
kesetaraan
pertumbuhan
melalui pekerjaan
layak dapat
memberikan solusi*

Tema berulang di seluruh bagian satu bab ini tentang penciptaan lapangan kerja berkaitan dengan masalah produktivitas. Kebijakan perdagangan dan investasi infrastruktur telah meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan pekerjaan. Akan tetapi, di tingkat mikro, keuntungan dalam produktivitas buruh telah dialami oleh perusahaan yang berbeda ukuran secara tidak merata dan terdapat indikasi peningkatan ketidakcocokan keterampilan. Institusi pasar kerja, program pasar kerja yang sangat aktif, kebijakan keterampilan, dan sistem informasi pasar kerja, oleh karena itu memainkan peran penting dalam memperkuat akses ke pekerjaan layak untuk kesetaraan pertumbuhan.

Bagian dua dari bab ini tentang hubungan industrial mengambil pentingnya lembaga pasar kerja, dengan fokus khusus diberikan ke peran pengawasan buruh untuk meningkatkan kondisi kerja pekerja yang rentan. Bagian ketiga dari bab ini tentang perlindungan sosial menyoroti isu perlindungan pekerja dan membahas pekerja rumah tangga sebagai salah satu kasusnya. Baik bagian dua dan tiga menunjukkan masalah tentang pekerja rentan yang dapat mengakses perlindungan yang merupakan hak mereka. Situasi ini menegaskan kebutuhan untuk mendorong kesetaraan pertumbuhan melalui pekerjaan layak.

DWCP 2012-15 Tujuan 1: Penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

Tujuan pertama dari DWCP berfokus pada penciptaan lapangan kerja untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Lima prioritas kerja diidentifikasi di bawah tujuan ini, yaitu:

1. Pengarusutamaan pekerjaan di ekonomi makro, buruh, dan kebijakan sosial melalui analisis dan sarana pasar kerja yang baik.
2. Peningkatan kebijakan dan program untuk melengkapi kaum muda laki-laki dan perempuan dengan lebih baik saat memasuki dunia kerja.
3. Pengoptimalan hasil kerja investasi publik dan masyarakat.
4. Perbaikan kebijakan dan program tentang pengembangan kewirausahaan, bisnis, dan koperasi untuk penciptaan lapangan kerja termasuk keterlibatan finansial.
5. Keterampilan pekerja ditingkatkan melalui pelatihan berbasis permintaan dan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan lebih baik.

2.1 Mempromosikan pekerjaan lebih banyak dan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif: Perdagangan dan ketenagakerjaan

Dengan perkembangan liberalisasi ekonomi global yang stabil dan keterbukaan ekonomi yang lebih luas telah meningkatkan pertukaran barang dan jasa antar negara. Paparan ke perdagangan internasional telah mengakibatkan berlakunya perubahan struktural pada ekonomi dan pasar kerja, dan menyebabkan anggota masyarakat sipil menuntut transisi untuk menjadi lebih adil dan merata dalam memberikan hasil mereka.

Deklarasi ILO pada Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Merata yang ditetapkan pada bulan Juni 2008 untuk menanggapi kekhawatiran dunia dan mengakui bahwa kebijakan perdagangan dan keuangan berdampak pada lapangan kerja. Deklarasi ini menyoroti kebutuhan untuk menilai efek perdagangan bebas di pasar kerja di negara maju dan berkembang karena banyaknya jumlah pekerja yang harus mengubah pekerjaan dikarenakan penyesuaian struktural. Ini menegaskan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang dampak perdagangan dapat mempengaruhi kebijakan pasar kerja sehingga dapat mengurangi dampak negatif, dan mengoptimalkan dampak positif, dari perdagangan bebas.

Indonesia telah mereformasi kebijakan perdagangan dan secara bertahap melakukan liberalisasi ekonomi sejak akhir tahun 1960-an. Liberalisasi telah berkembang sejak pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas (FTA)¹⁷ di awal tahun 1992. Dengan FTA ASEAN (AFTA), Indonesia telah meliberalisasikan sebagian besar perdagangannya dengan negara-negara lain di Asia Tenggara melalui skema “Common Effective Preferential Tariff for AFTA”. Bersama negara-negara ASEAN yang lain, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara-negara non-ASEAN. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN – Australia-New Zealand Free Trade Agreement (ANZFTA) dan ASEAN – India Free Trade Agreement merupakan perjanjian terpenting dari perjanjian perdagangan bebas ini. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara negara peserta melalui penghapusan tarif.

Dampak perdagangan terhadap lapangan kerja di Indonesia masih dipahami. Namun, ada kesepakatan umum di antara sebagian besar studi tentang dampak positif terhadap pekerjaan, upah, dan pendapatan rumah tangga dalam jangka panjang. Misalnya, penelitian menemukan bahwa

Liberalisasi ekonomi memberlakukan perubahan struktural pada pasar kerja

Banyak penelitian menemukan bahwa liberalisasi perdagangan merupakan hal positif bagi perekonomian dan untuk pekerjaan

17 Perjanjian Perdagangan Bebas adalah perjanjian bilateral atau regional di mana beberapa negara bekerja sama untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan tarif untuk perdagangan barang dan jasa. Liberalisasi perdagangan bertujuan untuk memastikan bahwa negara yang terlibat akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan kegiatan perdagangan.

kebijakan liberalisasi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, telah membawa sejumlah efek positif pada pasar kerja, seperti peningkatan formalitas, industrialisasi, dan pertumbuhan upah riil bagi pekerja.¹⁸ Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kampanye anti-upah rendah pada 1990-an yang dikaitkan dengan kenaikan upah yang cukup besar tidak merusak pertumbuhan lapangan kerja dalam pekerjaan semi-terampil di sektor ekspor.

Untuk dapat lebih memahami dampak perdagangan terhadap pekerjaan, ILO telah merancang metodologi yang menggabungkan penggunaan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dengan “Model SMART” (model simulasi perdagangan ekuilibrium parsial).¹⁹ Simulasi menggunakan model SMART untuk mengurangi tarif menjadi nol untuk impor dan ekspor dan menyuntikkan hasil ini ke dalam SNSE untuk menentukan dampak perubahantarif terhadap pekerjaan. Tabel di bawah ini merangkum hasil utama dari simulasi SNSE/SMART terhadap ACFTA, ANZFTA dan ASEAN-India FTA yang difokuskan pada dampak penghapusan tariff bilateral terhadap pekerjaan.

Tabel 3:
Dampak ketenagakerjaan akibat penghapusan tarif impor bilateral tahun 2009

Negara	Keterangan hasil simulasi
Australia	- Liberalisasi perdagangan dalam bentuk penghapusan tarif impor bilateral dengan Australia kemungkinan akan mengakibatkan defisit perdagangan bagi Indonesia sebesar USD 56,8 juta pada tahun 2009. - Terdapat peningkatan ekspor Indonesia di sektor berikut: pertambangan dan penggalian dengan surplus sebesar USD 4,9 juta; industri pemintalan, tekstil, pakaian, dan kulit dengan surplus sebesar USD 29,3 juta; kayu industri & barang dari kayu dengan surplus USD 26,4 juta serta industri pupuk kimia, hasil dari tanah liat, semen mencatat surplus sebesar USD 5,4 juta. - Perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia cenderung memiliki sedikit dampak negatif pada pekerjaan dalam jangka pendek bagi Indonesia, memperkirakan kerugian sekitar 33.242 pekerjaan purna waktu yang setara. - Sektor yang dapat mengambil keuntungan dari liberalisasi perdagangan antara Australia dan Indonesia dalam hal kesempatan kerja, adalah manufaktur dan produksi kayu, industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor yang dirugikan dalam hal kesempatan kerja meliputi sektor tanaman pangan dan sektor perkebunan.

18 Lihat ILO (2012) Perdagangan dan Pekerjaan: Dari Mitos hingga Fakta, Kantor Buruh Internasional, Jenewa.

19 Matriks akuntansi sosial menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia dan interkoneksinya.

Negara	Keterangan hasil simulasi
India	• Perdagangan bebas antara Indonesia dan India kemungkinan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke India sebesar USD 1,45 miliar pada tahun 2009, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya harga berbagai komoditas di Indonesia. Peningkatan utama terlihat pada makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh pertambangan batubara, logam dan minyak, dan tanaman lainnya. • Liberalisasi perdagangan mengakibatkan nilai keluaran tambahan untuk ekspor dan impor antara Indonesia dan India, terutama dalam pembuatan makanan, minuman, dan tembakau. • Akibat efek positif dari peningkatan ekspor dapat dilihat pada pasar kerja, dengan keuntungan keseluruhan 965.950 pekerjaan. Impor diperkirakan menyebabkan hilangnya 44.660 pekerjaan, namun, keuntungan bersih secara keseluruhan masih positif. • Perdagangan bebas antara India dan Indonesia cenderung memiliki efek positif pada penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian.
China	• Dampak kinerja ekspor Indonesia dalam konteks perdagangan bebas mencatat nilai ekspor sebesar USD 580 juta. • Liberalisasi perdagangan dalam bentuk penghapusan tarif impor bilateral dengan China cenderung menguntungkan bagi sektor primer, tetapi secara keseluruhan menjadi defisit karena dampak pada sektor sekunder dan tersier. • Perdagangan bebas menyebabkan peningkatan ekspor Indonesia ke China sehingga mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja dengan 235.429 pekerjaan. Akan tetapi, impor diperkirakan menyebabkan hilangnya 442.064 pekerjaan. • Perdagangan bebas antara Indonesia dan Cina menyebabkan peningkatan kesempatan kerja bagi tiga sektor, yaitu: tanaman lain, sektor industri kayu dan barang dari kayu dan batu bara, sektor pertambangan, logam, dan minyak. Pada saat yang sama, penurunan dalam lapangan pekerjaan mungkin akan terlihat di sektor pertanian, perdagangan, industri, pemintalan, tekstil, pakaian, dan kulit. Perdagangan dengan China secara keseluruhan berdampak negatif bagi lapangan pekerjaan, dengan kerugian sekitar 188.635 pekerjaan pada tahun 2009.

Sumber: ILO (2013) Analisis simulasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan model SMART, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta.

Liberalisasi perdagangan dialami secara berbeda oleh pekerja yang berbeda dan strategi sektoral diperlukan untuk mengurangi hasil

Secara agregat, liberalisasi perdagangan dianggap mampu memperkuat kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah lapangan kerja di sektor perekonomian formal di Indonesia. Namun, manfaat yang diberikan mungkin belum terwujud secara merata di seluruh sektor, profesi, dan wilayah, dengan faktor berbeda menghadapi dampak buruk dari liberalisasi perdagangan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui siapa pihak yang kalah dan menang dari perubahan perdagangan, karena transisi antara sektor menang dan kalah tidak berlangsung secara otomatis, bahkan dari sudut pandang ketenagakerjaan. Sebagai contoh, pekerja perempuan kota yang kehilangan pekerjaan di sektor tekstil tidak mungkin menjadi seorang petani kelapa sawit di desa. Mobilitas buruh bergantung pada, antara lain, geografis dan mobilitas pekerjaan. Dengan memahami implikasi ketenagakerjaan dari perdagangan memberikan ruang untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi biaya-biaya sosial dan memaksimalkan potensi manfaat perdagangan. Penguatan perlindungan sosial juga memainkan peran penting di sini.

2.2 Mempromosikan pekerjaan lebih banyak dan lebih baik untuk pertumbuhan inklusif: Informasi pasar kerja

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan pelayanan kesesuaian pekerjaan

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tanggung jawab di bidang promosi kerja dan penempatan kerja. Sebagai bagian dari pekerjaannya, Binapenta memiliki sistem informasi pasar kerja untuk pencari kerja dan lowongan kerja, dan menyediakan layanan kesesuaian pekerjaan secara online melalui *Bursa Kerja Online*.

Direktorat Pengembangan Pasar kerja di bawah Binapenta, mempunyai tanggung jawab atas pengembangan pasar kerja, dengan empat divisi yang masing-masing bertanggung jawab atas informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, analisis pekerjaan, dan pengembangan dan dukungan platform kesesuaian pekerjaan secara online. Platform kesesuaian pekerjaan secara online, Bursa Kerja Online, menyediakan layanan kesesuaian antara perusahaan dan pencari kerja. Menurut UU No. 07 Tahun 1981, semua perusahaan wajib mendaftarkan lowongan kerja dengan kantor kabupaten/kota yang menangani masalah angkatan kerja di daerah tersebut. Posisi ini kemudian dicocokkan dengan basis data pencari kerja yang terdaftar. Dari data ini, Binapenta kemudian menyediakan statistik tentang pencari kerja dan lowongan kerja di pasar kerja. Terlepas dari kenyataan bahwa layanan ini wajib, tingkat partisipasi pada pasokan (perusahaan) dan permintaan (pencari kerja) rendah karena masalah yang timbul dari desentralisasi, masalah teknologi, serta keengganan perusahaan dan pekerja untuk memanfaatkan layanan tersebut.

Layanan informasi pasar kerja (LMI) merupakan hal yang sangat menarik bagi pemerintah, perusahaan, dan pekerja di seluruh dunia karena menyediakan informasi tentang tren yang terkait dengan keterampilan, pekerjaan, dan pembangunan sektoral. Informasi tentang kekurangan atau surplus buruh, ketidakcocokan keterampilan, tren kerja, serta statistik pada tingkat pengangguran dan peserta pasar kerja sangatlah penting demi mendukung terwujudnya pertumbuhan yang kaya lapangan kerja.

Terdapat dua jenis utama LMI secara global. Data pertama dikumpulkan oleh badan statistik nasional yang relevan di negara. Di Indonesia, Badan Statistik Indonesia, yaitu BPS, mengumpulkan dan menerbitkan indikator ketenagakerjaan makro melalui “survei angkatan kerja”. Sumber kedua dari LMI adalah data administratif, dan ini dikumpulkan dari pencari kerja dan perusahaan dengan lowongan-lowongan dari kementerian tenaga kerja. Seperti yang telah disebutkan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bertanggung jawab untuk mengumpulkan data administratif tentang pasar kerja dari pencari kerja yang terdaftar dan perusahaan dengan lowongan kerja. Data ini memiliki potensi untuk memberikan gambaran yang menarik tentang pasar pekerjaan nasional.

Para pencari kerja dapat mendaftarkan dirinya pada lembaga di tiap provinsi yang disebut “*lembaga penempatan tenaga kerja swasta*”. Lembaga swasta ini harus mendapatkan izin dari Pemerintah untuk memberikan layanan kesesuaian pekerjaan. Pada tahun 2011 terdapat 97 lembaga yang diberikan izin untuk memberikan layanan kesesuaian pekerjaan. Dari lembaga-lembaga ini, 24 lembaga berada di Kepulauan Riau, dan 19 lembaga berada di DKI Jakarta. Menariknya, terdapat 9 lembaga di Papua, tetapi hanya 5 lembaga di Jawa Tengah.

Total jumlah pencari kerja terdaftar dengan kantor ketenagakerjaan adalah 1.941.434 di tahun 2011. Jumlah ini jauh lebih kecil daripada total estimasi pengangguran di Indonesia, yaitu 8.319.779 pada bulan Agustus 2011. Selanjutnya, tren pada data menunjukkan penurunan dalam jumlah pencari kerja terdaftar dari waktu ke waktu (lihat tabel di bawah).

Tabel 4:
Pencari kerja terdaftar berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2009-2011

Pendidikan	2009		2010		2011	
	Total	%	Total	%	Total	%
≤Sekolah dasar	507.459	8,06	267.181	6,48	41.477	2,14
Sekolah menengah pertama	765.486	12,16	237.373	5,75	189.836	9,78
Sekolah menengah atas	2.836.995	45,06	2.705.485	65,57	1.045.439	53,85
Universitas/Perguruan Tinggi	2.186.029	34,72	915.808	22,2	664.682	34,24
Total	6.295.969	100	4.125.847	100	1.941.434	100

Sumber: Dit. PKK Ditjen Binapenta

Para pencari kerja mendaftar di pusat pelayanan yang disebut “lembaga penempatan tenaga kerja swasta”

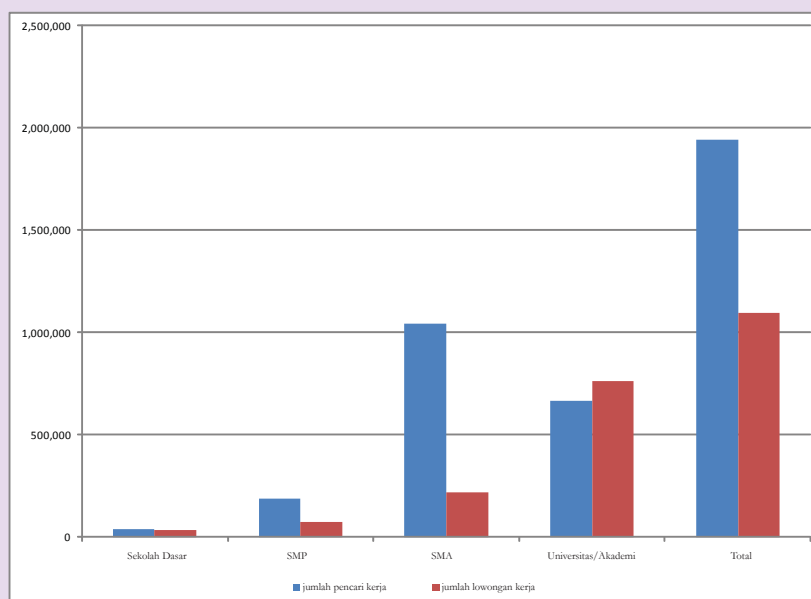
Pencari kerja dengan pendidikan sekolah menengah atas mendominasi total jumlah pencari kerja terdaftar, tercatat sebesar lebih dari 50 persen total jumlah pencari kerja. Kelompok terbesar kedua dari pencari kerja adalah individu yang lulus perguruan tinggi. Dari segi usia, sebagian besar pencari kerja terdaftar pada tahun 2011 berusia di bawah 29 tahun, dimana laki-laki cenderung merupakan pencari kerja tanpa keterampilan dan perempuan cenderung merupakan pencari kerja terampil.

Data menunjukkan bahwa terdapat ketidakcocokan keterampilan antara pencari kerja dan lowongan kerja

Dari segi wilayah, Jawa Tengah memiliki sekitar 527.521 pencari kerja terdaftar pada tahun 2011, diikuti oleh Jawa Timur dengan 464.899 pencari kerja, dan Jawa Barat dengan 264.481 pencari kerja. Namun, tampaknya tidak ada hubungan yang positif antara penawaran dan permintaan pekerjaan dengan jumlah pusat pelayanan pekerjaan, dengan Riau memiliki 24 pusat pelayanan tetapi hanya 423 lowongan kerja di tahun 2011, dan Jawa Tengah memiliki 5 pusat pelayanan tetapi lebih dari 384.000 lowongan kerja dan 527.521 pencari kerja di periode yang sama.

Jumlah lowongan kerja terdaftar adalah sekitar setengah dari jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2011. Namun, terjadi surplus pada proporsi lowongan kerja terdaftar untuk pekerja dengan pendidikan tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja dengan pendidikan tinggi. Secara umum, jumlah lowongan kerja terdaftar untuk pekerja dengan pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas telah menurun, sementara lowongan untuk pendidikan tinggi telah meningkat (lihat gambar di bawah). Situasi ini menunjukkan bahwa ada ketidakcocokan antara tingkat pendidikan pencari kerja dan persyaratan dari lowongan kerja yang bersangkutan.

Gambar 21:
Jumlah pencari kerja formal dan lowongan kerja tahun 2011



Sumber: Dit. PKK Ditjen Binapenta.

Walaupun sebagian besar pekerjaan ditemukan terpisah dari pencari dan sistem pendaftaran lowongan, namun analisis data menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia sebagian disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan pencari kerja terdaftar dan lowongan yang ditawarkan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya informasi pasar kerja dan proses perekrutan informal yang tersebar luas memperburuk masalah ketidakcocokan.

Pada tahun 2011, jumlah penempatan pekerjaan yang sukses adalah 949.030, turun 47,60 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat pendidikan dominan yang diwakili dalam penempatan adalah pencari kerja berpendidikan tinggi, yang mewakili 48,5 persen dari total penempatan. Menariknya, penempatan yang sukses di antara kelompok berpendidikan tinggi telah meningkat, sedangkan penempatan yang sukses untuk mereka dengan tingkat pendidikan lebih rendah telah menurun.

Table 5:
Total jobs with filled vacancies for 2009-2011

Pendidikan	2009		2010		2011	
	Total	%	Total	%	Total	%
≤SD	296.044	11,47	266.372	16,44	29.087	3,43
SMP	339.762	13,16	146.709	9,06	60.915	7,17
SMA	1.683.805	65,22	873.662	53,93	350.226	41,25
Universitas/ Perguruan Tinggi	262.059	10,15	333.379	20,58	408.802	48,15
Jumlah	2.581.670	100	1620122	100	849.030	100

Sumber: Dit. PKK Ditjen Binapenta.

Perempuan lebih berhasil dalam memperoleh pekerjaan daripada laki-laki pada tahun 2011, dimana perempuan berhasil mengisi 54,55 persen dari penempatan kerja. Menariknya, meskipun lebih banyak pencari kerja adalah perempuan dengan gelar sarjana daripada laki-laki, namun jumlah laki-laki yang direkrut melalui penempatan kerja untuk posisi universitas lebih tinggi. Di bidang industri, sebagian besar penempatan kerja dilakukan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, manufaktur dan industri pelayanan sosial, yang mencerminkan tingginya jumlah tawaran pekerjaan di industri tersebut.

Karena sistem pencari kerja dan pendaftaran lowongan kerja saat ini memainkan peran yang terbatas dalam menghubungkan masyarakat ke lapangan kerja, maka disarankan agar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tingkat nasional bekerja sama dengan kantor dinas agar pencari kerja dan perusahaan lebih memanfaatkan LMI dan metode perekrutan kerja formal dengan meningkatkan akses ke sistem ini. Selain itu, Kementerian perlu memberikan kepemimpinan dan berhubungan erat dengan penyedia layanan swasta, untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memiliki kualitas yang diinginkan dan statistik perburuhan

*Dukungan
diperlukan agar
pencari kerja dan
perusahaan lebih
memanfaatkan
metode perekrutan
pekerjaan formal*

dikumpulkan dan dikirimkan tepat waktu ke Kementerian. Akhirnya, untuk membangun lingkungan yang lebih kondusif untuk pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia, Kementerian dapat mempertimbangkan untuk melakukan tinjauan konteks hukum untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mengikuti praktik terbaik dan memfasilitasi apakah fungsi lembaga-lembaga tersebut efektif. Fungsi sistem pencari kerja dan pendaftaran lowongan kerja dalam sistem yang desentralisasi juga perlu dinilai.

2.3 Pekerjaan dan keterampilan untuk kaum muda: Program pasar kerja aktif dan kaum muda

Kaum muda menjadi sangat rentan selama krisis ekonomi

Di Indonesia, kondisi ketenagakerjaan kaum muda telah meningkat baru-baru ini. Pola pertumbuhan ekonomi selama tahun 2006-2012 kemungkinan besar telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kondisi ketenagakerjaan kaum muda. Namun, keuntungan ini sebagian besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan tidak dapat dipertahankan selama krisis ekonomi berlangsung. Untuk gambaran lebih lanjut, pekerjaan ekonomi formal telah berkembang di Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan kaum muda telah efektif dalam mengakses kesempatan kerja ekonomi formal yang muncul. Analisis status pekerjaan berdasarkan usia menunjukkan bahwa pekerja kaum muda (15-24 tahun) lebih cenderung memiliki kontrak kerja dibandingkan pekerja rata-rata, dengan 49,8 persen pekerja usia 15-24 dan 36,4 persen dari seluruh pekerja memiliki kontrak kerja upah. Tren pengangguran kaum muda di Indonesia juga menunjukkan penurunan pengangguran dari sekitar 30 persen di bulan Agustus 2006 menjadi sekitar 19 persen di bulan Mei 2013. Terlepas dari kemajuan ini, memperkuat kuantitas dan kualitas pekerjaan bagi kaum muda tetap penting di Indonesia.

Kementerian Perencanaan telah mengidentifikasi lima strategi untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi perempuan dan laki-laki muda, yaitu:

Program pasar kerja aktif memberikan dukungan untuk melibatkan kaum muda ke dalam pekerjaan

1. Koherensi kebijakan untuk mengoptimalkan tingkat pendidikan kaum muda;
2. Peningkatan keterampilan untuk kemampuan bekerja;
3. Perbaikan kualitas program magang;
4. Peningkatan kesempatan untuk kewirausahaan kaum muda; dan
5. Peningkatan berbagi pengetahuan, khususnya akses ke LMI.

Strategi-strategi ini memberikan sebuah kerangka kerja untuk pengembangan lebih lanjut dari program-program dan kebijakan-kebijakan di bidang ini. Banyak dari strategi ini berhubungan dengan penguatan

kebijakan-kebijakan dan program-program pasar kerja yang aktif (ALMP), yang mencakup berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan kerja selagi memberikan perlindungan sosial. ALMP telah digunakan secara luas di seluruh dunia, dimana tingkat kepentingan relatif dari berbagai jenis ALMP yang ada sering diubah sesuai kebutuhan siklus ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Program-program ini memiliki manfaat di antaranya seperti memfasilitasi kesesuaian penawaran-permintaan, mendukung partisipasi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung reintegrasi kelompok rentan ke dalam pasar kerja. Namun, intervensi ini dapat menjadi rentan terhadap keuntungan kerja yang tetap akan terjadi (kerugian bobot mati), efek pemindahan dan substitusi (terutama pada subsidi upah). Meskipun demikian, bahkan jika dampak ini ditemukan, ALMP sering dibenarkan atas dasar ekuitas.

ALMP secara luas dapat dibagi menjadi lima jenis,²⁰ meliputi dukungan pencarian pekerjaan, skema penciptaan lapangan kerja, subsidi upah, investasi dalam sumber daya manusia dan wirausaha. Tabel di bawah ini membahas beberapa temuan dari evaluasi ALMP yang telah beroperasi di seluruh dunia, dengan utamanya berfokus pada manfaat bagi kaum muda. Secara umum, faktor yang berdampak pada keberhasilan ALMP termasuk durasi dukungan yang ditawarkan (lebih lama lebih baik), kesesuaian desain untuk penerima bantuan, dan hubungan erat antara program dan perusahaan. ALMP yang efektif memahami dan menanggapi defisit kontekstual dalam iklim ekonomi makro dan ekonomi mikro, serta defisit individu dalam bidang pengalaman, keterampilan, informasi, dan akses. Akhir-akhir ini, ALMP yang paling inovatif telah menggabungkan faktor yang berbeda dari lima jenis ALMP ke dalam satu program - misalnya, pelatihan dengan penciptaan lapangan kerja atau pencarian pekerjaan dengan pelatihan.

Tabel 6:
Program-program pasar kerja aktif - ringkasan evaluasi

Program pasar kerja aktif	Keterangan program
1. Dukungan pencarian kerja, termasuk konsultasi karir, pameran pekerjaan, dll.	Pencarian pekerjaan bermanfaat bagi pencari kerja tertentu, tetapi bergantung pada kondisi pasar kerja yang menguntungkan. Program ini sering dipandang memiliki biaya rendah dan kurang efektif dibandingkan pilihan lain. Program ini sering dievaluasi sebagai strategi dukungan hemat biaya bagi kaum muda.
2. Skema penciptaan lapangan kerja, yang dapat bersifat sementara/ <i>ad hoc</i> ,	Evaluasi yang dilakukan menemukan bahwa program ini dapat memiliki efek kontrasiklis yang berguna. Studi pelacakan menunjukkan adanya hasil yang berbeda. Rancangan skema penciptaan lapangan kerja telah meningkat dalam beberapa

20 Program dan kebijakan pasar kerja meliputi program “aktif” dan “pasif”. Program pasif mencakup bantuan/asuransi pengangguran tanpa syarat, redundansi kompensasi, kompensasi kebangkrutan, dan pensiun dini.

Program pasar kerja aktif	Keterangan program
untuk waktu tertentu (misalnya, 6 bulan-2 tahun) atau beroperasi secara kontrasiklis/jaminan.	tahun terakhir karena penggabungan analisis kebutuhan, pelatihan keterampilan, bantuan pencarian pekerjaan, dan lebih memperhatikan kebutuhan pasar kerja setempat dalam desain skema penciptaan lapangan kerja. Hasil dari program ini bergantung pada kelompok peserta dan keadaan ekonomi. Untuk perbaikan kerja, durasi kerja yang lebih panjang (6 bulan-2 tahun) memiliki hasil yang lebih baik daripada program 10-30 hari kerja.
3. Subsidi upah yang dibayarkan kepada perusahaan sektor swasta atau publik - yang memberikan subsidi untuk meningkatkan prospek pekerjaan dari kelompok-kelompok tertentu.	Subsidi upah ditemukan sebagai salah satu ALMP paling efektif, dalam hal meningkatkan hasil ketenagakerjaan dan pendapatan, terutama karena panjangnya durasi dan penempatan di perusahaan yang memenuhi syarat. Namun, program ini telah dikaitkan dengan bobot mati ²¹ dan efek substitusi.
4. Berinvestasi dalam pembentukan sumber daya manusia untuk membantu pembentukan keterampilan dan meningkatkan produktivitas.	Program pelatihan adalah ALMP yang paling banyak digunakan dan beragam, dengan menggabungkan pendidikan umum dan pelatihan keterampilan kejuruan dengan durasi yang berbeda-beda. Keragaman dalam durasi dan lingkup program memberikan hasil evaluasi yang beragam. Program pelatihan lebih efektif jika dilakukan dalam skala kecil, dirancang untuk memberikan keterampilan khusus kepada kelompok sasaran, dan dilakukan dalam kemitraan yang erat dengan perusahaan lokal. Selain itu, pelatihan harus disahkan dan kualifikasi yang diperoleh harus diakui di pasar kerja.
5. Wirausaha, termasuk pelatihan dalam operasi bisnis, dukungan inkubasi bisnis, dan akses ke keuangan.	Survei skema pengembangan wirausaha atau usaha mikro telah menemukan dampak positif terhadap lapangan kerja dan mendapatkan prospek untuk kelompok kecil pengangguran, yang biasanya orang dewasa dengan pendidikan relatif tinggi. ²² ALMP ini dapat memiliki tingkat kegagalan bisnis yang tinggi dalam waktu 1 tahun, tetapi juga tingkat risiko rendah untuk seseorang yang kembali pengangguran.

Sumber: Kompilasi berdasarkan publikasi pilihan dari program OECD tentang “Kebijakan dan data ketenagakerjaan - Kebijakan pasar kerja aktif dan strategi pengaktifan”.

21 Kerugian bobot mati mengacu pada keuntungan kerja yang tetap akan terjadi.

22 Usia prima disebut sebagai kelompok usia antara 30 hingga 44 tahun.

ALMP paling efektif saat dapat mendukung kaum muda segera setelah mereka keluar dari sekolah, pelatihan, atau pekerjaan. Artinya, program-program paling efektif ketika program tersebut dapat mendukung peningkatan atau pemeliharaan soft skill dan hard skill. Ini membantu untuk mencegah kerusakan keterampilan, masalah yang berhubungan dengan kemalasan dan pengangguran jangka panjang. Hasil dan efektivitas ALMP juga terkait erat dengan keterlibatan sektor swasta dalam desain program. Selain itu, juga penting untuk membedakan antara kaum muda yang harus melanjutkan tingkat pendidikan mereka (usia belasan tahun) dan kaum muda yang perlu untuk membangun keterampilan dan pengalaman pasar kerja mereka (dewasa muda).

Secara umum, kelemahan ALMP terkait dengan pengeluaran biaya, efektivitas dalam mencapai kelompok sasaran, dan potensi untuk kerugian bobot mati, perpindahan, dan substitusi. Selain itu, kurangnya koherensi antara desain program dan realitas pasar kerja merupakan tantangan umum untuk ALMP di Indonesia. Hal ini biasanya disebabkan oleh sifat jangka pendek dari program-program pemerintah, serta dialog yang tidak memadai antara organisasi perusahaan dengan organisasi pekerja. Dalam hal ini diskusi tentang “dana pelatihan” untuk mempertemukan kalangan industry dengan balai pelatihan bersertifikat masih terus dilakukan.

Saat ini ada keterbatasan hubungan dan sinergi antara berbagai ALMP di Indonesia, dan juga ada keterbatasan hubungan antara program ALMP dan kebutuhan/permintaan pasar kerja. Kurangnya sinergi membatasi dampak intervensi ALMP. Sebagai contoh, program penciptaan lapangan kerja dan program pelatihan kewirausahaan diberikan kepada pekerja yang menganggur, yang setengah menganggur, dan yang rentan, tetapi, kaum muda jarang diidentifikasi sebagai penerima sasaran program ini. Selain itu, program ini biasanya dalam jangka pendek, dan disediakan tanpa menghubungkan penerima ke fasilitas pencarian kerja atau opsi dukungan pasca-pelatihan lainnya, yang membatasi keefektifan intervensi asli.

Reformasi yang menghubungkan program yang mendukung pekerjaan dan pelatihan keterampilan dengan pendaftaran dan penggunaan informasi pasar kerja, melalui penciptaan persyaratan masuk yang jelas (kewajiban bersama), dapat membantu untuk memastikan bahwa strategi aktivasi ini mendukung kaum muda dalam menemukan pekerjaan yang berkualitas dengan lebih efektif. Pembelajaran tambahan dari praktik terbaik internasional harus dikumpulkan untuk mendukung reformasi strategi promosi pekerjaan dan keterampilan bagi kaum muda.

Perlu fokus yang lebih besar untuk membangun sinergi antara ALMP dan kebutuhan/permintaan dari pasar kerja

Kotak 3: Pembangunan ekonomi informal melalui promosi ketenagakerjaan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki mandat untuk mempromosikan perluasan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi informal melalui program yang memberikan perlindungan sosial dan pengembangan mata pencaharian. Untuk melaksanakan mandat ini, Direktorat untuk Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Ekonomi Informal di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mengoperasikan lima program unggulan yang mendukung pengembangan ekonomi informal melalui program promosi ketenagakerjaan yang menargetkan kelompok rentan - terutama pengangguran, pengangguran terselubung, dan masyarakat miskin:

- **Padat Karya Infrastructure** - Menerapkan metode berbasis tenaga kerja untuk berinvestasi dalam infrastruktur tingkat desa yang memperkuat akses ke pelayanan dan fasilitas sosial-ekonomi..
- **Padat Karya Productive** - Menerapkan metode berbasis tenaga kerja untuk berinvestasi dalam infrastruktur produktif tingkat desa (pertanian, perikanan, peternakan, industri pedesaan) untuk mendukung pengembangan mata pencaharian.
- **Teknologi Tepat Guna** - Menerapkan metode berbasis tenaga kerja untuk berinvestasi dalam teknologi tingkat desa yang tepat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro.
- **Tenaga Kerja Mandiri** - Menyediakan pelatihan dan bimbingan kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro untuk kelompok-kelompok bisnis dan kelompok-kelompok masyarakat.
- **Tenaga Kerja Sukarela** - Menyediakan bantuan kepada kelompok-kelompok bisnis dan kelompok-kelompok masyarakat dengan mendukung relawan untuk menyediakan layanan bimbingan.

Pada tahun 2013 anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 378 miliar dan menciptakan lebih dari 120.000 lapangan kerja bagi rumah tangga yang rentan di seluruh Indonesia. Kementerian telah terlibat secara aktif dalam mereformasi program ini untuk meningkatkan peran mereka dalam penyediaan perlindungan sosial melalui pekerjaan. Dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerapkan pendekatan “berbasis sumber daya setempat”²³ (LRB) ILO pada tahun 2012 untuk mendukung peningkatan dari segi kualitas aset dan kualitas kesempatan kerja yang dihasilkan oleh Program Padat Karya.

23 Pendekatan berbasis sumber daya setempat (LRB) berfokus pada pengoptimalan kesempatan bagi ekonomi lokal untuk mendukung mata pencaharian dengan menggunakan sumber daya setempat. Dalam konteks investasi infrastruktur, pendekatan LRB berusaha untuk menemukan keseimbangan optimal antara penggunaan buruh setempat, bahan setempat, dan peralatan ringan untuk mengembangkan aset yang berkualitas bagi masyarakat sekaligus menciptakan pekerjaan lokal. Fitur lain dari pendekatan LRB meliputi pembangunan kapasitas bagi masyarakat setempat melalui pelatihan di dalam tempat kerja setempat dan penerapannya ke pendekatan perencanaan aksesibilitas pedesaan terpadu untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur memberikan kontribusi perbaikan jaringan transportasi secara keseluruhan.

2.4 Pekerjaan layak dalam perekonomian desa: Dampak investasi infrastruktur

Hingga bulan Mei 2013, perekonomian desa menyumbang 50,5 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Untuk masyarakat pedesaan, kualitas jaringan transportasi merupakan faktor utama yang terkait dengan mengakses kesempatan kerja dan mata pencaharian, serta mengakses atau diakses oleh layanan sosial-ekonomi. Mengakses pasar dan fasilitas sosial seringkali memerlukan perjalanan yang panjang dan lambat yang melibatkan jeda dalam kegiatan mata pencaharian dan kegiatan menghasilkan nafkah lainnya, yang dapat menyebabkan kehilangan pendapatan. Perbaikan kondisi jalan, jalur, dan jembatan dapat memiliki efek transformatif bagi masyarakat pedesaan. Sebagai contoh, dengan sistem transportasi yang lebih baik, petugas penyuluh pertanian akan dapat lebih menjangkau petani untuk memberikan pengetahuan teknis dan saran untuk meningkatkan produktivitas mereka. Peningkatan sistem transportasi juga memungkinkan produsen dan pedagang mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar, yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Konektivitas yang lebih baik dan perbaikan infrastruktur kemungkinan akan menarik investasi yang lebih besar dalam perekonomian desa, sedangkan jaringan transportasi yang buruk cenderung menghambat pertumbuhan dan perkembangan daerah pedesaan.

Jika kualitas jalan pedesaan meningkat, maka pendapatan juga meningkat

Penelitian pada jaringan-jaringan transportasi di daerah pedesaan Indonesia²⁴ menunjukkan bahwa bila kualitas jalan pedesaan meningkat, maka pendapatan juga akan meningkat, terutama untuk keluarga yang memiliki tingkat pendidikan setelah sekolah dasar. Lebih khusus lagi, investasi dalam infrastruktur transportasi dapat memiliki dampak positif pada pendapatan keluarga semua petani dan secara substansial mengurangi kemiskinan petani kecil, karena ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi darat untuk distribusi tanaman bagi petani. Penghematan yang didapatkan petani dari investasi infrastruktur terkait dengan a) pengurangan biaya transportasi, b) peningkatan akses ke pasar (peningkatan frekuensi perjalanan pasar/pedagang), dan c) peningkatan volume barang yang dapat diangkut ke pasar. Sebaliknya, penurunan kualitas jaringan transportasi - yang sebagian besar disebabkan kurangnya perawatan atau infrastruktur baru yang berkualitas buruk - mungkin memiliki dampak negatif bagi pendapatan rumah tangga.

Secara umum, investasi infrastruktur berdampak pada lapangan kerja dan mata pencaharian melalui penghematan waktu dan biaya, meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung akses pasar lokal, dan meningkatkan akses ke pelayanan sosial. Dampak investasi infrastruktur dapat dioptimalkan melalui penggunaan “pendekatan perencanaan aksesibilitas pedesaan

24 Yamauchi, F., Muto, M., Chodhury, S., Dewina, R. and Sumaryanto, S. (2009) *Spatial networks, labour supply and income dynamics – Evidence from Indonesian villages*, IFPRI Discussion Paper 00897, International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

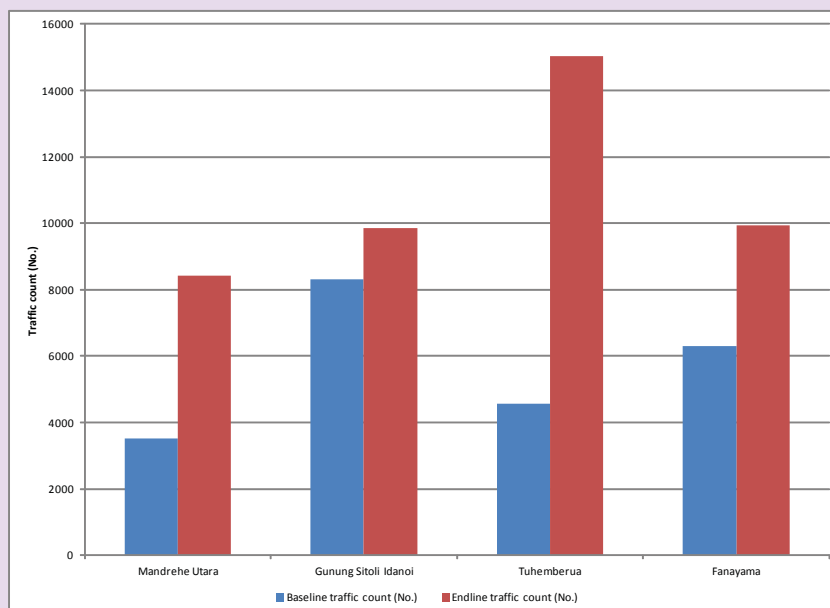
Investasi pada jalan dan jembatan berdampak pada mata pencaharian melalui penghematan waktu dan biaya, dan melalui

terpadu”, yang menerapkan pendekatan partisipatif untuk memetakan infrastruktur yang ada selagi mengidentifikasi masalah aksesibilitas dan area prioritas untuk investasi dalam jaringan transportasi guna mempromosikan mata pencaharian dan lapangan kerja di dalam target daerah. Berdasarkan rasional ini, ILO melaksanakan program di Kepulauan Nias antara tahun 2009 dan 2013, yang mendukung investasi dalam jaringan transportasi pedesaan dan keterampilan pekerja terkait.²⁵

Analisis awal dan pasca pelaksanaan data program menemukan bahwa investasi ini mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan volume lalu lintas, menambah rute yang dapat diakses, dan mengurangi margin transportasi komoditas. Contohnya, investasi yang dilakukan dalam akses pedesaan meningkatkan kecepatan seseorang dalam melakukan perjalanan di jalan atau jalur tertentu antara 310 hingga 500 persen, mengurangi waktu perjalanan lebih dari setengahnya. Banyak investasi yang dilakukan berada di rute yang rusak parah atau awalnya dibangun dengan buruk, sehingga jalan dan jalur seperti ini tidak dapat dilewati oleh sepeda motor sebelum rekonstruksi. Setelah pekerjaan-pekerjaan konstruksi selesai, jalan dan jalur yang menjadi dapat diakses di segala kondisi cuaca dengan sepeda motor.

Investasi yang dilakukan dalam akses pedesaan juga meningkatkan arus lalu lintas di jalan, jalur dan jembatan dibangun, dengan pertumbuhan arus lalu lintas berkisar dari 18 persen hingga 230 persen (lihat gambar di bawah). Peningkatan arus transportasi yang dijumpai antara periode pengumpulan data awal dan setelah penerapan menunjukkan bahwa investasi infrastruktur telah mendorong aktivitas lokal, yang juga kemungkinan akan mendorong pembangunan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja setempat.

Gambar 22:
Hasil survei arus lalu lintas di beberapa lokasi pilihan di Kepulauan Nias

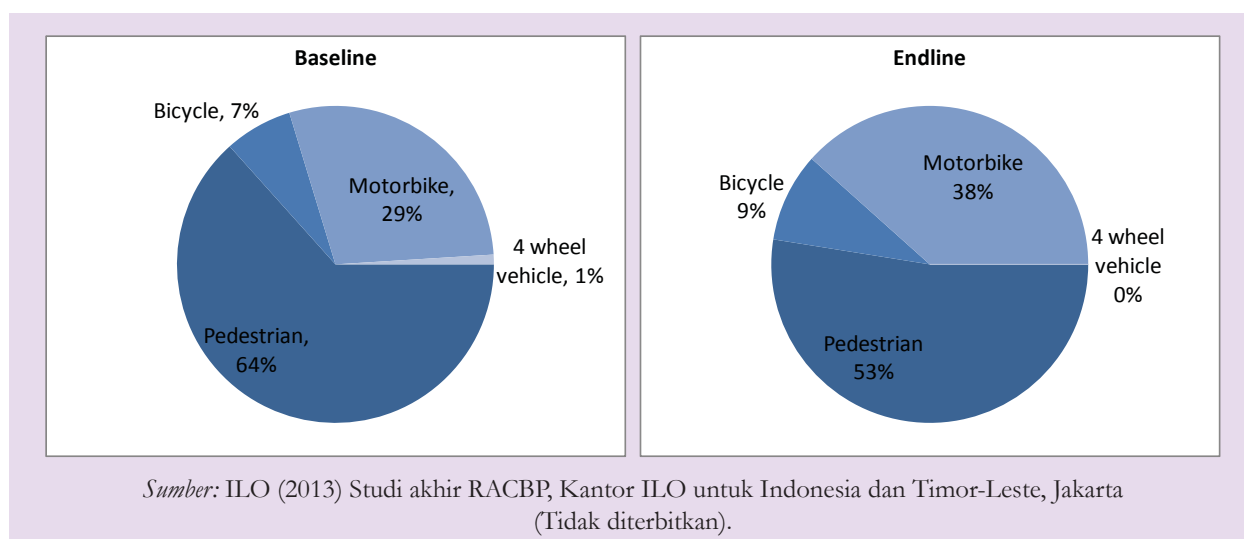


Sumber: ILO (2013) Studi akhir RACBP, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta (Tidak diterbitkan).

25 Kepulauan Nias adalah wilayah yang sangat miskin di Indonesia dan memiliki prasarana yang kurang berkembang. Hal ini berbeda dengan daerah-daerah pedesaan di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang memiliki jaringan transportasi yang sudah lebih maju. .

Dengan adanya kualitas jalan, jalur, dan jembatan yang telah diperbaiki, lebih banyak orang mulai beralih dari bepergian dengan berjalan kaki menjadi menggunakan sepeda motor di daerah pengumpulan data. Studi awal menemukan bahwa kebanyakan orang bepergian dengan berjalan kaki (64 persen), diikuti oleh sepeda motor (29 persen). Hanya sebagian kecil dari sampel bepergian dengan sepeda atau dengan kendaraan roda empat (L-300, mobil, pick-up, truk, atau traktor). Dalam studi pasca-pelaksanaan, masih banyak orang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki (51 persen), sementara jumlah orang yang bepergian dengan sepeda motor telah meningkat (38 persen). Tren meningkatnya penggunaan sepeda motor kemungkinan akan berlanjut, dan juga mungkin akan menghemat waktu yang berharga bagi produsen, pedagang, dan pekerja.

Gambar 23:
Hasil survei arus lalu lintas berdasarkan alat transportasi



Kualitas jalan, jalur, dan jembatan berdampak pada akses ke pasar dan layanan. Dalam kasus perawatan kesehatan, akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan individu melalui penundaan yang dilakukan anggota masyarakat dalam berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan jika jalan dalam kondisi buruk. Hal ini kemudian dapat berdampak pada indikator sosial, seperti kematian dan kesehatan ibu. Selain itu, banyak pengeluaran terkait akses ke pelayanan kesehatan dapat dianggap biaya nyata dan biaya kesempatan, dengan biaya transportasi biasanya merupakan pengeluaran keuangan terbesar dari perawatan kesehatan setelah pengeluaran untuk membeli obat-obatan dan biaya mengunjungi klinik kesehatan.

Data yang dikumpulkan dari klinik kesehatan selama penelitian menunjukkan bahwa jumlah klien yang mengakses layanan mereka telah meningkat sejak peningkatan infrastruktur. Selain itu waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke desa sekitar untuk penyediaan layanan sosialisasi mengalami penurunan. Selanjutnya, frekuensi pelayanan sosialisasi meningkat. Misalnya, di Tuhemberua layanan sosialisasi dari klinik kesehatan

*Program investasi
bertindak sebagai
katalis untuk
mendorong
pembangunan
ekonomi setempat*

setempat meningkat dari rata-rata dua kunjungan per minggu dengan berjalan kaki pada studi awal, hingga kunjungan harian dengan sepeda motor dalam studi pasca pelaksanaan.

Data juga dikumpulkan dari usaha setempat yang menyediakan produk rumah tangga dan bahan makanan bagi masyarakat. Secara umum harga komoditas tetap konstan selama periode pengumpulan data, sedangkan biaya transportasi terkait berkurang antara 0 hingga 100 persen Misalnya, biaya untuk mengangkut kantong semen untuk Fanayama adalah Rp 15.000 di studi awal dan Rp 7.500 di studi pasca pelaksanaan.

Manfaat dari mudahnya akses dan penghematan terkait waktu tempuh dan margin transportasi memungkinkan produsen dan pekerja untuk meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan pendapatan mereka di masa yang akan datang. Mengingat meningkatnya pengetahuan tentang keterkaitan antara investasi infrastruktur dan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk promosi ketenagakerjaan dan pengembangan mata pencaharian, akan bermanfaat bagi strategi pembangunan pedesaan untuk menggunakan program investasi infrastruktur sebagai katalis untuk mendorong pembangunan ekonomi setempat. Program tersebut juga dapat dihubungkan dengan investasi lain dalam modal manusia, seperti pengembangan usaha, pelatihan dan pembinaan keterampilan untuk memberikan pendekatan terpadu demi pembangunan pedesaan.

2.5 Produktivitas dan kondisi kerja dalam UKM: Memahami tantangan yang dihadapi UKM

Indonesia memiliki komunitas aktif dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang memberikan kontribusi signifikan untuk pembangunan ekonomi, pembangunan lokal, keberagaman ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Diperkirakan bahwa UMKM menyumbang 90 persen dari semua usaha di Indonesia dan usaha ini menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian ke khalayak banyak. Namun, data mengenai usaha ini relatif terbatas.

UMKM
menyumbang 90
persen dari semua
usaha di Indonesia

Secara umum *usaha mikro* di Indonesia beroperasi dalam ekonomi informal di daerah perkotaan dan pedesaan.²⁶ Usaha ini mempekerjakan pekerja paruh waktu dan pekerja keluarga tanpa upah, untuk memenuhi barang dan jasa ke pasar setempat. Usaha mikro biasanya dijalankan oleh pengusaha dengan tingkat pendidikan rendah. Sebagai perbandingan, *usaha kecil* dapat ditemukan dalam ekonomi formal dan informal di daerah perkotaan dan pedesaan. Usaha ini cenderung mempekerjakan pekerja paruh waktu dan pekerja keluarga tanpa upah dan memiliki akses ke pasar nasional dan pelayanan bisnis. Pelaku wirausaha perempuan memiliki keterlibatan tinggi dalam usaha mikro dan kecil ini. Usaha kecil biasanya juga dijalankan oleh pengusaha dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha mikro.

Usaha menengah, sama seperti usaha besar, biasanya beroperasi dalam ekonomi formal dan sebagian besar berada di daerah perkotaan. Usaha ini mempekerjakan pekerja (buruh upah) dan menyediakan barang dan jasa ke pasar nasional dan pasar ekspor. Usaha besar dan menengah biasanya mempekerjakan manajer profesional, memiliki sistem administrasi profesional, dan bekerja dengan pekerja terampil atau semi-terampil. Usaha besar dan menengah cenderung memiliki keterlibatan pelaku wirausaha laki-laki.

Berdasarkan informasi ini, akan mudah untuk memahami tenaga kerja dalam usaha mikro, kecil, menengah, dan besar melalui data yang diuji dari survei angkatan kerja dalam status ketenagakerjaan. Survei angkatan kerja mengelompokkan masyarakat ke dalam tujuh kategori seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

26 Tulus, T. (2011) Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Performa dan hambatan mereka, Pusat Industri, UKM dan Studi Kompetisi Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta.

Tabel 7:
Definisi status ketenagakerjaan

Status ketenagakerjaan	Definisi
Wiraswasta	Seseorang yang bekerja dengan risikonya sendiri tanpa didampingi oleh buruh harian atau pekerja tanpa upah, dan mencakup pekerjaan teknis atau pekerjaan terampil.
Pengusaha yang dibantu buruh harian/buruh tanpa upah	Seseorang yang bekerja dengan risikonya sendiri dan memiliki pekerja temporer/pekerja tanpa upah.
Pengusaha	Seseorang yang melakukan usaha dengan risikonya sendiri dan memiliki setidaknya satu pekerja tetap/permanen yang diupah.
Pekerja	Seseorang yang bekerja secara permanen kepada pengusaha atau institusi/kantor/perusahaan untuk upah/gaji. Pekerja yang tidak memiliki atasan permanen tidak dikategorikan sebagai pekerja, melainkan sebagai buruh harian.
Buruh harian di sektor pertanian	Seseorang yang tidak bekerja secara permanen untuk seorang pengusaha yang bekerja di sektorpertanian (industri rumah tangga atau bukan industri rumah tangga) dan diremunerasi menggunakan pendekatan upah borongan atau harian.
Buruh harian non pertanian	Seseorang yang tidak bekerja secara permanen untuk seorang pengusaha yang tidak bekerja di sektorpertanian (industri rumah tangga atau bukan industri rumah tangga) dan diremunerasi menggunakan pendekatan upah borongan atau harian.
Pekerja tanpa upah	Seseorang yang bekerja untuk orang lain tanpa diupah dengan uang atau barang. Pekerja tanpa upah bisa saja anggota keluarga, dari anggota keluarga besar atau di luar dari anggota keluarga.

Sumber: BPS (2012) Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia: Agustus 2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Berdasarkan definisi di atas, wiraswasta dan perusahaan yang dibantu oleh buruh harian atau pekerja tanpa upah biasanya menjadi operator dalam usaha mikro dan kecil. Pada bulan Agustus 2012, sekitar 18,8 juta atau 16,5 persen orang yang bekerja sebagai pengusaha yang didampingi oleh buruh harian dan pekerja tanpa upah. Sebagai tambahan 18,4 juta atau 16,6 persen angkatan kerja bekerja sebagai “wiraswasta”. 29,4 juta atau 27 persen pekerja bekerja sebagai buruh harian atau pekerja tanpa upah, biasanya bekerja untuk pengusaha dalam kategori kedua. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang diberikan, dapat diperkirakan bahwa sekitar 60,1 persen angkatan kerja berasal dari usaha mikro dan kecil.

Pengusaha dalam kategori ketiga (lihat label di bawah) mempekerjakan pekerja permanen dalam kategori keempat dan biasanya pengusaha ini merupakan pengusaha ekonomi formal, dan bisa berada dalam usaha kecil, menengah, atau besar. Hanya 3,5 persen pekerja berada di bawah kategori “pengusaha ekonomi formal” dan mereka menyediakan ketenagakerjaan permanen hingga 36,4 persen dari “pekerja ekonomi formal”.

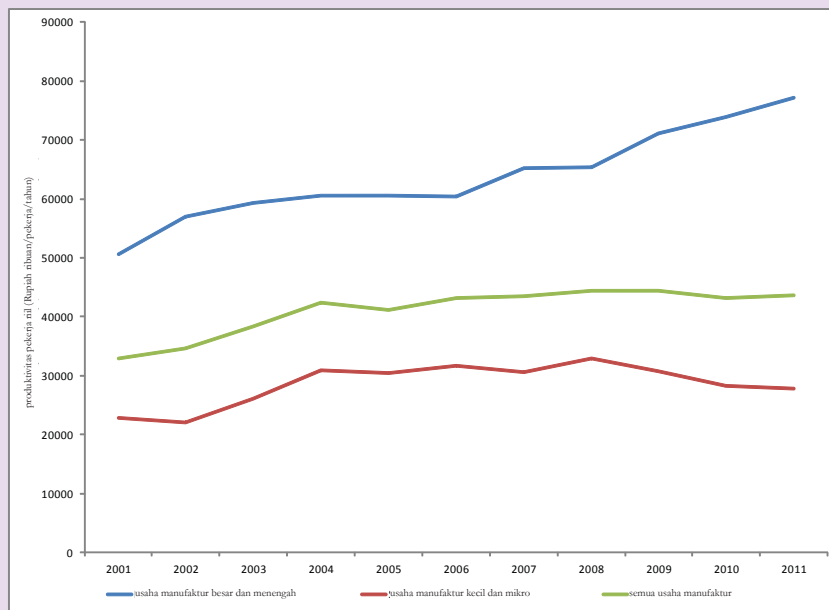
Sebaliknya, data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memperkirakan bahwa lebih dari 97 persen pekerja bekerja dalam usaha mikro, kecil, dan menengah.²⁷ Mereka memperkirakan bahwa 90 persen pekerja bekerja dalam usaha mikro, 4 persen dalam usaha kecil, dan 3 persen dalam usaha menengah. 3 persen yang tersisa dari usaha yang memiliki pekerja merupakan usaha besar. Namun perkiraan ini harus dibaca dengan hati-hati karena ini berdasarkan pada survei contoh dan menduga bahwa semua yang pekerja bekerja dalam perusahaan, termasuk pegawai pemerintahan.

Meskipun terdapat ketidakpastian data, sudah jelas jika usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan unsur vital dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi secara besar dalam ketenagakerjaan dan hasil ekonomi di Indonesia. Namun produktivitas yang rendah dalam usaha ini telah menghambat pertumbuhan tenaga kerja dan realisasi dari kontribusi mereka dalam PDB. Analisis mengindikasikan bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang dihasilkan dari usaha mikro dan kecil tidak diimbangi dengan pertumbuhan penting dalam produktivitas pekerja (lihat gambar di bawah). Kenyataannya, produktivitas dalam perusahaan besar 200 persen lebih besar dibandingkan produktivitas perusahaan kecil, menciptakan kesenjangan produktivitas di antara UKM dan perusahaan menengah dan besar. Kesenjangan produktivitas ini disebabkan oleh sifat masukan manual dari UKM, serta kekurangan faktor penting lainnya, misalnya akses terbatas ke pekerja terampil, modal, dan infrastruktur serta kurangnya keterampilan usaha dan pengetahuan secara umum.

Terdapat variasi penting dalam produktivitas perusahaan mikro dan kecil dan perusahaan menengah dan besar

27 http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=93

Gambar 24:
Produktivitas pekerja riil di sektor manufaktur, 2001-2011



Sumber: Tadjoeeddin, Z. (2013) Upah, produktivitas, dan evolusi ketidaksetaraan di Indonesia: Studi kasus di sektor manufaktur, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Jakarta.

Untuk gambaran lebih lanjut, gambar di atas menampilkan data produktivitas pekerja riil di sektor manufaktur antara tahun 2001 dan 2011 dalam perusahaan besar dan menengah dan perusahaan kecil dan mikro. Gambar tersebut menggambarkan bahwa produktivitas perusahaan besar dan menengah telah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan produktivitas perusahaan kecil dan mikro. Bahkan, produktivitas pekerja riil di perusahaan mikro dan kecil di sektor manufaktur secara relatif stagnan selama sepuluh tahun terakhir.

Kesenjangan yang semakin lebar pada produktivitas buruh riil antara perusahaan besar dan kecil menggambarkan tantangan untuk pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia

Kesenjangan yang semakin lebar dalam produktivitas buruh riil antara perusahaan besar dan menengah dan perusahaan kecil dan mikro mewakili tantangan dalam pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Selain itu, dalam beberapa tahun ke depan, integrasi ekonomi ASEAN, serta perjanjian perdagangan bebas dengan China dan India diperkirakan akan meningkatkan kompetisi domestik, sehingga memberikan tekanan pada UKM di Indonesia. Terdapat beberapa langkah penting yang harus dilaksanakan guna meningkatkan produktivitas UKM yang ada, serta mempromosikan sejumlah usaha baru ke pasar. Pertama, Pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya UKM. Hal ini dapat diraih melalui penyediaan "one stop shop" yang memberikan akses ke pendaftaran bisnis dan jasa terkait, menanamkan modal ke infrastruktur, dan mendukung kepercayaan diri penanam modal melalui kepastian hubungan industri yang baik. Selain itu, kebijakan yang menguatkan perlindungan pekerja - melalui perluasan pengawasan tenaga kerja dan perluasan jaminan sosial - dapat membantu UKM berada pada ekonomi formal.

Langkah kedua yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan investasi dalam UKM. Pemerintah harus mendukung investasi dengan memperkuat hak properti dalam bidang real estate di Indonesia, serta memberikan biro kredit untuk berbagi riwayat kredit dengan institusi keuangan lain. Selain itu, usaha lebih lanjut dapat ditujukan pada pengembangan alternatif keuangan terhadap pinjaman bank tradisional, seperti pengembangan modal usaha, simpanan dan kredit koperasi, keuangan mikro, dan penyewaan. Hal ini dapat memberikan perusahaan akses besar terhadap modal dan memicu investasi di daerah tersebut, yang kemudian dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas usaha ini.

Ketiga, dan yang paling penting, tingkat sumber daya manusia yang rendah merupakan hambatan utama dalam pertumbuhan produktivitas di UKM dan investasi dalam sumber daya manusia sama pentingnya dengan investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan UKM. Pembangunan kapasitas manajerial dan penguatan keterampilan usaha dan teknis sangatlah penting untuk menghidupkan pengembangan usaha. Dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan sekitar 600.000 orang memerlukan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2013.²⁸ Namun, program pelatihan ini terbatas dan sumber daya pelatihan sering sekali tidak dimanfaatkan. Misalnya, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas memberikan pelatihan untuk sekitar 80.000 orang setiap tahun, padahal lembaga ini memiliki kapasitas untuk melatih sekitar 240.000 orang. Akan tetapi, masih banyak orang yang memerlukan pelayanan ini yang berada dalam kesenjangan. Kualitas pelayanan materi pelatihan, instruksi, dan dukungan pasca-pelatihan merupakan tantangan lebih lanjut yang perlu ditujukan untuk menjawab tantangan produktivitas yang dihadapi oleh banyak perusahaan saat ini.

DWCP 2012-15 Tujuan 2: Hubungan industri yang baik untuk pengaturan ketenagakerjaan yang efektif

Tujuan kedua dari DWCP ini berfokus pada hubungan industri yang baik dalam konteks pengaturan ketenagakerjaan yang efektif. Tiga prioritas kerja dikenali dalam tujuan ini, mencakup:

1. Administrasi ketenagakerjaan menyediakan layanan efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan kerja.
2. Konstituen tripartit secara efektif berperan dalam dialog sosial untuk menerapkan peraturan perburuhan dan standar-standar perburuhan internasional.
3. Penguatan kapasitas institusional dari organisasi pengusaha dan organisasi pekerja untuk berkontribusi dalam hubungan industrial yang baik berdasarkan tanggung jawab dan mandat masing-masing.

28 Kemenakertrans (2011) *Perencanaan Tenaga Kerja 2012-2013*, Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Sekretariat Jenderal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.

2.6 Kepatuhan perusahaan melalui pengawasan tenaga kerja: Kemajuan pengawasan

Indonesia telah melakukan beberapa langkah besar untuk mengembangkan sistem pengawasan tenaga kerja.

Pengawasan tenaga kerja melibatkan pemantauan dan penegakan kondisi ketenagakerjaan minimum yang diatur oleh perundang-undangan nasional. Pengawas tenaga kerja tidak hanya memeriksa bagaimana standar pekerja nasional diterapkan dalam tempat kerja, tetapi juga memberi petunjuk kepada perusahaan dan pekerja tentang cara untuk meningkatkan penerapan perundang-undangan nasional dalam hal-hal, seperti waktu bekerja, upah, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pekerja anak. Selain itu, pengawasan tenaga kerja memiliki peran sekunder dalam memberi masukan kepada pejabat nasional yang berwenang tentang ambiguitas dan kelemahan dalam undang-undang nasional yang ada saat ini. Pengawasan tenaga kerja sangat penting untuk stabilitas tempat kerja, dan menciptakan keseimbangan dan keadilan dengan memastikan undang-undang ketenagakerjaan diterapkan secara seimbang ke semua perusahaan dan pekerja. Karena komunitas internasional mengetahui pentingnya pengawasan tenaga kerja, ILO telah mempromosikan perlunya ratifikasi dua konvensi tentang pengawasan tenaga kerja (No. 81 dan 129) sebagai prioritas. Sejak tahun 2013, lebih dari 145 negara (lebih dari 75 persen dari negara anggota ILO) telah meratifikasi Konvensi tentang pengawasan tenaga kerja, 1947 (No. 81), termasuk Indonesia.²⁹

Pengawasan tenaga kerja merupakan pilar utama dalam administrasi ketenagakerjaan di Indonesia, dan memiliki peran utama dalam penerapan undang-undang ketenagakerjaan nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah melakukan beberapa langkah besar untuk mengembangkan sistem pengawasan tenaga kerja. Langkah-langkah ini termasuk pembentukan komite tripartite nasional, perekrutan pengawas tenaga kerja baru, pengembangan kurikulum baru untuk pelatihan pegawai baru ini, serta penerapan metodologi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa data pengawasan tenaga kerja. Perkembangan baru ini akan membantu memastikan bahwa kondisi kerja di Indonesia serta kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di Indonesia semakin menguat, dengan peningkatan kesejahteraan pekerja untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga kerja (Ditjen Binwasnaker) adalah unit teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan tenaga kerja. Pada tahun 2013, sudah direncanakan bahwa Binwasnaker akan didukung oleh 4202 pengawas tenaga kerja dan 267 pengawas spesialis yang membina kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dalam ruang lingkup nasional, provinsi, dan tingkat daerah pemerintahan (lihat tabel di bawah ini).

²⁹ Konten ini diambil dari <http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/labour-inspection/lang-en/index.htm>

Tabel 8:
Target perluasan pengawasan tenaga kerja di Indonesia 2009-2013

Pengawasan tenaga kerja	2009	2010	2011**	2012**	2013**
Laporan perusahaan	208.737	216.547	224.383	237.846	252.117
Pekerja yang tercakup	13.998.035	15.950.143	16,603.693	17.653.260	18.712.456
Pengawas tenaga kerja	1.986	2.354	2.255	3.964	4.202
Pengawas spesialis	131	162	238	252	267
Pengurangan pekerja anak		3.000	3.360	10.750	12.367

Sumber: Kemenakertrans (2011) Perencanaan tenaga kerja 2012-2013, Sekretariat Jenderal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. **Estimasi

Meskipun demikian, terdapat tantangan untuk mewujudkan perluasan pelayanan pengawas tenaga kerja di Indonesia dan laporan awal menunjukkan bahwa target untuk perluasan pelayanan ini belum terwujud. Tantangan dalam mewujudkan perluasan inspeksi pekerja termasuk desentralisasi struktur pemerintahan, kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial, serta kurangnya koordinasi di dalam dan antar daerah. Banyak pemerintah daerah yang menyediakan investasi terlalu kecil untuk pengawasan tenaga kerja. Keputusan Menteri diterapkan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini (Keputusan Menteri No. 02 tahun 2011 tentang Pelaksanaan, Pengawasan dan Koordinasi Tenaga Kerja), meskipun demikian, dampaknya belum jelas. Di samping itu, distribusi inspeksi pekerja yang tidak merata, struktur pengawasan yang lemah, dan pergantian staf yang tinggi berdampak pada kapasitas inspektorat pekerja agar secara efektif mengawasi kondisi kerja di Indonesia.

Namun, penyediaan pelayanan inspeksi masih menghadapi kendala kritis.

Sistem inspeksi pekerja yang belum berkembang memiliki implikasi dalam perlindungan pekerja dan juga memiliki implikasi untuk menarik bisnis dari investor asing ke Indonesia. Untuk gambaran lebih lanjut, karena jumlah keseluruhan pengawas tenaga kerja di Indonesia terbatas, jumlah perusahaan yang dapat dicapai oleh pelayanan inspeksi pekerja juga terbatas. Data dari sensus ekonomi 2006 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 22,7 juta usaha mikro dan kecil dan 3,8 juta usaha besar dan menengah di Indonesia. Pelayanan inspeksi pekerja saat ini hanya dapat mencapai antara 200.000 hingga 250.000 perusahaan per tahun (lihat tabel di atas). Hal ini menimbulkan kesenjangan yang besar dalam penyediaan layanan, yang diperkirakan kurang dari 1 persen perusahaan dilayani oleh pengawas tenaga kerja setiap tahun.³⁰ Walaupun penuh tantangan, namun memperluas layanan pengawasan tenaga kerja ke semua perusahaan menengah dan besar perlu diprioritaskan sebagai bagian dari strategi memperkuat pengelolaan ekonomi di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung pengembangan pengawasan tenaga kerja di Indonesia terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Pertama,

30 Kemenakertrans (2011) Perencanaan tenaga kerja 2012-2013, Sekretariat Jenderal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.

peran otoritas pusat perlu diperkuat agar dapat mengawasi dan mengontrol sistem pengawasan tenaga kerja di seluruh Indonesia (sesuai pasal 4 Konvensi ILO no. 81). Peningkatan statistik juga merupakan bagian yang penting untuk memperkuat sistem ini. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan basis data perusahaan secara nasional, standarisasi bentuk pengawasan, pembuatan panduan pengawasan tenaga kerja yang standar, serta pengembangan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi kinerja pengawasan. Tindakan-tindakan ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas dan penggunaan data pengawasan tenaga kerja.

Kedua, kemitraan lebih lanjut diperlukan antar instansi pemerintahan untuk meningkatkan sistem pengawasan di daerah-daerah dimana terjadi tumpang tindih atau mandat pelengkap (misalnya, Jamsostek, BPS, otoritas yuridis, perpajakan). Di samping itu, kerjasama antara organisasi pengusaha dengan organisasi pekerja perlu juga ditingkatkan. Ketiga, karena sumber daya manusia dan finansial yang terbatas menghambat kapasitas institusi pengawasan tenaga kerja untuk menjalankan mandatnya, maka efisiensi pendekatan desentralisasi terhadap pengawasan tenaga kerja perlu ditinjau kembali dan dicari model-model pengawasan tenaga kerja yang lain. Jumlah pengawas tenaga kerja dibandingkan jumlah perusahaan dan pekerja di Indonesia masih sangat rendah, sehingga sangat menghambat pemberian pelayanan yang efektif.

Kotak 4: Memperkuat kepatuhan perusahaan sebagai suatu strategi untuk meningkatkan daya saing

Tekstil dan produk industri tekstil merupakan kontribusi utama bagi pertumbuhan Indonesia serta pemberi kerja terbesar di sektor manufaktur. Dalam waktu yang sama, dibandingkan dengan negara eksportir terdepan (misalnya China, India, Vietnam, dan Turki) tren pertumbuhan ekspor Indonesia adalah yang paling sederhana. Kontradiksi antara pentingnya tekstil bagi perekonomian Indonesia dan tingkat pertumbuhan subsektor yang lamban menunjukkan perlunya solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing di pasar. Satu strategi akan memberikan prioritas ke masalah buruh, misalnya kondisi kerja demi mendukung pertumbuhan produktivitas.

Penelitian survei dengan pekerja dari pabrik tekstil Indonesia yang bekerjasama dengan ILO Better Work Indonesia menemukan bahwa peningkatan di beberapa bidang diperlukan, misalnya kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya, dari 918 pekerja yang diwawancarai di 42 pabrik, 73 persen pekerja melaporkan bahwa mereka mengalami sakit kepala, sakit punggung, dan sakit leher yang parah, dan 59 persen pekerja menyampaikan kekhawatirannya mengenai peralatan yang berbahaya. Pelatihan juga merupakan masalah bagi Indonesia, dengan hanya 29 persen pekerja dilatih dengan keterampilan dasar. 80 persen pekerja

perempuan juga menyampaikan tingkat kekhawatiran yang tinggi tentang pelecehan dan kekerasan.

Sisi positifnya, terdapat beberapa faktor yang menempatkan Indonesia pada posisi yang baik, misalnya hanya 0,1 persen pekerja yang mengalami diskriminasi. Terdapat pula kebebasan berserikat, dengan 65 persen pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja. Tetapi secara umum ditemukan bahwa sektor tenun, garmen, tekstil, dan pakaian jadi di Indonesia menghadapi penurunan pekerjaan layak yang tercermin oleh tingginya tekanan di antara pekerja dan masalah kesehatan secara umum yang sudah pasti mengurangi produktivitas perusahaan.

Pemahaman kondisi kerja dan bagaimana faktor seperti kesehatan dan keselamatan kerja berdampak pada produktivitas merupakan elemen penting untuk mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Pengawasan tenaga kerja yang berkala dapat meningkatkan pemantauan kondisi kerja dan membantu mengidentifikasi cara yang paling efektif untuk memperbaiki tempat kerja dan kualitas hidup pekerja. Pada akhirnya hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pekerja, untuk menumbuhkan efisiensi perusahaan, dan untuk meningkatkan daya saing negara.

Sumber: Wahuni, S. dan Boeditomo, P. (2013) Does quality of work life matter? A comparison between Indonesia and Vietnam textile industries, Universitas Indonesia, Jakarta.

2.7 Perlindungan pekerja dari bentuk pekerjaan yang tidak dapat diterima: Pekerja rumahan

Di Indonesia, konsep usaha non-standar mengacu pada pekerja informal, pekerja alih daya, dan pekerja kontrak

Liberalisasi ekonomi dan peningkatan integrasi ekonomi nasional dalam pasar global telah mengubah praktik tempat kerja terkait dengan praktik perekrutan dan pemecatan yang fleksibel dan terhadap peningkatan hubungan tenaga kerja yang tidak berstandar. Undang-undang dan peraturan perburuhan telah direvisi dan diterapkan ke dunia untuk menjawab i) peningkatan kebutuhan perusahaan dalam menanggapi fluktuasi di pasar dan ii) untuk menjamin perlindungan minimum dan kondisi kerja pekerja dengan jenis yang berbeda dari kontrak kerja.

Pekerjaan non-standar, pekerjaan kontingen, dan pekerjaan dalam ekonomi informal dapat dikelompokkan ke dalam konsep yang lebih luas dari “pekerjaan tidak tetap”. Menurut ILO, pekerjaan tidak tetap memiliki definisi sebagai berikut:

‘pekerjaan oleh pekerja yang kontrak kerjanya menyebabkan klasifikasi pemegang jabatan sebagai bagian kelompok “buruh harian”, “pekerja jangka pendek”, atau “pekerja musiman”, atau pekerja yang kontrak kerjanya memungkinkan perusahaan atau individual yang merekrut untuk memutuskan kontrak dalam waktu singkat dan/atau berdasarkan keinginan, keadaan tertentu yang akan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional dan adat’.³¹

Di Indonesia, konsep pekerjaan non-standar masih ditetapkan dalam pengaturan statistik dan perundang-undangan. Tetapi secara umum, kategori pekerja informal, pekerja alih daya, dan pekerja kontrak dapat digunakan untuk memahami konsep pekerjaan non-standar di Indonesia.³²

Ada banyak pekerja yang memiliki hubungan kerja non-standar dan situasi kerja berbahaya di Indonesia. Pekerja rumahan adalah salah satu dari kelompok pekerja tersebut. Pekerja rumahan tidak dikenali atau ditetapkan secara eksplisit oleh undang-undang dan peraturan nasional sebagai kategori pekerjaan khusus di Indonesia. Namun, Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996 (No. 177), mendefinisikan pekerja rumahan sebagai:

Usaha rumah tangga merupakan jenis usaha non-standar

‘seseorang yang melakukan pekerjaannya di rumah atau di tempat lain atas keinginannya, bukan di tempat kerja dari perusahaan; untuk remunerasi yang menghasilkan barang dan jasa yang disebutkan oleh perusahaan, terlepas dari siapa yang menyediakan alat, materi, dan masukan lain yang digunakan’.³³

31 Resolusi ILO (1993) mengenai Klasifikasi Internasional Status Tenaga Kerja (ICSE), diterapkan oleh Konferensi Internasional Statistik Buruh Kelimabelas: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087562.pdf

32 Lihat Lampiran I.

33 Konvensi ILO tentang Pekerjaan Rumahan, 1996 (No.177), Pasal 1.

Definisi usaha rumah tangga ini mencakup tiga elemen umum dari hubungan tenaga kerja di bawah undang-undang ketenagakerjaan Indonesia - pekerjaan, remunerasi, dan tingkat subordinasi yang ditetapkan.³⁴ Oleh karena itu, dengan tidak adanya undang-undang eksplisit yang mengatur pekerjaan yang dilakukan di rumah, keberadaan elemen ini dalam hubungan tenaga kerja dapat membantu menentukan perluasan cakupan pekerja rumahan oleh undang-undang ketenagakerjaan Indonesia.

Pekerja rumahan di Indonesia biasanya ditemukan dalam perjanjian subkontrak industri atau komersial. Dalam subkontrak komersial, ini sering disebut sebagai sistem ‘domestik’ (putting-out), kontraktor domestik tidak ikut serta dalam proses produksi aktual. Sementara itu dalam subkontrak industri, kontraktor domestik sendiri ikut serta dalam proses produksi. Baik pedagang dan produsen dapat berfungsi sebagai kontraktor domestik. Pedagang yang mengkhususkan dalam bidang pemasaran berbagai produk tertentu dapat mengatur produksi melalui subkontrak perusahaan atau individu pilihan, yang harus memproduksi produk tertentu berdasarkan standar dan spesifikasi yang ditetapkan oleh kontraktor domestik. Akan tetapi, produsen akan menggunakan subkontrak untuk melakukan tugas tertentu dalam keseluruhan proses produksinya.

Peningkatan jumlah pekerja rumahan di Indonesia menunjukkan peningkatan fleksibilitas pasar kerja, eksternalisasi proses produksi, dan tingginya tingkat pengangguran terselubung, dan pekerjaan informal di Indonesia. Kesulitan dalam mengatur pekerjaan rumahan diperburuk dengan kenyataan bahwa pekerja rumahan terlibat dalam perjanjian informal yang tidak tercatat dan mekanisme penyediaan yang ada tidak sesuai atau tidak efektif. Tidak seperti kebanyakan bentuk pekerjaan alih daya dan kontrak, aparat penegakan ketenagakerjaan tradisional, misalnya pengawasan tenaga kerja, tidak meluas ke pemantauan pekerjaan rumahan.³⁵

Terdapat kekurangan dalam pemahaman umum di Indonesia mengenai pekerja rumahan sebagai ‘pekerja’ dalam hubungan ketenagakerjaan. Persyaratan pekerja rumahan untuk memproduksi berdasarkan standar kualitas dan spesifikasi dari subkontrak secara umum membentuk ‘pengawasan’ atau ‘subordinasi’ seperti definisi hubungan tenaga kerja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Namun, mengingat pengawasan kerja yang akan dilakukan oleh pekerja rumahan memiliki sifat yang berbeda dari jenis pengawasan yang ditawarkan di pabrik, pekerja rumahan sering sekali disalahartikan berada di luar hubungan tenaga kerja. Atau, beberapa perusahaan memperkenalkan hubungan tenaga kerja dengan pekerja rumahan sebagai hubungan komersial. Hal ini dapat melibatkan penjualan dan pembelian ulang barang jadi dari pekerja rumahan. Kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman dari status hukum dan undang-undang tenaga

Kesulitan dalam mengatur usaha rumah tangga diperburuk dengan informalitas dan kurangnya status hukum

34 UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1(15).

35 Ingat, inspektorat buruh memiliki wewenang hukum untuk menginspeksi tempat kerja (termasuk rumah tangga) dari pekerja rumahan, tetapi sampai saat ini mereka tidak melaksanakan investigasi atau pengawasan usaha rumahan di Indonesia.

Pekerja rumahan merupakan pekerja yang paling rentan dalam kontrak non-standar di Indonesia

kerja ditemukan di antara perusahaan, kontraktor, pemerintah, dan pekerja rumahan sendiri.³⁶

Akibatnya, pekerja rumahan secara khusus rentan terhadap tingginya tingkat eksploitasi. Mereka merupakan pekerja terisolasi terbesar, bekerja dalam privasi rumah tangganya, dan seperti pekerja alih daya dan kontrak, menghadapi hambatan yang signifikan untuk ikut serta dalam organisasi pekerja karena bahaya dari kontrak tenaga kerja. Pekerjaan rumahan ditandai dengan tenaga kerja yang tidak terduga (karena permintaan untuk usaha yang berfluktuasi berdasarkan permintaan perusahaan), upah yang sangat rendah, jam kerja yang panjang, pemotongan gaji dan pemecatan yang semena-mena, dan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja yang serius. Usaha rumah tangga secara umum melibatkan pekerja anak tanpa upah.

Perlindungan tenaga kerja umum yang diberikan kepada semua pekerja di Indonesia memberikan dasar perlindungan bagi pekerja rumahan. Namun, kerangka kerja undang-undang saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja ini. Kurangnya konsensus pada status hukum pekerja rumahan dan kewajiban terkait dari perusahaan juga menjadi hambatan untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan pekerja rumahan. Akibatnya, pengusaha dengan mudah ikut serta dalam perjanjian informal untuk merekrut pekerja rumahan. Hal ini menyebabkan pekerja rumahan memasuki perjanjian tenaga kerja berbahaya dan membuat mereka berada di antara pekerja paling rentan dalam kontrak tidak non-standar di Indonesia.

DWCP 2012-15 Tujuan 3: Perlindungan sosial untuk semua

Tujuan ketiga dari DWCP berfokus pada perlindungan sosial untuk semua. Lima prioritas kerja dapat dikenali dalam tujuan ini, mencakup:

1. Pemerintah dan mitra sosial memiliki kapasitas yang lebih besar dalam merancang dan menerapkan kebijakan dan program perlindungan sosial.
2. Hambatan terhadap lapangan kerja dan pekerjaan layak dapat diatasi, khususnya kesenjangan gender dan penyandang disabilitas.
3. Penerapan efektif dari Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
4. Peningkatan kerangka kebijakan, kelembagaan, dan penerapan program untuk pemberdayaan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan pekerja rumah tangga.
5. Kebijakan dan program terpadu HIV bagi pekerja perempuan dan laki-laki.

³⁶ Lihat Miranda Fajerman, Penerapan undang-undang buruh terhadap pekerja rumahan di Indonesia- Awal 2013 (ILO, Jakarta) (segera terbit)

2.8 Menciptakan landasan perlindungan sosial: Strategi untuk menutup kesenjangan di Indonesia

Konsep “Landasan Perlindungan Sosial” (LPS) secara resmi diterapkan pada bulan April 2009, ketika Dewan Eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung Gagasan Landasan Perlindungan Sosial (LPS-I) sebagai bagian dari respons krisis finansial global pada tahun 2008 (Lihat kotak di bawah). Relevansi yang berkelanjutan dari perlindungan sosial, baik sebagai hak dan sebagai tujuan untuk memastikan pembangunan jangka panjang, telah mengubah LPS menjadi pendekatan kebijakan yang diterima secara luas. LPS-I terdiri atas koalisi dari 19 badan PBB, institusi keuangan internasional, dan 14 rekan pembangunan, termasuk donor bilateral, bank pembangunan, dan LSM internasional, yang bekerja sama dan mengoordinasikan aktivitas mereka di tingkat nasional, regional, dan global untuk promosi perlindungan sosial bagi semua.

ILO telah melakukan penilaian berdasarkan dialog nasional yang dilakukan di beberapa negara Asia Tenggara - termasuk Kamboja, Indonesia, Thailand, dan Vietnam - yang bertujuan untuk membawa kerangka kerja perlindungan sosial. Penilaian ini dilakukan untuk mengidentifikasi elemen apa dari landasan perlindungan sosial nasional yang tepat, mengidentifikasi kesenjangan perlindungan sosial, dan mengurus rekomendasi dalam penerapan LPS di negara tujuan. Pemenuhan keempat jaminan atau hak yang membentuk LPS membutuhkan adanya program-program perlindungan sosial mendasar yang bersifat jangka panjang, fundamental, non kontribusi dan didanai melalui sumber daya publik atau anggaran pemerintah. Pendanaan tersebut harus dapat diprediksi secara tepat dan digunakan untuk jangka panjang. Dikarenakan perlunya upaya untuk mempertimbangkan bagaimana kegiatan awal ini akan didanai dan bagaimana cara mempertahankan kegiatan-kegiatan tersebut dari waktu ke waktu, maka penilaian ini mencakup latihan pembiayaan untuk mengetahui pendanaan yang tersedia dan dibutuhkan untuk memperkenalkan LPS.

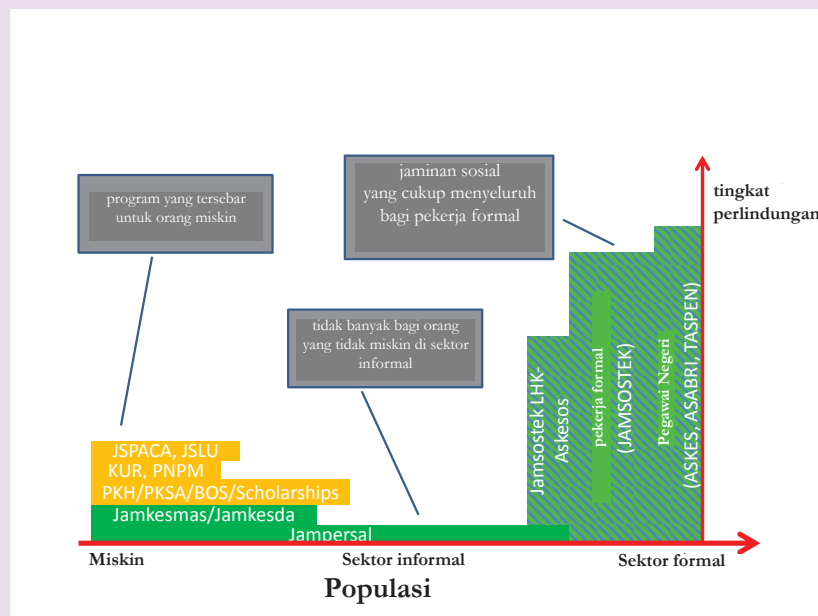
Penilaian yang berdasarkan pada dialog nasional yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir Indonesia telah melakukan langkah besar dalam pembangunan LPS nasional. Misalnya, pada amandemen 2002 dari Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa hak jaminan sosial untuk semua dan tanggung jawab Negara dalam pembangunan kebijakan jaminan sosial. Selain itu, pendahuluan Undang-Undang No. 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24/2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), memberikan landasan legislatif untuk menerapkan cakupan jaminan sosial komprehensif di Indonesia bagi pekerja ekonomi formal dan informal.

Landasan perlindungan sosial secara nasional menentukan jaminan sosial dasar yang menjamin untuk mencegah atau mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan keterbatasan sosial.

Sistem saat ini sangat mengabaikan pekerja tidak miskin dalam ekonomi informal

Sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia³⁷ terdiri atas skema pelayanan publik dan pekerja sektor swasta di ekonomi formal. Terdapat sejumlah program dan subsidi bantuan sosial yang didanai oleh pemerintah yang mendukung pekerja ekonomi informal miskin dan keluarganya, dan membentuk bagian dari pengaturan yang lebih luas dari kebijakan pemberantasan kemiskinan oleh Pemerintah. Meskipun demikian, latihan penilaian mengidentifikasi kesenjangan kebijakan signifikan dan masalah implementasi, dan menegaskan pada sistem saat ini yang secara luas mengabaikan pekerja tidak miskin dalam ekonomi informal (lihat gambar di bawah). Bahkan dalam ekonomi formal, cakupan jaminan sosial terbatas karena tingginya tingkat pengelakan kontribusi. Latihan penilaian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah dipengaruhi oleh masalah seperti penargetan yang tidak efisien, kurangnya koordinasi, dan gagasan yang tumpang tindih.

Gambar 25:
Penilaian tentang landasan perlindungan sosial untuk Indonesia



Sumber: Satriana, S. & Schmitt, V. (2012) Social Protection Floor Assessment: concept, process and key findings. Presentasi *power point* pada peluncuran laporan “Social Protection Assessment Based National Dialogue: Towards a Nationally Defined Social Protection Floor in Indonesia” tanggal 6 Desember 2012, Jakarta, Indonesia.

Kegiatan penilaian menunjukkan bahwa jaminan pendapatan untuk penduduk usia kerja sangat terbatas, khususnya bagi pekerja ekonomi informal. Jaminan sosial akan menguntungkan (kecelakaan, kematian, dan pensiun) bagi pekerja ekonomi formal yang saat ini diberikan oleh PT Askes, Taspen, dan Asabri. Program-program yang ditargetkan untuk pekerja swasta di sektor formal ini bersifat kontribusi, di mana kontribusi yang dibayarkan untuk oleh pengusaha untuk layanan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian dan dibayarkan bersama oleh pekerja dan pengusaha

37 Satriana, S. and Schmitt, V. 2012. *Social protection assessment based national dialogue: Towards a nationally defined social protection floor in Indonesia*. International Labour Organization, Jakarta.

untuk dana pensiun. Sedangkan program-program yang ditargetkan untuk pegawai negeri sipil adalah bersifat kontribusi, dimana kontribusi ini dibagi oleh pekerja dan pengusaha untuk semua kasus. Dikarenakan pekerja informal tidak terdaftar dengan baik dalam administrasi publik, maka saat ini sulit untuk menegakkan atau memantau pelaksanaan program-program jaminan sosial untuk segmen perekonomian ini. Bantuan untuk kaum Dukungan untuk lanjut usia juga terbatas, hampir 90 persen dari keseluruhan penduduk tidak memiliki skema jaminan akhir tua. Penilaian ini juga menunjukkan bahwa sistem pensiun sektor swasta, yang berdasarkan pada transfer pembayaran sekaligus, kadang memberikan perlindungan yang tidak memadai.

Sebagai tambahan dalam program jaminan sosial tradisional untuk penduduk usia kerja, Pemerintah mengoperasikan beragam program pencarian pekerjaan, penciptaan lapangan kerja, dan program pembangunan lain, subsidi upah, program pelatihan vokasional, dan skema usaha sendiri yang mendukung kelompok yang rentan. Program ini merupakan bagian dari LPS, namun seringkali tidak cukup didanai dan/atau bersifat *ad-hoc*, dan tidak dikaitkan dengan bantuan sosial dan skema jaminan sosial lain. Oleh karena itu, peran program ini sebagai program perlindungan sosial dan dampak potensial yang terkait pada kelangsungan hidup individu jarang terjadi.

Pengeluaran umum dalam bantuan sosial diperkirakan mencapai 57 triliun Rupiah atau 4,2 persen dari total pengeluaran 2011. Dalam PDB, bantuan sosial diperkirakan sekitar 0,7 persen dari PDB tahun 2011.³⁸ Secara umum, pengeluaran pada bantuan sosial akan terus berfluktuasi, dan hanya turun sedikit dari keseluruhan pengeluaran sejak tahun 2005.

Ruang fiskal Pemerintah yang terbatas untuk meningkatkan pengeluaran bantuan sosial dan pengeluaran pembangunan lain sering sekali dihubungkan dengan kebijakan subsidi bahan bakar. Subsidi bahan bakar Indonesia menentukan harga eceran bahan bakar bersubsidi menjadi Rp. 6.500 dan solar bersubsidi menjadi Rp. 5.500, dengan pengeluaran Pemerintah yang menutupi kesenjangan antara harga pasti dan harga internasional. Kebijakan ini rentan untuk disesuaikan dengan harga komoditas bahan bakar internasional dan tingkat pertukaran mata uang. Untuk menggambarannya, pengeluaran bahan bakar bersubsidi pada tahun 2011 dianggarkan sebanyak 9,8 persen (130 triliun Rupiah) dari keseluruhan pengeluaran, namun meningkat menjadi 12,8 persen (165 triliun Rupiah) dari keseluruhan pengeluaran karena fluktuasi harga dan peningkatan permintaan konsumen. Ketidakpastian yang terjadi dalam pengeluaran bahan bakar bersubsidi berdampak pada pengeluaran Pemerintahan, khususnya dalam perluasan program perlindungan sosial.

Secara umum telah disetujui bahwa bahan bakar bersubsidi bukan model yang optimal untuk mempromosikan kesetaraan sosial dan distribusi

Penilaian ini mengindikasikan bahwa penyediaan perlindungan sosial untuk semua adalah terjangkau, membutuhkan biaya hingga 2,45 persen dari PDB.

38 World Bank (2013) Indonesia Economic Quarterly: Continuing adjustment - October 2013, World bank, Jakarta.

pendapatan sebagai kecenderungan masyarakat yang tidak miskin untuk menikmati keuntungan langsung. Meskipun demikian, jika harga bahan bakar naik, dampak langsung dan tidak langsung akan dirasakan di seluruh ekonomi dengan peningkatan margin perdagangan dan transportasi dan bisnis yang membebani konsumen. Harga yang semakin tinggi untuk komoditas menurunkan daya beli, khususnya bagi rakyat miskin. Oleh karena itu, pelaksanaan subsidi energi dan bahan bakar, misalnya melanjutkan mekanisme penyesuaian harga bahan bakar yang memberikan penyangga melawan harga yang fluktuatif, harus dikombinasikan dengan pendalaman dan perluasan program perlindungan sosial di Indonesia. Alat keuangan Protokol Penilaian Cepat (RAP) ILO memperkirakan bahwa untuk menyediakan LPS untuk semua, pengeluaran program sosial harus memiliki sekitar 2,45 persen dari PDB. Khususnya, peningkatan penyediaan jaminan sosial dan menyediakan landasan perlindungan sosial tidak sepenuhnya ikut serta dalam keseluruhan peningkatan dalam pengeluaran Pemerintah atau melaksanakan defisit fiskal; dapat diraih melalui perubahan pengeluaran fiskal saat ini.

Kotak 5: Apa yang dimaksud dengan landasan perlindungan sosial?

Landasan perlindungan sosial (LPS) secara nasional menentukan jaminan sosial dasar yang menjamin untuk mencegah atau mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan keterbatasan sosial. LPS mengadopsi pendekatan holistik dalam perlindungan sosial dengan menggunakan pengukuran permintaan (transfer) dan sisi penawaran (pelayanan) untuk dicantumkan dalam sistem jaminan sosial dan program kesejahteraan hidup/kesejahteraan kerja yang berkaitan dengan kapasitas fiskal dan negara dengan ekonomi berkembang. LPS mencakup perangkat barang dan jasa berikut atau jaminan sosial dasar yang memastikan jika berada dalam tingkat nasional:

1. Akses ke jaminan kesehatan yang penting, termasuk jaminan kelahiran, pada tingkat minimum nasional yang sesuai dengan kriteria ketersediaan, aksesibilitas, kemampuan menerima, dan kualitas;
2. Jaminan pendapatan dasar untuk anak-anak pada tingkat minimum nasional termasuk akses nutrisi, edukasi, perlindungan, dan barang dan layanan penting lainnya;
3. Jaminan pendapatan dasar pada tingkat minimum nasional untuk penduduk usia aktif yang tidak dapat mendapatkan pendapatan cukup, dalam kasus tertentu karena sakit, pengangguran, hamil, dan keterbatasan; dan
4. Jaminan pendapatan dasar pada tingkat minimum nasional untuk lanjut usia.

Empat jaminan ini memberikan performa minimum atau standar pengeluaran sehubungan dengan akses, ruang lingkup, dan tingkat

jaminan sosial dan perlindungan kesehatan, dibandingkan dengan merumuskan arsitektur khusus dari sistem, program, dan keuntungan perlindungan sosial. Keempat jaminan LPS menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan implementasi progresif dari sistem perlindungan sosial holistik yang menegaskan pada hubungan dan hubungan simbiosis antara jaminan LPS yang berbeda.

2.9 Formalisasi ekonomi informal: Pekerjaan rumah tangga di Indonesia

Pekerja rumah tangga(PRT) adalah bagian yang signifikan dari pekerjaan informal di Indonesia dan termasuk kelompok paling rentan di pasar kerja. Mereka bekerja untuk rumah tangga pribadi, sering sekali tanpa persyaratan kerja yang jelas sesuai undang-undang ketenagakerjaan. Secara umum, tantangan untuk meningkatkan kondisi kerja adalah yang paling sulit karena pekerjaan dilaksanakan di luar ranah hukum dan kerangka kerja kelembagaan di sektor perekonomian informal.

Secara global, diperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia mencapai angka 53 juta tahun 2010.³⁹ Sebagai respon dari penyebaran PRT secara ekstensif dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, Konferensi Perburuhan Internasional ILO mengadopsi Konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga pada bulan Juni 2011. Sejak tahun 2011, 10 negara telah meratifikasi Konvensi ini dan 25 negara lain telah memperbaiki perlindungan hukum bagi PRT. Indonesia belum termasuk dalam negara-negara yang menandatangani konvensi ini, dan kemajuan dalam meningkatkan kondisi kerja PRT sangat diperlukan.

Konvensi pekerja rumah tangga (No. 189) diumumkan pada bulan Juni 2011.

Untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi PRT, diperlukan pemahaman yang baik mengenai siapa itu PRT dan pemberi kerjayang mempekerjakan mereka. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai PRT di Indonesia. Data ini bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah orang yang bekerja sebagai PRT yang tinggal bersama majikan mereka dan PRT yang tidak tinggal bersama majikan, serta perkiraan jumlah majikan PRT. Data ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi proporsi tertentu dari pekerja rumah tangga anak (PRTA).

39 ILO (2013) pekerja rumah tangga di Seluruh Dunia: Statistik global dan regional dan perluasan perlindungan hukum, Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa.

Survei Sakernas mencatat informasi tentang PRT usia 15 tahun ke atas. Survei Susenas mencatat informasi tentang pekerja usia 10 tahun ke atas. Survei ini dapat digunakan untuk memperkirakan pekerjaan rumah tangga karena ia menanyakan tentang hubungan mereka dengan kepala rumah tangga. Survei ini mengumpulkan informasi tentang PRT yang tinggal dan tidak tinggal bersama majikan mereka. Meskipun demikian, kedua survei ini tidak cukup mengumpulkan informasi tentang PRTA, khususnya mereka yang berusia di bawah 15 tahun yang tinggal bersama majikan mereka.

Data Sakernas dan Susenas tidak secara khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang PRT, dan diperkirakan berasal dari survei yang seharusnya dilaksanakan secara seksama. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama survei hanya sebagian merekam data mengenai pekerja rumah tangga anak. Kedua, PRT tidak selalu dianggap sebagai pekerja oleh majikan mereka atau diri mereka sendiri. Ketiga, pekerjaan rumah tangga mungkin bukan kegiatan ekonomi primer bagi individu sedangkan kegiatan ekonomi lain mungkin tidak dicakup dalam survei ini. Terakhir, survei ini mungkin kesulitan untuk memperoleh data dari rumah tangga di kalangan atas.⁴⁰

*Diperkirakan
terdapat 2,6
juta pekerja
rumah tangga di
Indonesia*

Terlepas dari peringatan ini, survei Sakernas dan Susenas dapat digunakan untuk memperkirakan pekerjaan rumah tangga di Indonesia. Analisis data survei menunjukkan bahwa jumlah PRT di Indonesia adalah sekitar 2,6 juta tahun 2012. Jumlah ini meningkat dari perkiraan 2,2 juta yang tercatat tahun 2008. Sebagian besar PRT adalah perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Kebanyakan PRT juga tinggal dan bekerja di daerah perkotaan. Untuk menggambarkan hal ini, pada tahun 2012 terdapat hampir 2 juta PRT di daerah perkotaan dibandingkan hanya 618.000 pekerja rumah tangga di daerah pedesaan.

*Banyak pekerja
rumah tangga
bekerja dengan
jam kerja yang
berlebihan*

Banyak PRT menghadapi kondisi kerja yang sulit. Sebagai contoh, sekitar 70 persen PRT bekerja dengan jam kerja berlebihan, 7 hari seminggu. Upah yang diperoleh PRT masih rendah bila dibandingkan pekerja lain, dimana 30 persen dari PRT menerima kurang dari Rp. 300.000 per bulan.

*Diperkirakan
terdapat kurang dari
120.000 pekerja
rumah tangga anak
di Indonesia*

Analisis data Sakernas tahun 2012 mencatat bahwa jumlah pekerja rumah tangga usia 15 sampai 17 adalah 111.000. Angka ini menurun 60.000 dari tahun 2008 yang mencapai angka 170.000. Dengan menggunakan parameter jumlah jam kerja, dari 111.000 pekerja muda usia 15 sampai 17 tahun ini,⁴¹ hanya 84.000 yang dapat digolongkan sebagai PRTA karena jam kerja mereka lebih dari 40 jam seminggu. PRTA usia 15 sampai 17 tahun menyumbang 7,6 persen dari semua PRT di atas 15 tahun. Susenas juga mencatat data pekerja anak usia 15 sampai 17 tahun, dan analisis data ini menunjukkan bahwa sekitar 100.000 anak-anak dalam kelompok usia ini adalah PRTA. Oleh karena itu, Susenas memperkirakan pekerjaan

40 Misalnya, pemeriksaan silang data antara Susenas pada variable seperti kepemilikan mobil dengan data nasional atas kepemilikan mobil akan menunjukkan ketidakcocokan.

41 Anak-anak usia 15 sampai 17 tahun yang melaksanakan pekerjaan rumah tangga dianggap pekerja anak bila mereka bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan dalam kondisi yang mirip seperti perbudakan. Salah satu parameter kondisi berbahaya adalah jam kerja yang berlebihan.

PRTA sedikit lebih rendah daripada perkiraan Sakernas. Terlepas dari ketidakcocokan antara dua data ini, perkiraan PRTA usia 15 hingga 17 tahun terbilang cukup konsisten antara tahun 2008 dengan 2012, dan menunjukkan tren yang menurun selama periode ini.

Data Susenas juga dapat digunakan untuk menganalisis pekerja anak yang usia di bawah 15 tahun, tapi hanya yang tinggal di rumah majikan. Analisis data menunjukkan bahwa jumlah PRTA usia 5 sampai 11 adalah kurang dari 1000 pada tahun 2012. Estimasi PRTA usia 12 sampai 14 tahun menunjukkan bahwa kurang dari 6000 anak dalam kelompok ini yang melakukan pekerjaan rumah tangga pada tahun 2012. Namun, perkiraan pekerjaan rumah tangga anak di berbagai kelompok usia antara tahun 2008 dan 2012 sangat beragam, dan ini menunjukkan bahwa estimasi ini tidak bisa diandalkan.

Pekerja rumah tangga anak atau PRTA didominasi oleh perempuan, mengikuti pola yang sama seperti pekerja dewasa. Kebanyakan PRTA bekerja dengan jam kerja yang lama, lebih dari 66,5 jam per minggu, sehingga tidak punya waktu untuk sekolah. Di samping itu, kebanyakan PRTA tidak bersekolah. Pada tahun 2008 hanya 4,5 persen PRTA yang bersekolah. Pada tahun 2012 jumlah ini meningkat menjadi 16,5 persen, namun, masih dianggap rendah.

Sakernas menunjukkan bahwa jumlah PRT yang tidak tinggal bersama majikan mereka lebih besar dari jumlah PRT yang tinggal bersama majikan. Pada tahun 2012 PRT yang tinggal bersama majikan diperkirakan sekitar 423.000 sedangkan PRT yang tidak tinggal bersama majikan diperkirakan sekitar 2,1 juta. Data ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 jumlah PRT yang tidak tinggal bersama majikan meningkat tajam, sedangkan jumlah PRT yang tinggal bersama majikan menurun.

Susenas dan Sakernas juga menyediakan informasi tentang majikan PRT. Pada tahun 2012 analisis data ini menunjukkan bahwa ada sekitar 1,15 juta majikan PRT. Dibandingkan dengan masyarakat umum, mereka biasanya tinggal di rumah dengan jumlah anggota keluarga yang lebih besar. Mereka cenderung memperoleh penghasilan lebih tinggi dan memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi bila diukur dari pengeluaran per kapita. Pada tahun 2008 pendapatan bulanan rata-rata keluarga ini diperkirakan Rp. 6.000.000.

Data Sakernas dan Susenas juga dapat digunakan untuk menyediakan perkiraan jumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan tentang karakteristik pekerjaan mereka. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk PRT, khususnya PRTA, guna meningkatkan keandalan informasi sehingga solusi yang lebih efisien untuk perlindungan PRT dapat direncanakan.

Lebih dari 1 juta rumah tangga mempekerjakan pekerja rumah tangga

*Ratifikasi
konvensi pekerja
rumah tangga
dapat membantu
meningkatkan
kondisi kerja pekerja
ini*

Yang terpenting, PRT berhak memperoleh perlindungan dengan cara yang sama seperti penerima upah yang lain, termasuk upah yang setara dengan upah minimum. Perbaikan kondisi kerja PRT sudah menjadi masalah jangka panjang di Indonesia. Perluasan perlindungan yang disediakan untuk pekerja lain sebaiknya menjangkau PRT, sehingga dapat membantu mengurangi kerentanan mereka. Konvensi ILO no. 189 tahun 2011 tentang pekerja rumah tangga menguraikan kerangka kerja hukum untuk meneruskan hak PRT dan ratifikasi atas Konvensi ini dapat membantu memperbaiki kondisi para pekerja ini.

Lampiran I: Disagregasi BPS atas pekerjaan di sektor ekonomi formal dan informal

Status Ketenagakerjaan	Pekerjaan Utama									
	Pekerja profesional, teknis, dan terkait	Pekerja administratif dan manajerial	Pekerja tata usaha dan terkait	Pekerja pema-saran	Pekerja jasa	Pekerja industri pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, dan pemburu	Pekerja produksi dan terkait	Pekerja transportasi dan operator peralatan	Buruh	Lain-nya
Wiraswasta, bekerja sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Wiraswasta, dibantu pekerja sementara/pekerja tanpa upah	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pengusaha	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh hariandi sektor pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Buruh hariannon pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja tanpa upah	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Sumber: BPS (2012) *Kedudukan Pekerja di Indonesia: Agustus 2012*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
Catatan: F *kepanjangan dari formal dan INF dari informal*

Lampiran II: Lampiran statistik – Indikator pasar kerja berdasarkan jenis kelamin 2009–2013

Variabel	Agustus 2009	Februari 2010	Agustus 2010	Februari 2011	Agustus 2011	Februari 2012	Mei 2012	Agustus 2012	November 2012	Februari 2013	Mei 2013
Penduduk	231.832.834	238.219.392	238.219.392	239.983.373	241.564.863	243.151.942	243.949.608	244.750.214	245.554.541	246.356.410	247.157.935
*Laki-laki	116.050.632	119.852.909	119.852.909	120.821.788	121.625.982	122.433.173	122.838.583	123.246.172	123.655.365	124.063.256	124.471.078
*Perempuan	115.782.202	118.366.483	118.366.483	119.161.585	119.938.881	120.718.769	121.111.025	121.504.042	121.899.176	122.293.154	122.686.857
Penduduk usia 15 tahun atau lebih	169.328.208	172.070.339	172.070.339	170.656.139	171.756.077	172.865.970	173.420.739	173.926.703	174.539.295	175.098.712	175.654.083
*Laki-laki	84.174.122	85.820.939	85.820.939	85.155.626	85.710.829	86.272.511	86.551.874	86.806.933	87.118.475	87.401.117	87.681.971
*Perempuan	85.154.086	86.249.400	86.249.400	85.500.513	86.045.248	86.593.459	86.868.865	87.119.770	87.420.820	87.697.595	87.972.112
Aktif secara ekonomi	113.833.280	116.527.546	116.527.546	119.399.375	117.370.485	120.417.046	120.700.158	118.053.110	120.367.421	121.191.712	121.654.703
*Laki-laki	70.409.087	71.881.763	71.881.763	72.259.824	72.251.521	73.907.357	74.372.440	73.284.748	74.325.901	74.398.557	74.802.840
*Perempuan	43.424.193	44.645.783	44.645.783	47.139.551	45.118.964	46.509.689	46.327.718	44.768.362	46.041.520	46.793.155	46.851.863
Bukan angkatan kerja	55.494.928	55.542.793	55.542.793	51.256.764	54.385.592	52.448.924	52.720.581	55.873.593	54.171.874	53.907.000	53.999.380
*Laki-laki	13.765.035	13.939.176	13.939.176	12.895.802	13.459.308	12.365.154	12.179.434	13.522.185	12.792.574	13.002.560	12.879.131
*Perempuan	41.729.893,0	41.603.617	41.603.617,0	38.360.962,0	40.926.284	40.083.770	40.541.147	42.351.408	41.379.300	40.904.440	41.120.249
Angka partisipasi angkatan kerja	67,2%	67,7%	67,7%	70,0%	68,3%	69,66%	69,60%	67,9%	68,96%	69,21%	69,26%
*Laki-laki	83,6%	83,8%	83,8%	84,9%	84,3%	85,67%	85,93%	84,4%	85,32%	85,12%	85,31%
*Perempuan	51,0%	51,8%	51,8%	55,1%	52,4%	53,71%	53,33%	51,4%	52,67%	53,36%	53,26%
Bekerja	104.870.663	108.207.767	108.207.767	111.281.744	109.670.399	112.802.805	113.345.609	110.808.154	113.402.417	114.021.189	114.586.184
*Laki-laki	65.122.526	67.462.223	67.462.223	67.623.205	67.989.943	69.479.641	70.046.735	69.068.965	70.519.732	70.206.021	70.696.824
*Perempuan	39.748.137	40.745.544	40.745.544	43.658.539	41.680.456	43.323.164	43.298.874	41.739.189	42.882.685	43.815.168	43.889.360
Rasio tenaga kerja terhadap penduduk	61,9%	62,9%	62,9%	65,2%	63,9%	65,3%	65,4%	63,7%	65,0%	65,1%	65,2%
*Laki-laki	77,4%	78,6%	78,6%	79,4%	79,3%	80,5%	80,9%	79,6%	80,9%	80,3%	80,6%
*Perempuan	46,7%	47,2%	47,2%	51,1%	48,4%	50,0%	49,8%	47,9%	49,1%	50,0%	49,9%
Pengangguran	8.962.617	8.319.779	8.319.779	8.117.631	77.000.086	7.614.241	7.354.549	72.449.56	6.965.004	7.170.523	7.068.519
*Laki-laki	5.286.561	4.419.540	4.419.540	4.636.619	4.261.578	4.427.716	4.325.705	4.215.783	3.806.169	4.192.536	4.106.016
*Perempuan	3.676.056	3.900.239	3.900.239	3.481.012	3.438.508	3.186.525	3.028.844	4.215.784	3.158.835	2.977.987	2.962.503
Angka pengangguran	7,9%	7,1%	7,1%	6,8%	6,6%	6,3%	6,1%	6,1%	5,8%	5,9%	5,8%
*Laki-laki	7,5%	6,1%	6,1%	6,4%	5,9%	6,0%	5,8%	5,8%	5,1%	5,6%	5,5%
*Perempuan	8,5%	8,7%	8,7%	7,4%	7,6%	6,9%	6,5%	9,4%	6,9%	6,4%	6,3%

Lampiran II: Lampiran statistik – Indikator pasar kerja berdasarkan jenis kelamin 2009–2013 (lanjutan)

Variabel	Agustus 2009	Februari 2010	Agustus 2010	Februari 2011	Agustus 2011	Februari 2012	Mei 2012	Agustus 2012	November 2012	Februari 2013	Mei 2013
Pekerjaan informal dalam persen jumlah total pekerjaan yang ada	61,6%	NA	59,0%	58,4%	54,7%	55,8%	55,1%	53,6%	53,5%	53,5%	53,6%
*Laki-laki	60,1%	NA	57,2%	58,3%	59,8%	59,0%	59,3%	59,6%	60,0%	59,0%	59,2%
*Perempuan	64,0%	NA	61,8%	41,7%	40,3%	41,0%	40,8%	40,4%	40,0%	41,1%	40,1%
Pekerjaan formal dalam persen jumlah total pekerjaan yang ada	38,4%	NA	41,0%	41,6%	45,3%	44,2%	45,0%	46,4%	46,5%	46,5%	46,4%
*Laki-laki	39,9%	NA	42,8%	64,3%	64,7%	64,8%	64,9%	65,5%	64,7%	64,6%	64,6%
*Perempuan	36,0%	NA	38,2%	35,7%	35,3%	35,2%	35,1%	34,5%	35,3%	35,4%	35,4%
Angka tenaga kerja rentan ⁴²	69,3%	NA	66,9%	65,8%	62,2%	62,7%	62,1%	60,1%	59,8%	60,0%	59,6%
*Laki-laki	67,4%	NA	64,8%	62,8%	59,7%	59,8%	59,2%	57,2%	57,3%	57,1%	56,9%
*Perempuan	72,5%	NA	70,4%	70,3%	66,2%	67,3%	66,7%	65,0%	64,0%	64,7%	64,0%
Pekerja dalam persen berdasarkan total pekerjaan	27,8%	28,4%	29,6%	31,1%	34,4%	33,8%	34,1%	36,4%	36,5%	36,5%	36,6%
*Laki-laki	28,6%	29,6%	31,2%	32,9%	35,9%	35,7%	35,8%	38,2%	37,9%	38,3%	38,3%
*Perempuan	26,4%	26,4%	28,2%	28,2%	32,1%	30,9%	31,2%	33,4%	34,1%	33,6%	34,0%
Tenaga kerja paruh waktu	16.174.364	18.010.583	18.010.583	18.457.786	21.064.033	20.681.547	21.184.597	21.519.289	24.834.911	22.149.018	22.465.084
*Laki-laki	6.948.257	7.974.803	7.974.803	7.516.925	9.645.554	8.947.939	9.058.528	10.065.503	10.694.930	9.565.335	9.833.908
*Perempuan	9.226.107	10.035.780	10.035.780	10.940.861	11.418.479	11.733.608	12.126.069	11.453.786	14.139.981	12.583.683	12.631.176
Tingkat tenaga kerja paruh waktu	15,4%	16,6%	16,6%	16,6%	19,2%	18,3%	18,7%	19,4%	21,9%	19,4%	19,6%
*Laki-laki	10,7%	11,8%	11,8%	11,1%	14,2%	12,9%	12,9%	14,6%	15,2%	13,6%	13,9%
*Perempuan	23,2%	24,6%	24,6%	25,1%	27,4%	27,1%	28,0%	27,4%	33,0%	28,7%	28,8%
Pengangguran terselubung	15.395.570	15.258.755	15.258.755	15.736.478	13.524.054	14.868.987	14.118.645	12.770.521	10.246.005	13.561.206	13.071.618
*Laki-laki	8.724.692	8.647.031	8.647.031	8.810.637	7.661.408	8.069.245	7.784.589	7.372.745	6.316.145	7.697.894	7.357.727
*Perempuan	6.670.878	6.611.724	6.611.724	6.925.841	5.862.646	6.799.742	6.334.056	5.397.776	3.929.860	5.863.312	5.713.891
Angka pengangguran terselubung	14,7%	14,1%	14,1%	14,1%	12,3%	13,2%	12,5%	11,5%	9,0%	11,9%	11,4%
*Laki-laki	13,4%	12,8%	12,8%	13,0%	11,3%	11,6%	11,1%	10,7%	9,0%	11,0%	10,4%
*Perempuan	16,8%	16,2%	16,2%	15,9%	14,1%	15,7%	14,6%	12,9%	9,2%	13,4%	13,0%

Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia : Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

42 Indonesia mendefinisikan tenaga kerja rentan sebagai jumlah dari wiraswasta, pengusaha yang memiliki pekerja sementara/pekerja tanpa upah, buruh harian, dan pekerja keluarga.

Lampiran III: Lampiran statistik - Indikator pasar kerja untuk kaum muda 2009-2013

Variabel	Agustus 2011	Februari 2012	Mei 2012	Agustus 2012	November 2012	Februari 2013	Mei 2013
Penduduk usia kerja (15-24)	41.457.814	41.470.000	41.880.000	42.009.547	42.170.000	42.310.584	42.452.871
*Laki-laki	20.849.722	20.990.000	21.060.000	21.127.366	21.210.000	21.280.149	21.352.408
*Perempuan	20.608.092	20.750.000	20.820.000	20.882.181	20.960.000	21.030.435	21.100.463
Bukan angkatan kerja (15-24)	20.564.495	20.100.000		21.268.284	20.920.000	21.151.426	21.442.621
*Laki-laki	8.411.405	7.910.000		8.644.616	8.290.000	8.331.702	8.496.536
*Perempuan	12.153.090	12.450.000		12.623.668	12.630.000	12.819.724	12.946.085
Angkatan kerja (15-24)	20.893.319	21.370.000		20.741.263	21.250.000	21.159.158	21.010.250
*Laki-laki	12.438.317	13.080.000		12.482.750	12.920.000	12.948.447	12.855.872
*Perempuan	8.455.002	8.300.000		8.258.513	8.330.000	8.210.711	8.154.378
Angka partisipasi angkatan kerja (15-24)	50,4%	51,2%	50,9%	49,4%	50,4%	50,0%	49,5%
*Laki-laki	59,7%	62,3%	62,7%	59,1%	60,9%	60,8%	60,2%
*Perempuan	41,0%	40,0%	39,0%	39,5%	39,7%	39,0%	38,6%
Tenaga kerja (15-24)	16.717.575	17.300.000		16.683.372	17.510.000	17.449.313	17.224.753
*Laki-laki	10.041.100	10.550.000		10.057.950	10.700.000	10.643.103	10.456.985
*Perempuan	6.676.475	6.750.000		6.625.422	6.810.000	6.806.210	6.767.768
Rasio tenaga kerja terhadap penduduk (15-24)	40,3%	41,7%		39,7%	41,5%	41,2%	40,6%
*Laki-laki	48,2%	50,3%		47,6%	50,4%	50,0%	49,0%
*Perempuan	32,4%	32,5%		31,7%	32,5%	32,4%	32,1%
Pengangguran (15-24)	4.175.744			4.057.891		3.709.845	3.785.497
*Laki-laki	2.397.217			2.424.800		2.305.344	2.398.887
*Perempuan	1.778.527			1.633.091		1.404.501	1.386.610
Angka pengangguran (15-24)	20,0%	19,1%	17,9%	19,6%	17,9%	17,5%	18,0%
*Laki-laki	19,3%	19,3%	19,1%	19,4%	17,1%	17,8%	18,7%
*Perempuan	21,0%	19,7%	16,0%	19,8%	18,3%	17,1%	17,0%

Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia : Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Lampiran IV: Lampiran statistik – Indikator pasar kerja berdasarkan sektor ekonomi 2009–2013

Sektor Ekonomi	Agustus 2009	Februari 2010	Agustus 2010	Februari 2011	Agustus 2011	Februari 2012	Mei 2012	Agustus 2012	November 2012	Februari 2013	Mei 2013
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	41.611.840	42.825.807	41.494.941	42.475.329	39.328.915	41.205.030	41.432.463	38.882.134	38.990.810	39.959.073	40.593.165
Pertambangan dan Penggalian	1.155.233	1.188.634	1.254.501	1.352.219	1.465.376	1.620.028	1.707.625	1.601.019	1.731.625	1.555.564	1.608.669
Manufaktur	12.839.800	13.052.521	13.824.251	13.696.024	14.542.081	14.211.562	14.372.061	15.367.242	14.681.515	14.784.843	14.508.463
Listrik, Gas, dan Air	223.054	208.494	234.070	257.270	239.636	297.805	269.334	248.927	249.379	254.528	258.492
Konstruksi	5.486.817	4.844.689	5.592.897	5.591.084	6.339.811	6.103.457	6.365.115	6.791.662	7.462.423	6.885.341	6.706.544
Perdagangan Grosir, Perdagangan Eceran, Restoran, dan Hotel	21.947.823	22.212.885	22.492.176	23.239.792	23.396.537	24.020.934	23.956.824	23.155.798	24.713.479	24.804.705	24.525.473
Transportasi, Penyimpanan, dan Komunikasi	6.117.985	5.817.680	5.619.022	5.585.124	5.078.822	5.191.771	5.135.206	4.998.260	5.282.754	5.231.775	5.093.278
Keuangan, Asuransi, Real Estate, dan Pelayanan Bisnis	1.486.596	1.639.748	1.739.486	2.058.968	2.633.362	2.779.201	2.907.397	2.662.216	2.915.906	3.012.770	3.086.313
Komunitas, Sosial, dan Pelayanan Personal	14.001.515	15.615.114	15.956.423	17.025.934	16.645.859	17.373.017	17.199.584	17.100.896	17.374.526	17.532.590	18.205.787
Total:	104.870.663	107.405.572	108.207.767	111.281.744	109.670.399	112.802.805	113.345.609	110.808.154	113.402.417	114.021.189	114.586.184

Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia : Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Lampiran V: Lampiran statistik – Indikator pasar kerja berdasarkan status tenaga kerja 2009–2013

Status tenaga kerja utama	Agustus 2009	Februari 2010	Agustus 2010	Februari 2011	Agustus 2011	Februari 2012	Agustus 2012	Februari 2013	Mei 2013
Pekerja mandiri	21.046.007	20.456.735	21.030.571	21.149.311	19.415.464	19.543.475	18.440.722	19.139.344	19.706.088
Pekerja mandiri dibantu dengan Anggota Keluarga	21.933.546	21.922.813	21.681.991	21.308.835	19.662.375	20.367.416	18.761.405	19.380.757	18.715.866
Pengusaha dengan pekerja Permanen	3.033.220	3.016.154	3.261.864	3.594.568	3.717.869	3.930.591	3.873.041	4.026.097	4.268.208
Pekerja	29.114.041	30.724.161	32.521.517	34.513.624	37.771.890	38.135.062	40.291.583	41.561.419	41.977.961
Buruh hariandi sektor pertanian	5.878.894	6.324.719	5.815.110	5.575.925	5.476.491	5.356.265	5.339.998	5.001.220	5.480.395
Buruh hariannon pertanian	5.670.709	5.284.598	5.132.061	5.158.700	5.639.857	5.970.608	6.202.093	6.423.026	6.391.899
Pekerja tanpa upah	18.194.246	19.676.392	18.764.653	19.980.781	17.986.453	19.499.388	17.899.312	18.489.326	18.045.767
Total:	104.870.663	107.405.572	108.207.767	111.281.744	109.670.399	112.802.805	110.808.154	114.021.189	114.586.184

Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia : Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Lampiran VI: Lampiran statistik – Indikator upah 2006–2012

Variabel	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Upah minimum rata-rata sederhana (nominal)	362.700	414.700	458.500	507.700	602.700	673.300	743.200	839.400	908.800	998.829	1.121.460
Upah nominal rata-rata per bulan untuk pekerja/buruh (Agustus)	599.769	684.915	729.516	856.088	985.028	1.077.312	1.158.085	1.322.380	1.410.982	1.529.161	1.630.193
Pertumbuhan upah minimum rata-rata	NA	12,54%	9,55%	9,69%	15,76%	10,49%	9,41%	11,46%	7,64%	9,01%	10,93%
Pertumbuhan upah bersih rata-rata untuk pekerja/buruh	NA	12,43%	6,11%	14,78%	13,09%	8,57%	6,97%	12,42%	6,28%	7,73%	6,20%
Indeks Harga Konsumen	NA	5,16%	6,40%	17,11%	6,60%	6,59%	11,06%	2,78%	6,96%	3,79%	4,30%

Sumber: BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia Mei 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta.